

5 Laporan Utama

Tujuan pengenaan bea keluar untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan hilirisasi industri sawit.

32 Seputar Bea Cukai

Pembentukan KPPBC TMP Cikarang Upaya Mendukung Industri dan Meningkatkan Pelayanan.

47 Travel Notes

Customs Diving Club (CDC) kembali memperingati HUT kemerdekaan RI dengan melakukan pengibaran bendera bawah laut.



w a r t a bea cukai

Informasi Terpercaya Kepabeanan dan Cukai

Bea Keluar dan Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya





KELUARGA BESAR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
MENGUCAPKAN

Salamat
Hari Raya

مِنَّا لِمَنَّا
١٤٣٦ هـ

Tumbuhkan keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama

Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai instansi yang diberikan amanah untuk memungut bea keluar telah mempersiapkan diri sampai dengan sisi teknis penanganan dilapangan.

Dari sisi teknis, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dan PMK Nomor 136/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat PMK 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan/atau Produk Turunannya yang berlaku tanggal 16 Juli 2015. Dari sisi penerimaan, DJBC tentunya akan menyesuaikan beban target yang ditetapkan untuk sektor bea keluar.

Dirjen Bea dan Cukai sebagai salah satu pimpinan tertinggi DJBC, secara formal telah memerintahkan dan memberikan petunjuk operasional kepada seluruh unit kerja di lingkungan DJBC untuk melakukan pelayanan dan pengawasan atas eksportasi kelapa sawit, crude palm oil (CPO), dan/atau produk turunannya dengan sebaik-baiknya dengan mengacu pada ketentuan yang telah berlaku. DJBC juga memastikan bahwa tidak terjadi hambatan pelayanan di kantor-kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai terhadap eksportasi kelapa sawit, CPO, dan/atau produk turunannya dengan terbitnya aturan-aturan di atas. Secara detail, kami akan mengulas tentang aturan terbaru berkaitan dengan bea keluar untuk ekspor kelapa sawit, CPO, dan/atau produk turunannya dalam rubrik Laporan Utama.

Seiring dengan meningkatnya kerjasama regional yang telah dibentuk antara Indonesia dengan Malaysia, DJBC sebagai unit yang menjaga perbatasan negara menjalin kerja sama dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Kedua negara tersebut mengadakan pertemuan dan sepakat untuk meningkatkan pengawasan terkait masalah penyelundupan, pertukaran informasi serta operasi bersama. Hasil pertemuan bilateral ke-13 antara kedua administrator kepabeanan tersebut yang dilaksanakan di Yogyakarta akan kami bahas dalam rubrik Direktorat & Pusat. Demikian juga dengan operasi bersama kedua negara yang dimulai sejak tahun 1994, kini resmi dibuka di Belawan pada Agustus 2015. Operasi bersama yang dikenal dengan nama Patkor Kastima tersebut, bertujuan untuk meningkatkan pengawasan di selat malaka. Rangkaian pembukaan Patkor Kastima ke-21 kami ulas dalam rubrik Seputar Bea Cukai.

Profil Kantor dalam edisi kali ini memuat tentang kontribusi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Tegal terhadap kemajuan ekonomi kota Tegal dan sekitarnya. Informasi penting untuk para pecinta hewan, kami hadirkan ketentuan tentang importasi hewan peliharaan dalam rubrik Bea Cukai Menjawab. Begitu juga dengan kisah Deni dalam mengimpor barang kiriman akan dijelaskan secara detail mengenai prosedur barang kiriman dari luar negeri dalam rubrik Feature. Informasi tentang gigi estetik dari sisi kedokteran akan diulas dalam rubrik Ruang Kesehatan, serta perjalanan tim penyelam Bea Cukai di pulau Derawan dalam rubrik Travel Notes. Masih banyak lagi informasi menarik lainnya yang kami kemas dalam berbagai rubrik.

Sumbangan ide, saran, dan kritik yang membangun untuk kemajuan Majalah WBC ini kami tunggu. Kontribusi langsung Anda dengan mengirimkan tulisan dan foto juga kami apresiasi.

Selamat membaca!
Pemimpin Redaksi
Haryo Limanseto



Majalah Warta Bea dan Cukai diterbitkan oleh Subdirektorat Humas dan Penyuluhan, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Redaksi menerima kiriman foto, artikel dan surat untuk keperluan konten majalah ini. Setiap pengiriman dialamatkan melalui surat elektronik ke majalah.wbc@customs.go.id dan majalah_wbc@yahoo.com dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Agar menuliskan nama kolom dalam subyek surat elektronik.

ALAMAT REDAKSI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jend. Ahmad Yani (By Pass) Jakarta Timur
Telp: (021) 478 60504, (021) 478 65608, (021) 489 0308 ext. 820-821-822
e-Mail : majalah_wbc@yahoo.com dan majalah.wbc@customs.go.id.

Follow: [@Warta_BeaCukai](#) [WartaBeaCukai](#)

PELINDUNG

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
Heru Pambudi, S.E., LLM

PENASEHAT

SEKRETARIS DITJEN BEA DAN CUKAI
Drs. Kushari Suprianto, M.M., M.E

DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN

-

DIREKTUR CUKAI

Ir. Muhamad Purwantoro, MA

DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN

Kukuh Sumardono Basuki S.E., M.Sc

DIREKTUR AUDIT

Muhammad Sigit, Ak, MBA

DIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

Ir. Harry Mulya, M.Si

DIREKTUR INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

Ir. B. Wijayanta Bakti Mukarta, M.A

DIREKTUR KEPABEANAN INTERNASIONAL

DR. Robert Leonard Marbun, S.IP., MPA

KEPALA PUSAT KEPATUHAN INTERNAL KEPABEANAN DAN CUKAI

Ir. Oentarto Wibowo, M.P.A

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI

Ir. Agus Hermawan, MA

TENAGA PENGKAJI BIDANG PELAYANAN DAN PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Erwin Situmorang, S.Sos., M.M.

TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGAWASAN DAN PENEKAKAN HUKUM KEPABEANAN DAN CUKAI

Sugeng Aprianto, S.Sos., M.Si.

TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS KINERJA ORGANISASI KEPABEANAN DAN CUKAI

M. Agus Rofudin, S. Kom., M.M.

PENGARAH

DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI

-

PEMIMPIN REDAKSI

KASUBDIT HUMAS DAN PENYULUHAN
Haryo Limanseto, S.Sos., M.Si.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Arief Rahman Hakim, Rinto Setiawan, Ricky M. Hanafie

REDAKTUR

Isro'ah Laeli Rahmawati, Intania Riza Febrianti, Wahyuddin, Yella Meisha Indika, Muparrh

FOTOGRAFER

Abdur Razaq Aghni, Fardhani Hamiputri, Wahyu Valti Raja Monang

REPORTER

Piter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari Prawitasari, Supomo, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat, Syahrani, Supriyadi Widjaya.

SEKRETARIAT

Indah Widaryati, Rudi Andrian

daftar isi

Laporan Utama

- 5 Kaitan Peran Bea Cukai dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Galeri Foto



- 12 PATKOR KASTIMA

Profil Kantor

- 14 KPPBC Tipe Pratama Tegal Komunikasi sebagai Kunci Kelancaran Koordinasi

Opini

- 17 MENCERMATI TRANSFORMASI KEPABEANAN DI AUSTRALIA

Direktorat/ Pusat

- 20 Pertemuan Bilateral Ke-13 DJBC-Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) “Aspek Pengawasan Terkait Perkembangan Teknologi Harus Mulai Dipikirkan”

- 23 Rapat Koordinasi Kepabeanan Internasional

- 24 DJBC Kedatangan TIM Penilai Lomba Implementasi Pengarusutamaan Gender Tingkat Kementerian Keuangan

- 25 Dirjen Bea dan Cukai Melantik Pejabat Eselon III

- 27 Halalbihalal Keluarga Bea Cukai

Sisi Pegawai

- 30 Dheni Wiguna, SE, SST, Ak., MM, MEcDev, MPP, CA “Tiada Hari Tanpa Belajar”

Seputar Bea Cukai

- 32 Pembentukan KPPBC TMP Cikarang Upaya Mendukung Industri dan Meningkatkan Pelayanan

- 33 HUT KPU Bea Cukai Tanjung Priok

- 35 Tingkatkan layanan KPPBC TMP A Jakarta Selenggarakan *Coffee Morning and Sharing Session*

- 36 DJBC Buka Pelatihan Dog Handler dan Anjing Pelacak

- 38 Mulai 14 Agustus 2015, CCP Diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok

- 40 PENGAWASAN DJBC

- 44 Patkor Kastima Ke-21 Mulai Digelar Marsada Roha Ma Hita Manjaga Indonesia-Malaysia

- 46 **Travel Notes**

- 48 **Berbagi Pengetahuan**

- 50 **Bea Cukai Menjawab**

- 51 **Hobi dan Komunitas**

- 54 **Event**

- 56 **Ruang Kesehatan**

- 57 **Feature**

- 62 **Sejarah**



Bea Keluar dan Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya

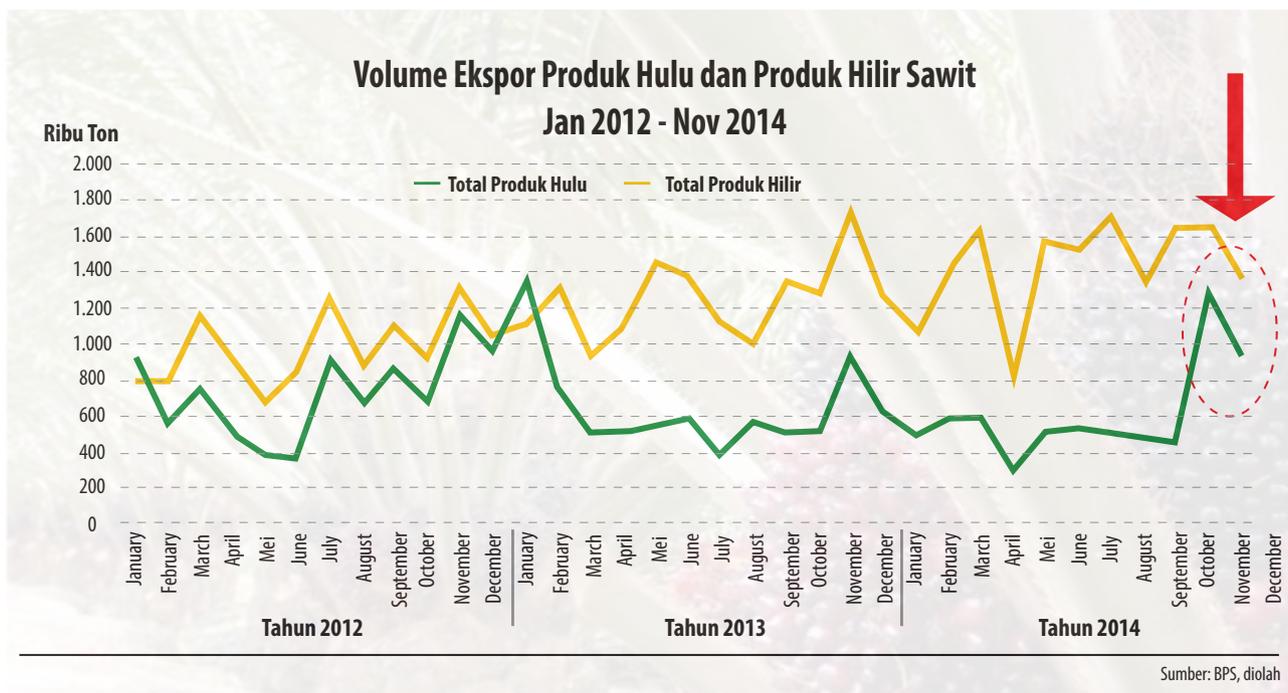
Pada akhir tahun 2014, terjadi penurunan harga minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil/ CPO*) yang disebabkan antara lain karena menurunnya harga internasional minyak fosil, melimpahnya stok minyak nabati lainnya (*soybean, rapeseed, dan biji bunga matahari*) di negara Eropa dan Amerika, dan diikuti dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara pengimpor utama CPO yaitu China dan India. Adanya penurunan harga CPO berpengaruh terhadap harga referensi hingga di bawah threshold (US\$ 750/ton), maka sejak 1 Oktober 2014 pemerintah memberlakukan tarif Bea Keluar (BK) 0% (nol persen) sesuai Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.011/2013. Sejak diberlakukannya tarif BK 0% pada komoditas kelapa sawit, CPO dan produk turunannya, terdapat kecenderungan meningkatnya volume ekspor produk hulu dan hampir mendekati ekspor produk hilir. Bila hal ini terus berlangsung, diperlukan antisipasi kebijakan dari pemerintah, karena mengingat salah satu tujuan pengenaan BK untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan mendorong hilirisasi industri sawit di dalam negeri.

Kajian World Bank menyebutkan bahwa sampai tahun 2025 harga CPO akan cenderung stabil dan diperkirakan harga komoditas tidak akan tinggi lagi sebagaimana tahun

2011. Jika tren ini terus berlangsung perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan BK kelapa sawit, CPO dan produk turunannya. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai formula yang tepat dalam menentukan kebijakan BK agar program hilirisasi tetap terjaga dan menjamin ketersediaan bahan baku industri hilir di dalam negeri.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan pembahasan lebih komprehensif dengan melibatkan para pelaku usaha kelapa sawit untuk mengetahui permasalahan atau hambatan yang ada serta kondisi yang sebenarnya terjadi sehingga dapat dihasilkan kebijakan BK yang efektif.



Dana Penghimpunan Perkebunan sebagai Salah Satu Alternatif

Instrumen penerapan dana penghimpunan perkebunan sebenarnya telah ada sejak tahun 2007. Dasar penghimpunan dana perkebunan adalah Undang-Undang (UU) No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi, pasal 20 dan 21 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk mendorong perkembangan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai salah satu jenis energi baru dan energi terbarukan.

Kemudian UU No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dalam pasal 93 dijelaskan bahwa pembiayaan usaha perkebunan yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan bersumber dari penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.

Pemerintah mengambil kebijakan dalam pemanfaatan BBN *biodiesel* untuk mengantisipasi besarnya impor minyak fosil dan meningkatkan daya saing ekspor *biodiesel*. Pemerintah bermaksud meningkatkan *mandatory* penggunaan bahan bakar nabati minyak sawit dari B10 ke B15 (2015) dan B20 (2016). Sementara konsumsi *biodiesel* meningkat 0,24 juta KL dari

0,93 juta KL tahun 2013 menjadi 1,17 juta KL tahun 2014. Padahal Harga Indeks Pasar (HIP) *biodiesel* lebih mahal bila dibandingkan dengan HIP minyak solar. Sedangkan APBN-P 2015 tidak mengalokasikan subsidi *biodiesel* namun hanya ada subsidi tetap BBM minyak solar Rp1.000/liter.

Di sisi lain dengan harga CPO di bawah *threshold*, pemerintah kehilangan penerimaan dari sektor BK, dimana target penerimaan BK CPO pada APBN-P 2015 berkisar Rp 11 Triliun terancam tidak terpenuhi. Oleh karena itu pemerintah segera mengambil kebijakan dengan menerapkan mekanisme penghimpunan dana perkebunan yang dikaitkan dengan pengenaan BK terhadap Kelapa Sawit, CPO dan Produk turunannya.

Dana penghimpunan perkebunan sawit juga dapat membantu memberikan insentif agar terjadi proses peremajaan (*re-planting*) dari perkebunan rakyat, mendorong pengembangan sumber daya manusia dalam perkebunan kelapa sawit, mendorong penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, mendorong promosi perkebunan kelapa sawit, serta membangun sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.

Pemerintah menetapkan PP No.

24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang mengatur penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit dari pelaku usaha yang berlaku sejak tanggal 25 Mei 2015.

Tujuan dari dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah menyediakan dana bagi pengembangan usaha perkebunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas SDM perkebunan, mendorong pengembangan industri hilir perkebunan, meningkatkan optimasi penggunaan hasil perkebunan untuk bahan baku industri, energi, energi terbarukan, dan ekspor, meningkatkan dan menjaga stabilitas pendapatan usaha perkebunan dengan mengoptimalkan harga di tengah fluktuasi harga komoditas perkebunan dunia, dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan pekebunan-perkebunan rakyat dari dampak negatif gejala harga komoditas dunia.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Bea Keluar

Untuk pengembangan perkebunan, pemerintah merasa

perlu membentuk Badan Layanan Umum baru yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Peluncuran Program Pengembangan Kelapa Sawit yang berkelanjutan merupakan tindak lanjut Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Mei 2015. Perpres ini menjadi tonggak penting percepatan penggunaan BBN jenis *biodiesel*, sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Dengan berdirinya BPDPKS, pemanfaatan BBN jenis *biodiesel* dari kelapa sawit bisa makin didorong. Dana ini akan digunakan untuk menjamin pengembangan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, dan mendorong masyarakat untuk lebih banyak memanfaatkan bahan bakar nabati jenis *biodiesel*. Bahan bakar nabati ini dapat dihasilkan di dalam negeri untuk menggantikan impor minyak dari fosil.

Dana ini pada umumnya berasal dari pungutan ekspor produk kelapa sawit dengan tarif yang ditetapkan pemerintah dalam denominasi dolar AS namun disetorkan dalam bentuk rupiah kepada bank pengelola. Apakah itu berarti eksportir mengeluarkan *double cost*, dana pungutan dan BK?

Pemerintah pada dasarnya tidak ingin memperberat beban dunia usaha dalam hal ini pengusaha/eksportir produk kelapa sawit. Perlu ditekankan bahwa pemungutan dana perkebunan **TERPISAH** dengan pemungutan BK. Perhitungan besarnya pungutan dana kelapa sawit, CPO dan produk turunannya berkisar antara US\$ 10/ton s.d. US\$ 50/ton sesuai dengan PMK Nomor 133/PMK.05/2015 dengan rincian sebagai berikut (lihat tabel)

Untuk ketentuan pungutan BK telah dilakukan perubahan yaitu dengan ditetapkannya PMK Nomor 136/PMK.010/2015 tentang Perubahan

TARIF PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN ATAS EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN/ATAU PRODUK TURUNANNYA

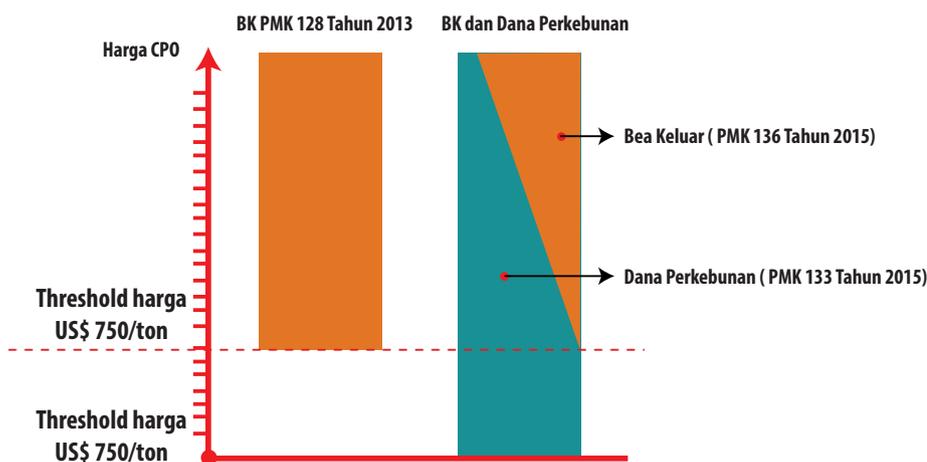
No	Urutan Produk	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif (US\$)
1.	Tandan Buah Segar	ex 1207.99.90.00	Per Ton	0
2.	Buah Sawit, Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit	1207.10.10.00 1207.10.20.00	Per Ton	20
3.	Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit	2306.60.00.00	Per Ton	20
4.	Tandan Kosong Sawit	ex 1404.90.90.00	Per Ton	10
5.	Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh	ex 1404.90.90.00	Per Ton	10
6.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00	Per Ton	50
7.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.10.00	Per Ton	50
8.	Crude Palm Olein	1511.90.19.00	Per Ton	50
9.	Crude Palm Stearin	1511.90.11.00	Per Ton	50
10.	Crude Palm Kernel Olein	1513.29.13.00	Per Ton	50
11.	Crude Palm Kernel Stearin	1513.29.11.00	Per Ton	50
12.	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	ex 3823.19.90.00	Per Ton	40
13.	Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)	ex 3823.19.90.00	Per Ton	40
14.	Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 2\%$	ex 3823.19.90.00	Per Ton	30
15.	Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 70\%$	ex 3823.19.90.00	Per Ton	30
16.	Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 70\%$	ex 3823.19.90.00	Per Ton	30
17.	Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein	ex 1511.90.92.00 ex 1511.90.99.00	Per Ton	30
18.	RBD Palm Oil	ex 1511.90.92.00 ex 1511.90.99.00	Per Ton	20
19.	RBD Palm Stearin	ex 1511.90.91.10 ex 1511.90.91.90	Per Ton	20
20.	RBD Palm Kernel Oil	1513.29.95.00	Per Ton	20
21.	RBD Palm Kernel Olein	1513.29.94.00	Per Ton	20
22.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.91.00	Per Ton	20
23.	RBD Palm Olein dalam kemasan bermerk dari dikemas dengan berat <i>netto</i> ≤ 25 Kg	ex 1511.90.92.00 ex 1511.90.99.00	Per Ton	20
24.	Biodiesel dari Minyak Sawit dengan Kandungan Metil Ester lebih dari 96,5% - volume	ex 3826.00.90.10	Per Ton	20

Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Baranag Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Perubahan mendasar dari PMK tersebut adalah perubahan tarif Bea Keluar, di mana sebelumnya tarif *advalorem* menjadi tarif spesifik.

Adapun mekanisme pengenaan pungutan dana perkebunan dan BK adalah sesuai ketentuan sebagai berikut:

- Jika harga referensi CPO TIDAK LEBIH DARI US\$ 750/ton, maka HANYA dipungut dana perkebunan.
- Jika harga referensi CPO LEBIH DARI US\$ 750/ton, maka dipungut dana perkebunan dan BK. Adapun gambaran Nilai BK dan Dana Perkebunan adalah seperti pada gambar berikut:

Iustrasi Penyesuaian Beban Dana Sawit dan BK



Keterangan:

1. Pungutan Sawit nilainya *flat* sehingga jika nantinya harga referensi CPO semakin tinggi, maka proporsi Pungutan Sawit akan semakin kecil dan proporsi BK semakin besar .
2. Dengan penyesuaian tersebut beban BK yang ditanggung eksportir lebih rendah dari eksisting, namun secara total tidak jauh berbeda.

Sementara menurut Kasi Pemantauan Penerimaan Direktorat Penerimaan dan Peraturan kepabeanaan dan Cukai (PPKC) **Estty Purwadiani Hidayatie**, dengan adanya PMK Nomor 133/PMK.05/2015 dan PMK Nomor 136/PMK.010/2015 yang mengatur pungutan dana perkebunan dan tarif BK dengan tarif spesifik atas komoditas barang ekspor berupa kelapa sawit, CPO dan produk turunannya tersebut, maka

nilai penerimaan BK dari produk kelapa sawit akan berkurang sangat signifikan.

Salah satu upaya mendorong penerimaan negara dari sektor BK dari komoditas kelapa sawit, CPO dan produk turunannya adalah dengan menurunkan *threshold* harga referensi CPO. Langkah tersebut dapat diambil jika pemerintah tetap menginginkan penerimaan BK dari komoditas CPO tetap tinggi. Namun demikian hal tersebut tidak serta merta dapat dilakukan karena tentu semakin membebani eksportir produk kelapa sawit mengingat bahwa harga referensi saat ini masih sangat rendah (cukup jauh) di bawah *threshold*.

Peranan Bea Cukai atas Penerapan Dana Penghimpunan Perkebunan

Sebagai institusi yang bertugas mengawasi arus barang keluar

masuk antar negara dan pengumpul penerimaan negara, peran Bea Cukai dalam kegiatan ekspor produk kelapa sawit, CPO dan produk turunannya sangat erat sekali. Nilai ekspor dari kelapa sawit, CPO dan produk turunannya ini termasuk besar sehingga perlu lebih dicermati.

Nilai ekspor komoditi kelapa sawit, CPO dan produk turunannya yang terkena BK dalam 3 tahun terakhir, berdasarkan data dari Direktorat PPKC adalah sebagai berikut:

Hingga saat ini peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bea Cukai dalam mengawasi kegiatan ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya adalah sbb:

- a. PP Nomor 24 Tahun 2015 (PP 24) tentang Penghimpunan Dana Perkebunan yang ditujukan untuk mendorong pengembangan Perkebunan yang berkelanjutan. Penggunaannya untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia Perkebunan, penelitian dan pengembangan Perkebunan, promosi Perkebunan, peremajaan Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan. Dan komoditi yang akan dikenakan antara lain adalah Kelapa Sawit, Kelapa, Karet, Kopi, Kakao, Tebu dan Tembakau.
- b. Perpres Nomor 61 Tahun 2015 (Perpres 61) tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Kelapa Sawit yang ditujukan untuk mendorong pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang berkelanjutan.

Tahun	Jenis barang	Nilai			Kontribusi terhadap BK
		Netto (Kg)	Devisa (USD)	Bea Keluar (Rp)	
2013	Kelapa sawit, CPO dan produk turunannya	26.352.022.088	22.188.027.386	10.025.532.905.714	64.43%
2014	Kelapa sawit, CPO dan produk turunannya	18.534.446.103	12.708.590.117	9.445.650.307.415	83.40%
s.d Juli 2015	Kelapa sawit dan produk turunan CPO	2.238.499.167	221.450.545	569.038.486.334	24.10%

Penggunaannya untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit, penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit, promosi Perkebunan Kelapa Sawit, peremajaan Perkebunan kelapa Sawit; dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

- c. PMK Nomor 133/PMK.05/2015 (PMK-133) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Pada Kementerian Keuangan, yang mengatur besaran tarif secara spesifik untuk barang-barang yang dikenakan pungutan dan perkebunan. Terdapat 24 Komoditi kelapa sawit, CPO dan produk turunannya dan 6 komoditi campuran yang terkena dana pungutan.
- d. PMK Nomor 136/PMK.010/2015 (PMK-136) tentang Perubahan Keempat Atas PMK Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Barang



“

Semua ini merupakan kebijakan pemerintah yang seharusnya didukung oleh semua pihak. Jika pun ada kendala-kendala, akan dicarikan solusi yang terbaik agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar.

■ **Suprpto**

Direktur Teknis Kepabeanaan



Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dimana berisi tentang besaran tarif bea keluar secara spesifik. Perubahan tarif dari *advalorem* (menggunakan persentase) menjadi *spesifik* (USD/Ton) dimaksudkan agar selaras dengan pengenaan dana perkebunan yang menggunakan tarif spesifik. Jika nantinya harga referensi CPO diatas USD 750/ Ton perhitungan pengenaan dana pungutan perkebunan dan pengenaan bea keluar akan sama sehingga memudahkan pembayarannya. Terkait jenis barang yang dikenakan bea keluar sama dengan PMK-133 yaitu terdapat 24 Komoditi kelapa sawit, CPO dan produk turunannya dan 6 komoditi campuran.

- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 (Permendag-54) tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya yang mengatur mengenai kewajiban pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya. Dimana di dalamnya terdapat Lampiran I yang berisi 30 komoditi Kelapa

Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya yang wajib verifikasi dan Lampiran II yang berisi spesifikasi teknis yang digunakan untuk menentukan jenis Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya.

Direktur Teknis Kepabeanaan, **Suprpto**, menjelaskan bahwa pemberlakuan pungutan dana perkebunan ini pelaksanaannya bersamaan dengan perubahan PMK pengenaan BK yaitu PMK-136, Permendag-54, dan PMK-133. Adapun aturan pelaksanaannya masih perlu dilengkapi terutama terkait dengan:

1. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Penetapan, Penagihan, Restitusi, Keberatan dan Banding;
2. Tata Cara Pengenaan sanksi, rekonsiliasi data dengan DJBC; dan
3. Pengaturan lebih lanjut lainnya; Semua aturan yang akan diatur oleh BPDPKS tersebut, hingga tulisan ini dibuat Peraturan tersebut belum terbit.

“Terkait Pungutan dana perkebunan kelapa sawit ini sebenarnya merupakan ranah dari BPDPKS dan Surveyor, bukan merupakan ranah kepabeanaan. Bea dan Cukai hanya memeriksa Laporan Surveyor (LS) dimana Surveyor hanya dapat menerbitkan LS apabila telah

menerima dan meneliti kebenaran bukti pembayaran. LS tersebut sebagai dokumen pelengkap pabean ekspor,” ujar Suprpto.ano.

Kebijakan mengenai dana pungutan perkebunan, diatur dalam PP 24 yang diterbitkan tanggal 18 Mei 2015 dan diundangkan tanggal 25 Mei 2015, Perpres 61 yang diterbitkan dan diundangkan sama dengan PP-24. Sebagai pelaksanaan dari PP dan Perpres tersebut, diterbitkan PMK-133, PMK-136 dan Permendag-54 pada tanggal 14 Juli 2015 dan berlaku pada tanggal 16 Juli 2015.

Kebijakan ini juga melibatkan beberapa Kementerian, dimana masing-masing Kementerian mempunyai peran dan tugas yang berbeda yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri masing-masing sebagai dasar pelaksanaan tugasnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai sendiri telah menerbitkan surat kepada seluruh jajarannya, terkait pelaksanaan ketiga aturan baru yang berkaitan dengan ekspor kelapa sawit, CPO dan produk turunannya tersebut. Dirjen memerintahkan kepada para pimpinan unit vertikal bea cukai agar:

1. Melakukan pelayanan ekspor kelapa sawit, CPO dan/atau produk turunannya sesuai PMK-133, PMK-136 dan Permendag-54;
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan ekspor kelapa sawit, CPO dan/atau produk turunannya sesuai PMK-133, PMK-136 dan Permendag-54;
3. Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2014 serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 terkait dengan Tata Laksana Ekspor.

“Semua ini merupakan kebijakan pemerintah yang seharusnya didukung oleh semua pihak. Jika pun ada kendala-kendala, akan dicarikan solusi yang terbaik agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar,” tegas Suprpto.ano.

Menurut Kasubdit Ekspor Dit. Teknis Kepabeanan, **Mira Puspita Dewi**, Pembentukan BDPKPS itu sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan tugas Bea Cukai. Petugas Bea Cukai tetap melaksanakan tugas sesuai peraturan tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang Ekspor. Yang berkaitan langsung dengan tugas Bea dan Cukai adalah pemeriksaan LS yang merupakan dokumen pelengkap pabean, bukan dokumen pembayaran pungutan dana perkebunan yang diperiksa. Untuk penetapan bea keluar dilaksanakan oleh petugas Bea Cukai sesuai dengan peraturan tentang bea keluar dan tidak ada kaitannya dengan prosedur pengenaan dana pungutan.

“Dana tersebut sebelumnya secara keseluruhan masuk sebagai penerimaan BK, namun sekarang terbagi menjadi dua yaitu sebagian dana yang dikeluarkan oleh eksportir masuk sebagai dana pungutan kelapa sawit dan sebagian sisanya masuk sebagai penerimaan BK. Meskipun secara makro pungutan dana perkebunan dengan persentase tertentu akan digunakan bagi pengembangan *biodiesel* dari kelapa sawit yang pada gilirannya akan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil (solar) dan selanjutnya subsidi pemerintah untuk bahan bakar fosil (solar) juga berkurang,” kata Mira.

Alur proses ekspor CPO bisa dilihat pada bagan sebagai berikut:



Akan tetapi bagi negara, adanya kebijakan ini berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sisi BK, dimana jika melihat skema yang digunakan adalah masih menggunakan dasar PMK 128/PMK.011/2013 (PMK-128) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar, yang mengakomodir besarnya dana yang dikeluarkan oleh eksportir adalah tidak boleh melebihi yang seharusnya dikeluarkan untuk membayar BK sesuai PMK-128.

KETERANGAN:

1. Eksportir melakukan pembayaran dana perkebunan;
2. Bank menyerahkan bukti pembayaran kepada eksportir;
3. Bank menyampaikan informasi pembayaran pungutan dana ke BDPKPS;
4. Ekportir menyerahkan bukti bayar kepada:
5. BDPKPS;
6. Surveyor.
7. Surveyor memeriksa bukti pembayaran, kemudian menerbitkan (LS);
8. Eksportir menyampaikan PEB



“

Dana tersebut sebelumnya secara keseluruhan masuk sebagai penerimaan BK, namun sekarang terbagi menjadi dua yaitu sebagian dana yang dikeluarkan oleh eksportir masuk sebagai dana pungutan kelapa sawit dan sebagian sisanya masuk sebagai penerimaan BK.

■ **Mira Puspita Dewi**

Kasubdit Ekspor,
Direktorat Teknis Kepabeanan

dengan lampiran LS ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Peran Bea Cukai adalah melakukan pemeriksaan dokumen LS (pemenuhan persyaratan larangan pembatasan/ lartas) yang dilampirkan pada saat pengajuan PEB karena LS tersebut sebagai dokumen pelengkap pabean. Jika LS sudah dilampirkan maka BC akan melakukan pemeriksaan fisik untuk jumlahnya saja mengingat kelapa sawit, CPO dan produk turunannya merupakan produk yang terkena BK sehingga wajib dilakukan pemeriksaan fisik. Jika hasil pemeriksaan fisik sudah sesuai maka diterbitkan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dan barang ekspor dapat berangkat ke luar negeri. Dokumen PEB atas ekspor barang komoditi kelapa sawit, CPO dan produk turunannya tersebut akan direkonsiliasi dengan BPDPKS, dimana BPDPKS yang akan mengecek kebenaran pembayaran dana pungutan sawit oleh eksportir, antara bukti bayar dengan data PEB yang disampaikan oleh Bea Cukai kepada BPDPKS.

Mira juga menjelaskan terkait kebijakan yang sudah ada, sebagian besar sudah mengakomodir tugas

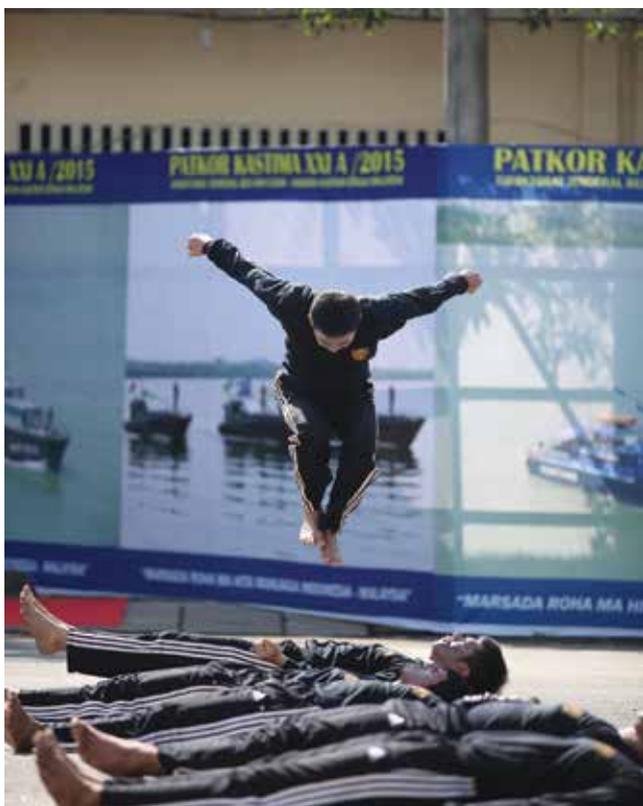
dan fungsi Bea Cukai, bahwa Bea Cukai bertugas memeriksa LS sebagai dokumen pelengkap pabean ekspor. Berkaitan dengan dana perkebunan ini, jika nanti ada perbedaan antara hasil pemeriksaan fisik oleh surveyor dengan hasil pemeriksaan fisik oleh Bea Cukai, yang mengakibatkan selisih pembayaran dana pungutan perkebunan, baik lebih bayar maupun kurang bayar maka hal ini disampaikan kepada BPDPKS dan harus ditindaklanjuti oleh BPDPKS untuk penagihan dan restitusi atas dana pungutan kelapa sawit yang sudah dibayarkan oleh eksportir (peraturan diterbitkan oleh Direktur Utama BPDPKS). Untuk mekanisme pemungutan BK sudah diatur dalam PMK Nomor 214/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 146/PMK.04/2014 tentang Pemungutan Bea Keluar.

Dengan terbentuknya BPDPKS, Mira berharap akan lebih memajukan industri di bidang kelapa sawit. “Tidak hanya mengantarkan Indonesia menjadi eksportir terbesar, akan tetapi juga negara pengendali terkemuka pada bidang kelapa sawit serta mewujudkan kesejahteraan bagi Bangsa Indonesia.”

(Desi Prawita)



Galeri Foto





PATKOR KASTIMA

Sejak 24 Juli 1994 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia menyelenggarakan kegiatan bersama berupa operasi patroli dan koordinasi dalam upaya mencegah dan memberantas penyelundupan di sepanjang Perairan Selat Malaka. Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun tersebut lebih dikenal dengan nama operasi PATKOR KASTIMA.

FOTOGRAFER:
MUCHAMAD ARDANI



KPPBC Tipe Pratama Tegal. Meningkatkan komunikasi agar koordinasi dapat berjalan.



■ KPPBC Tipe Pratama Tegal

Komunikasi sebagai Kunci Kelancaran Koordinasi



Pelabuhan Tegal. Baru sebagai pelabuhan transit belum menjadi pelabuhan tujuan utama.



Butuh Sarana dan Prasarana. Butuh kapal patroli untuk dapat mengawasi perairan laut Jawa di Tegal.

Perdagangan barang dan jasa merupakan sektor utama perekonomian kota Tegal. Kota ini menjadi tempat pengolahan akhir dan pemasaran berbagai produk dari kawasan Jawa Tengah bagian barat. Sebagai kota yang terletak di pantai utara pulau Jawa, Tegal juga memiliki pelabuhan yang cukup ramai, yang saat ini dipenuhi oleh kapal antar pulau (*intersuler*) dan kapal yang sedang diperbaiki (*docking*). Banyak keunggulan dari kota Tegal yang tidak dimiliki oleh kota lainnya, sehingga pantas kota Tegal dijuluki kota “laka-laka” (bahasa Jawa dialek Tegal dan sekitarnya, yang berarti tiada duanya).

Secara historis, pelabuhan Tegal dahulu merupakan pelabuhan utama *intersuler* untuk masuknya barang antar pulau berupa kayu dari luar Jawa untuk disebarluaskan ke beberapa kota di Jawa Tengah pada masa sebelum tahun 1990. Ramainya pelabuhan Tegal juga berdampak pada kemajuan perekonomian kota ini, kota kecil sebagai penghubung antara Jakarta dan Jawa Tengah menjadi kota tujuan perdagangan kala itu.

Kini pelabuhan Tegal masih setia dengan perdagangan antar pulau, bahkan untuk kapal-kapal nelayan yang ada di pelabuhan Tegal saat ini telah mencapai 600 kapal dengan ukuran di bawah 30 GT, hal ini masih memerlukan penataan lebih lanjut, agar pelabuhan Tegal dapat mendukung semua kegiatan perekonomian. Pihak Syahbandar pelabuhan menuturkan bahwa saat ini pelabuhan Tegal sedang dilakukan pengerukan kolam, supaya kapal besar bisa masuk dan sandar di pelabuhan Tegal. Upaya tersebut tentunya dalam rangka meningkatkan perekonomian Tegal dan sekitarnya.

Kalau sebelumnya pelabuhan Tegal hanya sebagai pelabuhan transit (data Syahbandar untuk April hingga Juni kapal niaga yang singgah 52 kapal, dan kapal ikan 138 kapal), diharapkan dengan

pembangunan, pelabuhan Tegal menjadi salah satu tujuan utama bagi kapal niaga maupun kapal ikan. Satu hal yang juga menarik di pelabuhan Tegal adalah murah biaya perbaikan dan pembuatan kapal jika dibandingkan dengan daerah lainnya, sehingga pelabuhan Tegal dipenuhi dengan kapal-kapal yang sedang dilakukan perbaikan.

Untuk lebih mendukung perekonomian di kota Tegal dan sekitarnya, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor dan pengolahan hasil tembakau, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) turut membantu pelayanan kegiatan tersebut melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Tegal. Menurut Kepala KPPBC Tipe Pratama Tegal, **Irianto**, pada awal-awal dibentuknya KPPBC Tegal merupakan kantor yang cukup besar (setingkat eselon III) karena jenis pengawasan dan pelayanannya waktu itu cukup banyak. Namun seiring adanya perubahan pada Undang-Undang Kepabeanan, maka fungsi KPPBC Tegal banyak mengalami pemangkasan, sehingga kini kantor tersebut menjadi tipe pratama.

“Saat ini kegiatan utama di KPPBC Tipe Pratama Tegal meliputi cukai hasil tembakau dan etil alkohol, dimana untuk cukai hasil tembakau melayani sekaligus mengawasi PT. HM Sampoerna dan PT. Gudang Garam Tbk. Sedangkan untuk kegiatan pelayanan impor dilakukan oleh Kantor Pos Lalu Bea, dan kami juga melayani tiga perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat, yaitu PT. Daiwabo Garmen Indonesia, PT. Yeon Heung Mega Sari, dan PT. Kenlee Indonesia,” ujar Irianto.

Masih menurutnya, dengan pelayanan dan pengawasan tersebut, kini jumlah total *stakeholder* yang ada di KPPBC Tegal mencapai 12 pengguna jasa, dengan wilayah pengawasan dan pelayanan yang meliputi empat kabupaten, yaitu Kabupaten/Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Brebes.

Dengan luasnya wilayah pengawasan dan pelayanan yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Pratama



Selalu mengupayakan komunikasi dan koordinasi antara pegawai junior yang enerjik dengan pegawai senior yang banyak pengalaman.

■ Irianto

Kepala KPPBC Tipe Pratama Tegal

Tegal tersebut, Irianto mengakui kalau seluruh SDM yang ada saat ini memiliki kemampuan dan kecakapan dalam menjalankan tugas dengan baik, karena semua pegawai saling menjalin komunikasi yang efektif untuk menyelesaikan tugas maupun dalam bersinergi untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pengguna jasa.

“Dengan 17 orang pegawai, KPPBC Tipe Pratama Tegal terus melakukan pembinaan dan kemampuan para pegawai agar semua jenis kegiatan dapat berjalan dengan maksimal. Salah satunya adalah dengan rutin melakukan komunikasi dan koordinasi antara pegawai junior yang enerjik dengan pegawai senior yang mempunyai banyak pengalaman. Nah, untuk menciptakan sinergi ini kami sering menyetarakan kegiatan Program Pembinaan Ketrampilan Pegawai (P2KP), sholat Duhur dan Asar berjamaah di mushola kantor, mengadakan kegiatan siraman rohani, olahraga bersama, *capacity building* dan lain sebagainya yang semata-mata untuk memupuk rasa kebersamaan, saling asah, asih, asuh dan yang penting lagi adalah terjaga integritas sehingga pelayanan dapat diberikan dengan maksimal dan pengawasan pun berjalan secara optimal,” kata Irianto.

Tidak hanya itu, tambah Irianto, sebagai kota Bahari, Tegal juga memiliki panjang pantai yang harus dijaga dengan baik agar upaya pemasukan barang larangan dan pembatasan dapat dilakukan dengan baik. Untuk itu, kegiatan patroli laut juga sering dilakukan secara bersama-sama dengan Kantor Wilayah DJBC Jateng dan DIY. Bahkan untuk mengamankan potensi sumber daya perikanan laut yang begitu besar, patroli laut pun sering dilakukan bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di perairan laut Jawa.

Namun demikian, tidak semua sarana dan prasarana yang ada di KPPBC Tipe Pratama Tegal dapat digunakan secara optimal, untuk mengamankan laut Jawa sekitar garis pantai Tegal, sulit dilakukan karena kapal patroli BC 0602 dengan panjang 6 meter yang dimiliki KPPBC Tegal beberapa tahun terakhir ini tertambat di depan kantor karena mengalami kerusakan. Selain faktor usia kapal yang sudah tua, untuk menuju laut Jawa yang kini ombaknya tidak setenang dulu, kapal patroli tersebut dirasa sudah tidak memungkinkan lagi, ditambah SDM yang biasa mengoperasikan kapal tersebut kini sudah dipindahtugaskan.

Selain itu, sarana penunjang lainnya yang kini sudah dimiliki oleh KPPBC Tegal adalah mesin X-Ray untuk memindai barang kiriman melalui Kantor Pos Lalu Bea, dengan tambahan alat ini pengawasan barang impor dapat lebih optimal lagi dan tentunya waktu yang dibutuhkan pun lebih cepat.

Salah satu contoh keberhasilan KPPBC Tegal mengenai komunikasi dan koordinasi dengan unit terkait adalah kegagalan upaya penyelundupan rotan ke luar negeri. Rotan yang diberitahukan sebagai komoditas antar pulau tersebut, akhirnya dengan koordinasi yang baik dengan instansi terkait lainnya dan Kanwil Khusus TBK, komoditas tersebut berhasil ditegah oleh kapal patroli bea cukai di TBK. Untuk itulah pengawasan laut penting

untuk dilakukan yang tentunya juga didukung oleh sarana yang memadai.

Disisi lain, dalam rangka menunjang ketrampilan pegawai, KPPBC Tegal juga menjalin kerjasama dengan pihak YONIF 407 Padma Kusuma dalam hal pelatihan menembak dan penggunaan senjata. "Dengan kerjasama ini kami pun dapat menjalin komunikasi lebih intens terhadap jajaran pemerintah di Kota Tegal dan sekitarnya sehingga memudahkan kami jika mengalami hambatan pada saat melakukan operasi pasar terhadap barang kena cukai," tutur Irianto.

Jika pelayanan objek cukai dilakukan terhadap perusahaan besar tentunya target atau penerimaan cukai di KPPBC Tegal ini cukup besar? Menurut Irianto, untuk target tahun 2015 terhadap hasil terbakau sebesar Rp. 160.222.163.443 dan sampai tengah semester ini telah tercapai Rp. 82.945.616.000 atau 51,77 persen. Sedangkan untuk etil alkohol ditargetkan sebesar Rp. 6.320.244.845 dan telah tercapai sebesar Rp. 3.152.282.000 atau 49,88 persen. sementara itu untuk bea masuk ditargetkan sebesar Rp. 70.889.438 dan telah tercapai Rp. 49.100.652 atau 69,26 persen. Sehingga secara total target penerimaan yang dibebankan oleh KPPBC Tipe Pratama Tegal adalah sebesar Rp. 166.613.297.726 dan hingga saat ini telah terealisasi sebesar Rp. 86.146.998.652 atau 51,70 persen.

"Mencermati realisasi penerimaan semester I sebesar 51,70 persen dan setelah meneliti potensi penerimaan hasil tembakau sampai dengan bulan Agustus yang belum jatuh tempo serta hasil komunikasi *stakeholder* atas rencana produksi, pemesanan pita cukai, maka KPPBC Tipe Pratama Tegal optimis penerimaan Negara di tahun 2015 akan tercapai sebesar 103,70 persen," jelas Irianto.

Kendati optimis target penerimaan tahun ini dapat tercapai, bukan berarti KPPBC Tipe Pratama Tegal tidak memiliki kendala dalam menjalankan tugasnya, adanya upaya intimidasi saat melakukan penegahan barang kena cukai di wilayahnya, membuat KPPBC Tegal harus ekstra hati-hati dan bijak



dalam menyikapi semua keinginan dan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Disinilah perlunya jalinan komunikasi antar instansi pemerintah yang ada disetiap wilayah kerja masing-masing, dengan menjalin komunikasi yang intensif ini, KPPBC Tegal kini tidak lagi merasa sulit untuk melakukan penegakan hukum, bahkan masyarakat juga dapat menerima apa yang menjadi tugas dari bea dan cukai.

"Jumlah SDM yang terbatas dan wilayah kerja yang luas adalah kondisi klasik jika harus dikeluhkan, namun kami tidak menjadikan hal itu kendala namun kami jadikan tantangan kerja. Ini terbukti dengan hasil-hasil tegahan kami berupa rokok tanpa pita cukai, minuman mengandung etil alkohol yang tidak memiliki ijin NPPBKC, dan beberapa hasil tegahan lainnya. Untuk itulah kami selalu menekankan komunikasi, koordinasi, dan sinergi kepada instansi lain agar pelaksanaan tugas kami dapat berjalan dengan lancar. Begitu juga kepada masyarakat kami melakukan pendekatan persuasif atas pelanggaran yang terjadi sehingga mereka mau membayar denda administrasi yang dikenakan," ungkap Irianto.

Akan hal ini diamini oleh Niawati selaku karyawan PT. Kenlee Indonesia, sebagai perusahaan yang baru berdiri di wilayah kerja KPPBC Tegal, dirinya sangat dibantu dalam proses dokumen dan hal-hal yang harus dilakukan sebagai perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat. Dengan

menjaln komunikasi yang intensif dan pemahaman pegawai akan peraturan yang cukup baik, membuat perusahaan tersebut dapat berdiri sesuai amahan undang-undang tanpa dibebani oleh hal-hal yang bersifat memberatkan.

Jika Tegal dikenal sebagai kota Bahari, KPPBC Tipe Pratama Tegal pun memiliki motto yang sama yaitu "BAHARI" (Bekerja, Amanah, Handal, Akuntabel, Responsif, dan Integritas) dengan motto ini KPPBC Tegal bertekad untuk terus melakukan inovasi dalam menjalankan tugas pengawasan dan pelayanan, yang tentunya didukung dengan kemampuan yang optimal dari seluruh pegawai. "Untuk itu kami berharap pegawai KPPBC Tipe Pratama Tegal mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, utamanya pendidikan tentang Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP), pengetahuan barang larangan pembatasan, guna menunjang pekerjaan pemeriksaan atas masuknya barang larangan yang masuk melalui wilayah pengawasan kami," tandas Irianto.

Dengan apa yang dimiliki KPPBC Tipe Pratama Tegal saat ini, tentunya diharapkan dapat terus membantu proses pembangunan yang lebih maju di wilayah Tegal, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat Tegal untuk menjadi *Tegal Keminclong Kotane* (Tegal kota yang bersinar) dan *Tegal Laka Laka* dapat terwujud.

(Supriyadi, MPR dan Andi TS)



Mencermati Transformasi Kepabebean di Australia

Oleh : Yudhi Dharma Naully

Kepala Subbagian Tatalaksana I, Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Tahun 2013, CEO *Australian Customs and Border Protection Service* (ACBPS) saat itu, Michael Pezzullo, meluncurkan *Blueprint for Reform 2013-2018*. Pada waktu itu, CEO ACBPS merasakan kebutuhan untuk membuat inisiatif transformasi guna mempersiapkan organisasinya dalam menghadapi beban kerja yang makin melonjak. Di dalam *blueprint* tersebut diperkirakan, antara 2012-13 sampai dengan 2016-17, akan terjadi peningkatan *seacargo*, *air cargo*, dan penumpang internasional masing-masing 14%, 227%, dan 24%.

Untuk memproses beban kerja sebesar itu dengan sumber daya yang ada, ACBPS jelas perlu melakukan transformasi internal. Hal ini dikarenakan, ACBPS tidak dapat meminta tambahan sumber daya kepada pemerintahan koalisi Liberal-Nasional PM Tony Abbot. Pemerintah koalisi ini dalam kampanyenya mengusung perampingan pemerintahan dan pemotongan pajak. Suatu hal yang bertentangan dengan visi pemerintahan PM Tony Abbot bila ACBPS berniat memperbesar organisasinya dalam menghadapi tantangan yang makin berat. Untuk itulah ACBPS meluncurkan inisiatif transformasinya, dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya yang dimiliki.

Transformasi yang baru mulai dijalankan ini ditopang oleh tiga pilar, yaitu SDM dan rancang bangun operasi, modernisasi, dan integritas. Dalam pelaksanaan pilar pertama, SDM dan rancang bangun operasi, akan dilakukan 1) peningkatan keterlibatan dan akuntabilitas

SDM dalam organisasi, 2) integrasi kegiatan-kegiatan terkait kargo, kepatuhan dan investigasi ke dalam satu divisi, 3) peningkatan patroli laut hingga 55% yang terintegrasi dengan kegiatan intelijen satuan tugas antar instansi yang baru dibentuk, 4) pembentukan divisi intelijen baru untuk mendorong pelaksanaan manajemen berbasis intelijen, 5) pembentukan divisi pendukung untuk penerapan *best practice* dan teknologi canggih, 6) peninjauan kembali etika kerja, pengakuan prestasi dan pemberian penghargaan, serta 7) penguatan kerjasama dengan *Australian Federal Police* (AFP) melalui pertukaran pejabat. Berikutnya, dalam pelaksanaan pilar kedua, modernisasi, akan dilakukan 1) pengembangan implementasi *SmatGates* untuk mempercepat pelayanan pemeriksaan paspor penumpang, 2) penguatan landasan hukum bea masuk *anti-dumping* dan imbalan serta pembentukan komisi *anti-dumping*, 3) pembentukan *National Border Targeting Centre* (NBTC) untuk mempertajam *targeting* terhadap penumpang dan kargo melalui koordinasi dan pertukaran informasi antar instansi terkait, 4) peluncuran kapal patroli *Cape Class*, *ACV Cape St George*, dan 5) pembelian kapal patroli *ACV Thaiyak* untuk tugas khusus *surveillance* dan pengamanan *Ashmore Reef National Nature Reserve and Cartier Island*. Sedangkan dalam pelaksanaan pilar ketiga, integritas, akan dilakukan 1) pemeriksaan narkoba dan alkohol terhadap seluruh pegawai, 2) pengujian integritas secara *targeting*, 3) pemberhentian pegawai akibat

tindakan tidak terpuji, 4) penerapan kewajiban pelaporan bila mengetahui adanya tindakan tidak terpuji atau korupsi, 5) pemberian dukungan dan konsultasi terkait kewajiban pelaporan tersebut, 6) pembentukan divisi penjaminan integritas dan keamanan, serta 7) peluncuran program e-learning terkait kepedulian terhadap integritas, manipulasi dan korupsi.

Namun, sebelum *blueprint* tersebut selesai dilaksanakan, Pemerintah Australia, pada tahun 2014, mencanangkan transformasi melalui penggabungan ACBPS dengan *Department of Immigration and Border Protection* (DIBP) menjadi satu badan terintegrasi. Dalam transformasi ini selain diperhitungkan peningkatan beban kerja kepabebean, juga dipertimbangkan peningkatan beban kerja keimigrasian seperti pemberian visa belajar dan pelayanan permohonan kewarganegaraan yang akan meningkat masing-masing 16,5% dan 23% dalam empat tahun ke depan. Pemerintah menyatakan *outcome* yang diharapkan dari penggabungan ini adalah keamanan nasional yang kuat, ekonomi yang kuat, serta masyarakat yang makmur dan bersatu. Namun, tujuan praktis pemerintah dalam transformasi ini sama dengan transformasi yang dicanangkan ACBPS sebelumnya yaitu efisiensi dan efektifitas yang lebih besar dari kedua institusi. Perintahan PM Tony Abbot terus berusaha mencapai efisiensi pemerintahan lebih besar untuk dapat mengkompensasi pemotongan pajak dan pengurangan defisit anggaran pemerintah yang menjadi janji kampanyenya.

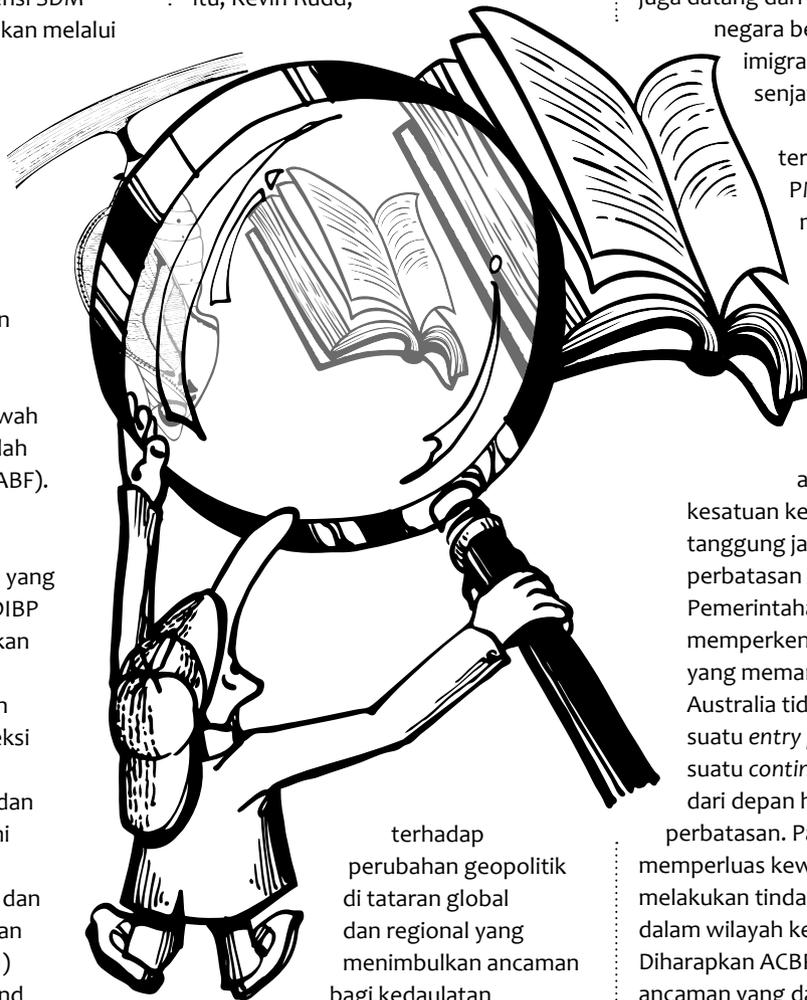
Dalam penggabungan ini, fungsi-fungsi yang sama dari kedua institusi akan dilebur menjadi satu. Penggabungan ini terutama terjadi pada fungsi-fungsi penunjang seperti perumusan kebijakan, kesekretariatan, riset, legal, logistic, teknologi, serta pendidikan dan pelatihan. Fungsi lini yang juga digabungkan meliputi pelayanan penumpang, *targeting* dan *profiling*, serta intelijen. Dari fungsi-fungsi yang digabungkan diharapkan akan ada SDM dan anggaran yang bisa diefisienkan. Efisiensi SDM dan anggaran juga dilakukan melalui pemutakhiran teknologi serta penerapan *best practice*.

Selanjutnya SDM dan anggaran yang bisa diefisienkan akan digunakan untuk memperkuat fungsi lini lainnya dan pembentukan unit baru.

Salah satu unit baru yang akan dibentuk dibawah DIBP pada 1 Juli 2015 adalah *Australian Border Force* (ABF). Unit baru ini merupakan konsolidasi dari fungsi pengamanan perbatasan yang selama ini dilaksanakan DIBP dan ACBPS. ABF diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengawasan laut DIBP untuk mendeteksi dan menanggulangi masuknya imigran ilegal dan melindungi zona ekonomi eksklusif Australia dari penangkapan ikan ilegal dan ancaman lainnya. ABF akan bertanggungjawab atas 1) *Strategic Border Command* yang mengendalikan pengawasan perbatasan di pelabuhan dan bandar udara, termasuk NBTC 2) *Border Protection Command* yang mengendalikan pengawasan perbatasan laut, 3) pelaksanaan fungsi keimigrasian diperbatasan, 4) pelaksanaan patroli daerah terpencil dan 5) petugas berseragam. ABF juga akan menangani investigasi, kepatuhan

pengguna jasa dan penegakan hukum.

Transformasi yang sedang dilaksanakan oleh ACBPS saat ini merupakan kelanjutan dari serangkaian transformasi yang telah dilakukan. Transformasi terakhir dilakukan pada tahun 2008 saat *Australian Customs Service* (ACS) berubah menjadi ACBPS. Transformasi ini merupakan salah satu bagian dari restrukturisasi kebijakan keamanan nasional Australia. Restrukturisasi ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran PM Australia saat itu, Kevin Rudd,



terhadap perubahan geopolitik di tataran global dan regional yang menimbulkan ancaman bagi kedaulatan wilayah, politik, ekonomi,

serta kepentingan domestik dan internasional Australia. Saat itu, Kelompok Islam radikal yang bertanggung jawab atas serangan 11 September 2001 menyampaikan ancaman terbuka terhadap kepentingan Australia, salah satu sekutu utama Amerika Serikat. Selanjutnya, warga Negara Australia

secara langsung menjadi sasaran serangan terorisme di Bali, Baghdad, Jakarta dan Mumbai. Ancaman terorisme ini menjadi pemicu utama restrukturisasi kebijakan keamanan nasional Australia. Ancaman terhadap Australia saat itu juga muncul dari maraknya pengungsi yang berusaha mencari suaka di Australia. Orang-orang yang dikenal luas sebagai manusia perahu ini melarikan diri dari negaranya yang sedang dilanda konflik. Selain itu, ancaman terhadap Australia juga datang dari kejahatan antar negara berupa penyelundupan imigran ilegal, narkoba dan senjata.

Dengan latar belakang tersebut, Pemerintahan PM Kevin Rudd membentuk ACBPS untuk menyatukan kewenangan yang tersebar di banyak institusi pemerintah. *Outcome* dari transformasi ini adalah terciptanya kesatuan kebijakan, kendali dan tanggung jawab pengamanan perbatasan Australia. Saat itu Pemerintahan PM Kevin Rudd memperkenalkan paradigma baru yang memandang perbatasan Australia tidak hanya sebagai suatu *entry point* melainkan suatu *continuum* yang terbentang dari depan hingga ke belakang perbatasan. Paradigma ini memperluas kewenangan ACBPS untuk melakukan tindakan di luar dan di dalam wilayah kedaulatan Australia. Diharapkan ACBPS bisa menanggulangi ancaman yang datang sebelum ancaman tersebut mencapai wilayah kedaulatan Australia, bahkan sebelum meninggalkan negara asalnya.

Transformasi pertama di kepabeaan Australia dilakukan pertama kali pada tanggal 11 Januari 1956. Saat itu, *Department of Trade and Customs* yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1901 berubah menjadi *Department of Customs and*

Excise. Dalam transformasi ini fungsi kepabeanan dilepaskan dari fungsi perdagangan dan kemudian diperkuat dengan fungsi cukai. Selanjutnya, fungsi kepabeanan digabungkan dengan fungsi kepolisian dengan dibentuknya *Department of Police and Customs* pada awal tahun 1975. Setelah itu, pada akhir tahun 1975 pula, fungsi kepabeanan dipisahkan dari fungsi kepolisian dan disatukan dengan fungsi perdagangan di dalam *Department of Business and Consumer Affairs*. Selanjutnya *Department of Business and Consumer Affairs* mengalami dua kali transformasi dengan penambahan fungsi industri dan teknologi pada tahun 1982 dan 1984. Pada tahun 1985, fungsi kepabeanan kembali berdiri sendiri dengan dibentuk ACS.

Dari transformasi yang pernah dilaksanakan kepabeanan Australia terlihat bahwa fungsi penerimaan tidak pernah menjadi fungsi yang penting. Hal ini dibuktikan dari fakta bahwa kepabeanan Australia tidak pernah menjadi bagian dari *Ministry of Finance* atau berada di bawah *Treasurer*, walaupun bea masuk dan cukai yang dipungut kepabeanan Australia menjadi bagian penerimaan *Treasurer*. Fakta lain yang mendukung adalah karakteristik tarif bea masuknya yang merupakan tarif protektif bukan tarif penerimaan. Di Australia, tarif bea masuk yang sangat tinggi, biasanya lebih dari 100%, dikenakan terhadap sejumlah kecil barang saja, yaitu barang yang menjadi kompetitor barang produksi dalam negeri. Sejumlah besar barang lainnya yang tidak berkompetisi dengan barang produksi dalam negeri dikenakan tarif yang sangat rendah atau bahkan 0%. Bila suatu barang tidak lagi menjadi kompetitor, tarif bea masuknya diturunkan menjadi sama dengan barang lainnya. Hal ini berbeda dengan tarif penerimaan dimana tarif yang tidak tinggi, umumnya antara 20%-40% dikenakan terhadap mayoritas barang impor, sedangkan sebagian kecil barang yang sensitif terhadap hajat hidup orang banyak dikenakan tarif yang sangat rendah.

Walaupun penerimaan Kepabeanan

Australia tidak pernah menjadi fungsi utama, namun hingga saat ini kepabeanan Australia terus memberikan kontribusi kepada keuangan pemerintah federal. Pada periode 2013-14 ACBPS menyumbangkan kontribusi \$14,580.6m. Kontribusi ini terdiri dari penerimaan terkait penumpang sebesar \$846.6m (dari target \$862.2m) dan penerimaan bea masuk, *Passenger Movement Charge (PMC)*, *Import Processing Charge (IPC)*, GST dan penerimaan lainnya sebesar \$13,734m (dari target \$13,166m). Pada periode tersebut total penerimaan pemerintah federal adalah sebesar \$360,322m yang terdiri dari \$338,368m penerimaan perpajakan dan \$21,954m penerimaan bukan pajak. Pada periode ini proporsi kontribusi ACBPS hanya sebesar 4,04% dari total penerimaan pemerintah federal atau 4,31% dari penerimaan perpajakan. Kontribusi penerimaan ACBPS tentunya tidak bisa dibandingkan dengan kontribusi penerimaan *Australian Taxation Office (ATO)*.

ACBPS tidak menawarkan kinerja penerimaan kepada pemerintah dan rakyat Australia. Yang ditawarkan ACBPS adalah pengamanan perbatasan yang mampu menangkal ancaman terorisme, masuknya imigran ilegal, narkoba dan senjata api, serta ancaman lainnya. ACBPS menempatkan diri sebagai ujung tombak kebijakan keamanan nasional Australia yang melindungi kedaulatan wilayah, politik dan ekonomi Australia. Selain itu, pengamanan perbatasan yang ditawarkan juga mampu memberikan kecepatan dan kenyamanan bagi penumpang internasional serta memberikan kelancaran arus barang ekspor dan impor yang menjamin daya saing dan produktifitas ekonomi Australia. ACBPS secara aktif terus melaksanakan program fasilitasi perdagangan WTO dan WCO. Saat ini, ACBPS mulai mengembangkan *Trusted Trader Program (TTP)*, semacam skema AEO di Indonesia.

ACBPS tidak memandang kedua fungsi tersebut sebagai fungsi-

fungsi yang bertentangan dan tidak menempatkan pegawainya dalam sebuah dilema. Kedua fungsi tersebut secara fundamental dianggap saling terkait dan tak dapat dipisahkan. Peran ACBPS untuk melaksanakan kedua fungsi tersebut secara sekaligus dimungkinkan berkat kemampuannya untuk mendeteksi dan mengidentifikasi setiap ancaman secara efektif. Dengan kemampuan tersebut ACBPS hanya melakukan intervensi terhadap penumpang atau kargo yang berpotensi memberikan ancaman. Kemampuan ini diciptakan ACBPS dengan memanfaatkan faktor-faktor penunjang berupa pegawai yang berkemampuan tinggi dan berintegritas, optimalisasi pemanfaatan teknologi canggih, implementasi *best practice*, dukungan masyarakat dan kalangan industry, serta kerjasama yang solid antar instansi penegak hukum. Kemampuan mendeteksi ancaman ini mulai ditumbuhkan oleh ACS, terus dikembangkan oleh ACBPS dan akan dibawa ke dalam DIBP nantinya.

Keberhasilan transformasi kepabeanan Australia terletak pada kemampuannya untuk berubah menjadi lebih baik. Dalam setiap transformasi yang telah dilaksanakan, organisasi yang dibentuk tidak hanya menghasilkan *outcome* yang lebih besar tetapi juga dihasilkan dengan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. Transformasi tersebut ternyata dapat lebih meningkatkan peran, kemampuan dan akuntabilitas setiap pegawai, mengurangi duplikasi dan kelemahan struktural, mengimplementasikan *best practice*, serta memanfaatkan teknologi yang lebih canggih. Tak mengherankan, setelah beberapa kali mengalami transformasi, ACBPS menjadi salah satu institusi kepabeanan yang paling efektif. (*)

Catatan: Artikel ini sepenuhnya merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan merupakan pendapat atau pandangan resmi Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



between
Directorate General of Customs and Excise (DGCE)
 and
Royal Malaysian Customs Department (RMCD)

Yogyakarta | 4-5 August 2015



Pertemuan Bilateral Ke-13 DJBC-Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM)

“Aspek Pengawasan Terkait Perkembangan Teknologi Harus Mulai Dipikirkan”

Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM), telah melaksanakan pertemuan bilateral yang Ke-13 pada tanggal 4-5 Agustus 2015 untuk membahas kerjasama kepabeanan kedua Administrasi Pabean. Berlangsung di Meeting Room, Hotel Tentrem, Yogyakarta, Jawa Tengah, sebagaimana pertemuan bilateral sebelumnya, pertemuan ke-13 ini membahas kerjasama di bidang kepabeanan dan pengawasan, yang difokuskan untuk pembahasan beberapa isu penting seperti penyelundupan, pertukaran informasi dan kerjasama dibidang operasi bersama.

Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi tepat pukul 08.00 WIB yang juga bertindak sebagai Ketua Delegasi Indonesia, yang didampingi oleh

11 pejabat terkait sebagai anggota delegasi. Sedangkan dari JKDM, sebagai ketua delegasi adalah Direktur Jenderal, Dato' Sri Khazali Bin Hj Ahmad yang didampingi oleh 7 orang anggota delegasinya.

Sebelum pembahasan dimulai kedua pimpinan delegasi saling melaporkan perkembangan tindak lanjut pertemuan sebelumnya yang berlangsung di Malaka pada bulan Oktober 2014, termasuk perkembangan negosiasi MoU mengenai kepabeanan antara kedua Administrasi Pabean. Pada intinya kedua belah pihak sepakat untuk mempercepat proses negosiasi MoU tersebut.

Hasil Pertemuan Bilateral Ke-13

Dalam kerjasama di bidang kepabeanan, kedua Administrasi Pabean sepakat untuk bekerjasama terkait dengan kebijakan kepabeanan di perbatasan dan hal-hal yang

berhubungan dengan barang transit (*goods in transit*), yang pembahasannya meliputi :

1. DJBC menyampaikan ketentuan di perbatasan mengenai barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut dan pelintas batas, prosedur impor umum dan barang transit.
2. DJBC mengajukan rencana perusahaan Indonesia untuk mengespor CPO ke negara ketiga melalui Sarawak, Malaysia (pelabuhan Tanjung Manis) dengan menggunakan skema barang transit (*goods in transit*), termasuk mendapatkan informasi dari JKDM mengenai mekanisme kebijakan barang transit di Malaysia, ketentuan dan dokumen yang harus dipenuhi serta bea atau pajak yang harus dibayar.
3. JKDM merespon permintaan DJBC tersebut dan akan

mengkonsultasikannya kepada Kementerian Perhubungan (Transportasi) Malaysia.

4. Kedua Administrasi Pabean sepakat untuk menginisiasi diskusi mengenai kemungkinan dilaksanakannya *single inspection* untuk menyederhanakan prosedur kepabeanan di perbatasan kedua negara.

Sementara dalam kerjasama di bidang pengawasan, kedua Administrasi Pabean membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. DJBC menyampaikan tren penyelundupan terutama di perbatasan kedua negara, dengan penekanan pada penyelundupan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP), CITES, pelintas batas pembawa uang tunai (*Cross Border Cash Carrier*), terorisme dan pelanggaran kepabeanan lainnya, yang menitikberatkan pada penyelundupan barang larangan dan pembatasan (lartas) dari Malaysia yang jumlah cukup signifikan.
 - DJBC menyampaikan beberapa usulan dalam memerangi pelanggaran kepabeanan melalui pelaksanaan pertukaran informasi, kerjasama dalam hal penyelidikan (investigasi), capacity building dan pengiriman tenaga ahli.
 - JKDM mencatat informasi yang disampaikan DJBC yang terkait dengan beberapa kasus yang melibatkan kedua negara. Kedepannya JKDM mendukung penuh usulan yang disampaikan DJBC dalam memerangi pelanggaran kepabeanan untuk dibahas lebih lanjut.
 - Kedua Administrasi Pabean sepakat meningkatkan pertukaran informasi terutama yang berkaitan dengan informasi mengenai data pengangkutan (*shipment*) yang sangat berguna bagi kedua negara untuk memerangi perdagangan ilegal.



- b. Tinjauan mengenai *Term of Reference* (TOR) tentang *Joint Investigation and Operation* dalam hal penanganan penyelundupan dan *Local Border Committee* (LBC) dan pelaksanaan formal LBC

- Dengan mempertimbangkan posisi geografis pulau Batam, DJBC mengajukan rencana strategis dalam memerangi berbagai pelanggaran kepabeanan, seperti melalui pertukaran data peringatan dini (*early warning information exchange*), penyelidikan yang terintegrasi, dan operasi bersama.
- JKDM merespon bahwa untuk manfaat timbal balik bagi kedua Administrasi Pabean, kedua belah pihak harus mendorong dilaksanakannya *risk assessment*.
- DJBC mengingatkan kembali kesepakatan kedua belah pihak untuk mendukung implementasi formal LBC, yang sebelumnya telah dilaksanakan secara informal antara kantor-kantor pabean yang terletak di perbatasan kedua negara
- JKDM menanggapi dan mendukung penuh berbagai kegiatan LBC
- Kedua Administrasi Pabean sepakat bahwa isu LBC harus didiskusikan lagi oleh kedua belah pihak yang melibatkan

pejabat (*contact person*) dari masing-masing Administrasi Pabean yang berkedudukan di Kantor Pusat maupun kantor wilayah (kantor vertikal) yang ditunjuk.

- c. Permintaan bantuan terkait kasus Subaru dan barang bermerek bawaan penumpang (*hand carry branded items*)
 - DJBC menyampaikan permintaan informasi terkait kasus Subaru (harga FOB atau harga pabrikan mobil Subaru XV yang diimpor dari Malaysia), yang ditanggapi secara positif oleh JKDM dan akan berupaya untuk menindaklanjuti permintaan bantuan tersebut
 - DJBC meminta bantuan informasi terkait data tahunan atas *refund tax* barang-barang bermerek yang dibawa oleh penumpang warga negara Indonesia melalui penerbangan langsung antara Malaysia-Indonesia, dan ditanggapi oleh JKDM yang akan mempelajari permintaan DJBC atas statistik dan skema pengembalian barang-barang bermerek yang dibeli oleh pelancong (turis)

Dalam kesempatan wawancara WBC dengan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi dan Dirjen Kastam Diraja Malaysia, Dato' Sri Khazali Bin Hj Ahmad, mereka sepakat bahwa pertemuan ini merupakan penguatan

dari pertemuan sebelumnya. Heru Pambudi mengatakan, pertemuan ke-12 menyangkut beberapa pokok isu, pertama menyangkut mengenai narkotika, kedua perbatasan, dimana ada perbatasan laut dan darat, terutama di Batam dan pantai timur. Yang paling penting hasil kesepakatan pada pertemuan yang ke-12 sudah ada tindak lanjutnya dan di pertemuan ke-13 ini sebenarnya untuk memperkuat hasil kesepakatan dari pertemuan yang ke-12.

“Diperkuatnya dari sektor apa saja? yang pertama dari penguatan strateginya, kedua adalah penguatan operasionalnya. Sebagai salah satu contoh *Local Border Committee* yang sudah di *set up* di pertemuan ke-12 dan sudah berjalan di Entikong dan Tebedu sekarang akan diperluas di Batam dan Johor, kemudian Medan dengan Pinang. Ini menunjukkan bahwa kita fokus pada area-area tertentu, kemudian kita konkritkan dan diperkuat pada pertemuan ke-13 ini,” ungkap Heru Pambudi.

Selanjutnya pertemuan ke-13, menurut Heru Pambudi, sudah masuk kepada tataran operasional dan telah disepakati oleh kedua belah pihak akan ada pertukaran data dan informasi bahkan sampai kepada *joint analysis* dan tentunya akan lebih maju daripada sekedar bertukar data. “Joint analisis nanti akan kita lihat arah kedepannya bagaimana kita akan melakukan *joint enforcement* atau *joint inspection*, ini menurut saya paling penting, karena kalau kita tidak melakukan sinergi seperti itu tantangannya terlalu besar. Tolong dicatat satu hal, bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu administrasi, karena tantangannya lebih bersifat global, tantangannya itu lebih ke multi sektor dan itu lintas negara.”

“Kalau tantangannya lintas negara maka mutlak cara penanganannya pun lintas negara, jadi tidak bisa berdiri sendiri, harus kerjasama, caranya dengan pertukaran data, sampai kepada analisa dan *joint enforcement* dalam bentuk Patkor Kastima dan ini merupakan satu kesatuan yang saat

ini sudah sampai mengerucut kepada *out put* dan *out come* yang sudah jelas, jadi tidak hanya kita bicara yang seremonial, tapi kita sudah masuk ke *out put* dan *out come*-nya,” papar Heru Pambudi.

Menurut pandangan Heru, topik yang saat ini dibahas sudah menjadi topik yang menjadi kebutuhan. Pertemuan Bilateral Ke-13 merupakan penguatan dari pertemuan yang ke-12, tentunya pertemuan yang ke-14 nanti akan menjadi penguatan pertemuan yang ke-13, karena kedua pihak sepakat topik-topik tadi akan dilakukan kerjasama, maka itu harus dikonkritkan.

“Saya juga mulai memikirkan pertemuan ke-14 nanti, kita sudah harus mulai memikirkan aspek pengawasan dikaitkan dengan perkembangan teknologi. Saya sampaikan perkembangan teknologi terutama *e-commerce* memang bisa untuk meningkatkan perdagangan, tetapi disitu sekaligus ada tantangan yang bersifat pengawasan. Artinya kalau tadinya penyelundupan bisa dilakukan melalui fisik lewat pelabuhan kemungkinan kedepan akan dilakukan melalui teknologi informasi, melalui saluran internet atau dunia maya. Padahal ini merupakan kegiatan lintas negara atau *border activities* dan *customs* harus ada disitu juga,” ujar Heru yang menekankan cara konvensional tetap harus dikuatkan, tetapi harus juga mengantisipasi perkembangan teknologi, *customs* perlu juga mengimbangi, *customs* harus ikut di dalam perkembangan tersebut, baik perdagangan maupun perkembangan teknologi.

“Karena sekali lagi saya tegaskan *customs* moderen harus mampu menyesuaikan dengan tren dari perdagangan itu sendiri. Karena yang namanya perdagangan internasional tidak mungkin kita selesaikan sendiri-sendiri, pasti ada kaitannya,” imbuhnya.

Selanjutnya, Dato’ Sri Khazali Bin Hj Ahmad sangat menyambut baik dengan hasil kesepakatan di pertemuan ke-13 ini, menurutnya

apa yang telah disimpulkan dalam pertemuan tersebut merupakan suatu hal yang positif, terutama mengenai titik-titik dan jalur rawan terjadinya pelanggaran kepabeanan dan penyelundupan.

“Indonesia menyampaikan wilayah yang menjadi titik-titik rawan, kami pun dari Malaysia juga menyampaikan titik-titik rawan yang selama ini dikelola oleh masing-masing dan nantinya titik rawan itu akan di-*share*. Titik rawan sudah pasti ada, pertama, titik rawan terkait dengan barang dan titik rawan yang terkait dengan pergerakan orang yang membawa barang, orangnya inilah yang perlu juga kita antisipasi. Jadi itu kedepannya yang akan kita kuatkan,” ujar Dirjen Jabatan Kastam Diraja Malaysia.

Lebih lanjut ia mengatakan, pertemuan ini merupakan acara yang dinantikan oleh kedua belah pihak. Sebab dipertemuan kedua pihak membicarakan kepentingan bersama dan isu-isu yang perlu bersama-sama ditangani. Pada pertemuan yang ke-13 ini kedua pihak telah melakukan beberapa tindakan strategis untuk kepentingan bersama, timbal balik antar kedua negara dan memastikan terjaminnya manfaat dan keuntungan yang diraih oleh kedua belah pihak melalui kerjasama ini.

“Pertemuan ini merupakan lanjutan dari apa yang telah diputuskan pada pertemuan ke-12. Kita kuatkan lagi jalinan kerjasama ini, terutama untuk memperkuat pengawasan dari penyelundupan narkotika di kedua belah pihak,” ujarnya.

“Hal terpenting menurut saya kedua belah pihak harus saling intensif melakukan pertukaran informasi, karena tanpa informasi dan intelijen yang kuat serta bertindak sendiri-sendiri akan semakin mempersulit kedua belah pihak. Karenanya dalam forum ini kami memutuskan untuk meningkatkan pertukaran informasi,” pungkas Dato’ Sri Khazali Bin Hj Ahmad.

(Ariessuryantini, Desi A.P.,
Wahyu Valti R.M.)

Rapat Koordinasi Kepabeanaan Internasional



Direktorat Kepabeanaan Internasional DJBC menggelar acara rapat koordinasi atau Rakor di Gedung Kalimantan Kantor Pusat DJBC, Jakarta 12 Agustus 2015, guna memantapkan langkah dan strategi ke depan. Acara sehari yang dibuka langsung Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, ini dihadiri Sekretaris DJBC Kushari Suprianto, Direktur Kepabeanaan Internasional Robert Leonard Marbun, Kepala Puski Oentarto Wibowo, Direktur Audit Muhammad Sigit, Ka Kanwil DJBC Jatim I Rahmat Soebagio, segenap atase keuangan yang bertugas di empat negara, dan beberapa pejabat di lingkungan Kantor Pusat DJBC.

Dalam sesi pembukaan, Dirjen mengemukakan bahwa Direktorat Kepabeanaan Internasional harus memiliki skala prioritas dalam kinerjanya. Ujung dari semua tujuan itu tentunya adalah optimalisasi penerimaan negara. Kemudian Dirjen mendukung adanya perubahan struktur organisasi dan pengembangan beberapa bidang di Kepabeanaan Internasional. Menurutnya, Bidang Humas atau hal bersifat *relationship* merupakan bagian dari Kepabeanaan

Internasional. Dengan demikian DJBC diharapkan dapat menjalin *external relationship* dengan dunia internasional.

Dirjen juga menyoroti mengenai pelaksanaan *free trade agreement* (FTA) selama ini. Menurutnya, barang-barang tenaga kerja Indonesia (TKI) mestinya dibedakan dengan barang para pelancong. Hubungan bilateral dengan Malaysia juga akan diusahakan menjadi efektif dengan mengutamakan manifest dari Malaysia. Dirjen berharap DJBC memiliki ketegasan dalam menentukan sikap terkait FTA, apakah titikberatnya bersifat materiil ataukah formil. “Saya ingin akhir dari forum pertemuan komunitas internasional ini menghasilkan arah kebijakan untuk FTA,” ujar Dirjen.

Kemudian Dirjen menyoroti masalah narkoba yang menjadi masalah krusial antarbangsa. Menurut Dirjen, momentum maraknya penyelundupan narkoba ini akan dijadikan ‘bahan obrolan’ dengan Singapura dan Malaysia. Dirjen pun berharap bahwa penanganan masalah narkoba ini hendaknya di-support rekan-rekan pegawai yang bertugas di luar negeri. “Empat juta pengguna narkoba di Indonesia, kita hanya

menangkap hitungan kilo. Kita harus membuka jaringan seluas-luasnya, untuk saat ini terutama di Malaysia dan China,” ujar Dirjen.

Berikutnya, terdapat beberapa pembahasan pada Rakor Kepabeanaan Internasional kali ini. Pertama mengenai peningkatan peran dan fungsi atase. Atase yang selama ini bekerja pada empat KBRI yakni Singapura, Hongkong, Jepang, dan Belgia, tersebut dalam pelaksanaan tugasnya belum efektif dan efisien khususnya bidang keuangan dan kekayaan negara. Hal ini disinyalir karena faktor terbatasnya wilayah kerja sehingga perlu menambahkan atau mengekstensifikasi wilayah kerja.

Hal itu bertujuan agar atase yang bersangkutan tidak hanya dapat melaksanakan tugas pada negara tersebut, tetapi dapat juga bekerja pada negara-negara lain yang secara geografis berdekatan. Dengan demikian diperlukan peningkatan kapasitas atau fungsi atase yang ada. Kemudian penambahan atase dan adanya atase keliling, serta jabatan fungsional diplomat atau pejabat yang diperbantukan pada lembaga keuangan internasional.

Saat ini terdapat beberapa pejabat setingkat eselon I dan eselon II dari Kemenkeu yang ditugaskan di lembaga keuangan internasional (LKI) dengan menggunakan mekanisme diperbantukan atau dipekerjakan yang berpotensi merugikan yang bersangkutan pada saat selesai melaksanakan tugas dan kembali ke Kemenkeu. Adapun penugasan pejabat atau pegawai tersebut ditetapkan oleh Presiden dalam lingkup pekerjaan yang mewakili negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diusulkan pejabat atau pegawai Kemenkeu yang ditugaskan di LKI dapat diangkat sebagai pejabat fungsional diplomat. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan rumpun jabatan diplomat untuk dapat menampung kebutuhan dari luar Kementerian Luar Negeri yang akan ditugaskan di Lembaga Internasional.

(Supomo, Intania Riza Febriani)

DJBC Kedatangan TIM Penilai Lomba Implementasi Pengarusutamaan Gender Tingkat Kementerian Keuangan



Foto Bersama. Sekretaris DJBC didampingi para Kepala Bagian, berfoto bersama dengan tim penilai PUG dari Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah instansi setingkat eselon satu yang memiliki keluasan wilayah kerja dan keragaman pegawainya. Dengan kompleksnya keragaman dari pegawai itulah DJBC dituntut untuk mampu menerapkan khususnya kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) agar para pegawai dapat merasa nyaman dan mendapatkan hak yang sama.

Berpegang pada kebijakan yang ada saat ini, DJBC pun mencoba untuk menerapkan PUG secara nyata yang dibuktikan dengan membangun beberapa fasilitas khusus wanita, hingga mengeluarkan kebijakan terkait persamaan hak wanita dalam bekerja. Dari beberapa fasilitas yang ada, DJBC mencoba mengikuti perlombaan implementasi PUG di tingkat Kementerian Keuangan.

Untuk melihat fasilitas PUG yang ada di DJBC tim penilai pun pada 18 Agustus 2015 mendatangi sekaligus mewawancarai Sekretaris DJBC, **Kushari Suprianto** untuk menanyakan

hal-hal yang telah dibangun DJBC terkait implementasi PUG. Wawancara yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Gedung Kalimantan Kantor Pusat DJBC, para penilai banyak menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas hingga kebijakan yang dikeluarkan DJBC.

Menurut Kushari, pada umumnya seluruh kantor bea cukai sudah menerapkan PUG dalam kesehariannya, mulai dari toilet wanita, parkir khusus wanita, ruang laktasi di setiap gedung, taman pengasuhan anak, ruang olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, hingga ruangan tahanan untuk wanita. "Sejak awal kami sudah menerapkan PUG mulai dari penerbitan kebijakan Dirjen Bea dan Cukai hingga peraturan Menteri Keuangan, membuat publikasi tentang konsep PUG, membuat kegiatan-kegiatan yang melibatkan pegawai pria dan wanita, hingga menyediakan sarana dan prasarana," ungkap Kushari.

Lebih lanjut Kushari menjelaskan, penerapan PUG yang kini sangat

dirasakan oleh kaum wanita adalah, proses mutasi untuk wanita yang terlebih dahulu dikonsultasikan atau ditanyakan kepada yang bersangkutan. Dengan menanyakan langsung maka pegawai wanita dapat memilih untuk proses mutasi maupun saat akan dilakukan promosi.

Dari penjelasan yang disampaikan Sekretaris tersebut, tim penilai terlihat cukup puas karena selain mereka disajikan beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan, tim juga diajak berkeliling untuk melihat beberapa fasilitas yang telah disebutkan dan ditayangkan dalam proses wawancara.

Day Care

Masih terkait dengan penerapan PUG, satu hal yang kini dapat dinikmati oleh seluruh pegawai Kantor Pusat DJBC adalah disediakannya *daycare* atau yang disebut juga Taman Pengasuhan Anak Bea Cukai (TPA BC). Dengan adanya TPA BC ini para pegawai dapat menitipkan putra-putri tanpa khawatir karena telah dijaga dan dirawat dengan baik.

Menurut Kepala Bagian Umum KP DJBC, **Indrajati Martini**, pembangunan ruang TPA BC diawali dengan banyaknya keluhan pegawai yang sulit meninggalkan putra-putrinya jika akan bekerja, bahkan ada yang rela dititipkan ke orang tuanya di daerah agar ada yang jaga. Dari keluhan inilah maka pihaknya melakukan study banding ke Kementerian Keuangan yang telah lebih dahulu mempunyai TPA dan bekerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta sebagai pembimbing proses pembuatan TPA BC tersebut.

“Akhirnya kami mulai buka sejak bulan Juli 2015 tepatnya seminggu sebelum lebaran dan seminggu setelah libur lebaran. Untuk awalnya kami adakan hanya sesaat dan itu semua dibiayai oleh DIPA, kini setelah selesai banyak juga pegawai yang menginginkan TPA BC ini menjadi permanen, yang akhirnya kami teruskan tanpa menggunakan DIPA lagi dan ditanggung oleh para pegawai yang ingin menitipkan anaknya,” tutur Indrajati.



Daycare. Dengan dibangunnya ruang daycare kini para pegawai tidak sulit lagi untuk menitipkan putra-putrinya.

Masih menurutnya, untuk pegawai yang ingin menitipkan putra-putrinya di TPA BC dikenakan biaya sebesar Rp. 50 ribu per hari atau Rp. 800 ribu per bulan, sementara untuk bayi dikenakan biaya Rp. 850 ribu per bulan. Selain mendapatkan makan, para putra-putri yang dititipkan juga diberikan pemeriksaan kesehatan satu bulan sekali dan beberapa kegiatan lainnya. “Kami juga telah bekerjasama dengan pihak UNJ untuk mendatangkan

educarent atau pembimbing bagi perawat anak-anak, hingga bagaimana menyiapkan makanan yang sehat dan siap saji buat,” tandas Indrajati.

Dengan fasilitas yang lengkap dan sosialisasi yang intensif dilakukan oleh DJBC, diharapkan penerapan PUG dapat berjalan dengan baik dan semua pegawai dapat menerima haknya dengan sama baik soal pekerjaan maupun fasilitas yang ada di kantor.

(Supriyadi)

Dirjen Bea dan Cukai Melantik Pejabat Eselon III



Dilantik. Sebanyak 130 pejabat eselon III dilantik oleh Dirjen Bea dan Cukai untuk mampu menghadapi semua tantangan yang ada saat ini.

Setelah mengalami kekosongan beberapa lamanya, akhirnya melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 629/KM.1/UP.11/2015, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, **Heru Pambudi** melantik 130 pejabat eselon III untuk mengisi jabatan yang kosong. Pada mutasi kali ini juga diwarnai dengan promosi pejabat eselon IV untuk menduduki jabatan Kepala Bidang di Kantor Wilayah.

Acara pelantikan yang berlangsung pada 31 Juli 2015 dan bertempat di Auditorium Sabang Kantor Pusat DJBC, dihadiri oleh seluruh pejabat eselon II dan beberapa pejabat eselon III dan IV di lingkungan KP DJBC.



Dalam sambutannya Dirjen mengatakan, dengan terisinya jabatan eselon III saat ini berarti sudah semua jabatan terisi sehingga pelayanan dan pengawasan yang menjadi tugas DJBC dapat berjalan dengan maksimal.”Mutasi pada organisasi pemerintahan merupakan hal yang biasa dan lumrah, untuk itu jangan jadikan mutasi ini sebagai hal-hal yang dianggap aneh atau dapat menghambat jalannya pelayanan dan pengawasan,” ujar Dirjen.

Lebih lanjut Dirjen menjelaskan pada sambutannya, ada beberapa hal pokok yang harus dipahami oleh seluruh pegawai DJBC, keempat hal pokok itu lebih mengarah pada kondisi internal DJBC yang saat ini harus segera menyatukan kembali visi dan misi agar DJBC dapat menjalankan tugas dengan baik karena mempunyai tujuan yang satu.

“Tahun 2014 adalah momentum kita untuk melakukan kalibrasi tugas dan fungsi kita, dimana yang tadinya *revenue* nomor satu, kini kita rubah *trade facilitator* dan *industrial attention* menjadi nomor satu. Ini mengandung makna bahwa kita juga harus mengubah cara pandang kita dan juga mengubah struktur organisasi

kita. Nah kegiatan ini merupakan terjemahan dari kesepakatan kita dari cara menempatkan pegawai-pegawai sesuai keahlian dan kapasitasnya,” jelas Dirjen.

Masih menurutnya, penunjukan ini harus diwujudkan dengan kemampuan menjalankan tugas dan fungsi DJBC dimana memfasilitasi perdagangan, mendukung industri, melindungi masyarakat dari masuknya barang ilegal dan mengumpulkan pajak. Sehingga penunjukan pejabat kali ini untuk menjawab tantangan misi dan visi tersebut.

“Di bidang perdagangan internasional Presiden telah memberikan atensi kepada seluruh komponen, lembaga, asosiasi, termasuk pelaku usaha dan operator pelabuhan untuk terus mendukung fasilitasi perdagangan. Dengan tujuan itu Presiden mendapati bahwa *dwelling time* kita masih di atas yang diharapkan 5,5 hari dari 4,7 hari,” katanya.

Selain itu, Dirjen juga mengatakan kalau saat dirinya dipanggil Presiden ke Istana Negara, ada pesan khusus yang disampaikan yaitu menurunkan *dwelling time*. Ini merupakan tantangan yang nantinya akan dijawab oleh seluruh pejabat yang baru dilantik.

Dan yang penting adalah perintah tersebut bukan hanya untuk Tanjung Priok saja, tapi juga berlaku disemua pelabuhan internasional, seperti Semarang, Surabaya, Makassar, Belawan dan sebagainya.

Jadi peran DJBC pada perdagangan internasional bukanlah peran yang kecil, untuk itu DJBC telah bertekad untuk menurunkan *logistic cost* yang ada sekarang sebesar 24 persen, bisa turun dibawah itu. Dengan demikian tantangan yang kini sudah dihadapi kita adalah dapat menurunkan *logistic cost*. Selain itu, dari sisi pengawasan DJBC berharap bidang intelejen dapat kuat dan memiliki kemampuan di bidang IT. Dengan kemampuan itu kedepannya DJBC dapat menjawab semua tantangan dunia baik di bidang pengawasan maupun bidang pelayanan.

“Saya berharap ada harmonisasi diantara kita semua, karena saya tidak ingin ada persepsi kalau antara satu kantor dengan kantor yang lainnya memiliki perbedaan pandangan, karena kita masih satu baju, kita masih satu misi, dan kita memiliki satu tujuan yang sama,” tandas Dirjen.

(Supriyadi, Andri Rizqia Indrawan)



Halalbihalal Keluarga Bea Cukai

Halalbihalal adalah sebuah tradisi masyarakat Indonesia ketika memasuki bulan Syawal. Setelah berpuasa sebulan penuh, umat Islam di Indonesia merayakan kemenangan di hari raya Idul Fitri. Halalbihalal muncul sebagai ungkapan saling menghalalkan segala kesalahan dan kekhilafan. Setiap orang sadar bahwa mereka tidak lepas dari kesalahan, karena memang manusia tempatnya salah dan lupa, oleh karena itu mereka berkumpul bersama sanak saudara dan handai tolan untuk saling memaafkan segala salah dan khilaf.

Begitu juga dengan pegawai, pejabat serta pensiunan Bea Cukai, sebagai makhluk sosial mereka sadar akan khilaf dan salah yang mereka lakukan ketika bergaul. Beberapa kegiatan halalbihalal yang dilakukan baik di kantor pusat maupun di kantor vertikal Bea Cukai kami rangkum.

Halalbihalal sebagai Bentuk Komunikasi, Koordinasi dan Konsolidasi

Seminggu bekerja setelah merayakan lebaran tepatnya tanggal 28 Juli 2015 bertempat di Auditorium Merauke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diadakan kegiatan Halal Bi Halal. Tidak hanya pegawai dan pejabat di



lingkungan Kantor Pusat DJBC saja yang menghadiri, akan tetapi tampak diantaranya mantan pejabat seperti Permana Agung (mantan Dirjen), Thomas Sugijata (mantan Dirjen), Frans Rupang (mantan pejabanan Eselon II), Yusuf Indarto (mantan pejabanan Eselon II), dan lainnya turut hadir untuk halal Bi Halal.

Acara dibuka oleh Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi. Dalam sambutannya Heru menyampaikan tidak sekedar maaf-memaafkan atau salam-salaman, tetapi momentum untuk memperkuat tali silaturahmi, tidak hanya antar pegawai tetapi dengan yang sudah purna bakti. Hal tersebut dilakukan karena menurut Heru tantangan yang akan dihadapi

kedepannya akan semakin sulit melihat perkembangan yang ada.

“Banyak tantangan yang dihadapi Bea Cukai sebagai institusi. Dan untuk menjawab tantangan tersebut mutlak perlu adanya sinergi salah satu bentuknya seperti hari ini, yang menunjukkan bahwa kita masih berkomunikasi, masih menjadi satu keluarga, masih satu kesatuan.”

Selama ini Heru sering mendapat masukan, beberapa diantaranya membuat dirinya terkejut dan berpikir ‘Mengapa kita tidak pernah terpikirkan hal tersebut’ atau ‘Mengapa kita tidak melakukan hal itu’. Heru menjelaskan bahwa hal tersebut datangnya bukan dari yang aktif tapi dari yang sudah tidak aktif,

“Hal tersebut terjadi karena kecintaan mereka terhadap kita semua.”

Salah satu value Kementerian Keuangan adalah sinergi yang mana menjadi sebuah hal penting dalam melaksanakan terutama sebagai institusi yang harus bekerjasama dengan banyak pihak. “Pentingnya bersilaturahmi, bertemu seperti ini, merupakan esensi dari sebuah konsolidasi dan bentuk dari sinergi.”

Heru juga menekankan dalam sambutannya bahwa kata ‘halalbihalal’ yang di-create oleh kita sendiri adalah suatu bentuk komunikasi, koordinasi, konsolidasi yang memang perlu dilakukan dan menjadi suatu kebutuhan bagi suatu komunitas terutama saat tantangan sudah terlihat jelas di depan mata. “Konsolidasi bentuknya bisa saling memaafkan. Dengan konsolidasi ini diharapkan tantangan bisa dilalui, dikerjakan bahkan dilampai,” ujar Heru dengan semangat.

Menurut Heru komunikasi yang terbuka mutlak dilakukan. pada kesempatan tersebut Heru menyampaikan bahwa telah disediakan ruangan khusus di lantai 8 Gedung Papua untuk menampung kebutuhan berkomunikasi dengan nyaman. Ditegaskan olehnya siapa saja boleh datang dan bebas dipakai oleh siapa saja untuk menyampaikan pandangannya secara terbuka karena ada hal-hal yang terkadang secara informal bisa menghasilkan sesuatu ide baru tetapi jika diagendakan secara formal seperti rapat, malah tidak muncul atau sulit disampaikan.

“Ruangan itu disediakan karena banyak sekali pandangan-pandangan yang datangnya bukan dari lingkungan DJBC tetapi dari luar. Dan ini untuk memperkuat komunikasi. Pegawai BC Jayapura silahkan datang ke ruangan itu setelah jam 5 sore untuk menyampaikan pandangan-pandangannya,” tutup Heru.

(Desi Prawita, Andi T.S.,
Dadan Heriyana)

Halalbihalal Keluarga Besar PPBC

Bukan hanya pegawai dan pejabat Bea Cukai yang menyelenggarakan



kegiatan seperti ini, para pensiunan Bea Cukai yang tergabung dalam Persatuan Pensiunan Bea dan Cukai (PPBC) pada 8 Agustus 2015 pukul 09.00 WIB juga menyelenggarakan Halalbihalal di Auditorium Pusat Pendidikan dan Latihan Bea dan Cukai Jakarta Timur.

Tema yang diambil dalam acara tersebut adalah “Dengan Ukhawah Idul Fitri 1436 H, PPBC Mengajak Seluruh Anggotanya Menuju Kehidupan Yang Lebih Baik”, acara ini dihadiri para pensiunan dari berbagai kalangan, mulai dari mantan eselon satu, eselon dua, pejabat dan pelaksana. Acara yang rutin diselenggarakan setiap tahun ini untuk kesempatan kali ini dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Heru Pambudi dan mantan Dirjen, Agung Kuswandono, yang saat ini menjadi salah satu Deputi di Kementerian Kemaritiman, Sekretaris DJBC Kushari serta mantan Dirjen, Sudjana dan Soehardjo serta beberapa mantan pejabat eselon II antara lain Sjahrir Djamaludin, Kusmayadi, Soepardjo dan lain-lain.

Bertindak sebagai Ketua Panitia Halal Bi Halal, Rochmadi, menyampaikan rasa terimakasihnya kepada para hadirin yang telah memenuhi undangan Halal Bi Halal dan mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena atas karunia-Nya dapat dipertemukan kembali di acara yang sama yang diselenggarakan setiap tahun sekali ini. Silaturahmi berarti menghubungkan kasih sayang. Hubungan kasih sayang yang sarat dengan nilai-nilai persaudaraan,

kesetiakawanan, dan saling mengasihi baik antara sesama kaum muslim maupun antara kaum muslim dengan non-muslim. Hubungan itu tak jarang terganggu akibat ulah dan tindakan kita sendiri. Karena itulah, dalam bulan Ramadhan dan rangkaian sesudahnya, yakni Idul Fitri, kita dianjurkan menjalin kembali dan memepererat tali silaturahmi dengan saling maaf-memaafkan satu sama lain.

“Saling memaafkan dan menyambung tali silaturrahi merupakan ajaran luhur dalam Islam. Setiap saat kaum Muslim harus mengindahkan ajaran ini tanpa memandang hari dan momen tertentu. Jadi tidak terbatas saat Idul Fitri saja,” ujar Rochmadi.

Selanjutnya Ketua PPBC, Mulyo Rahardjo menyampaikan bahwa organisasi PPBC merupakan organisasi dari para pensiunan Bea Cukai, bahwa PPBC sebuah organisasi yang nirlaba, tetapi apapun juga ada beberapa usaha-usaha yang dilakukan untuk menunjang kegiatan organisasi ini supaya tetap eksis. Dan salah satu bentuk eksistensinya adalah melalui kegiatan halal bi halal ini.

Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi yang juga menyampaikan sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada PPBC atas undangan yang disampaikan karena hal ini menunjukkan bahwa purnabakti Bea Cukai semuanya masih dalam satu keluarga. “Saya kira itu yang paling penting. Kami merasa terhormat karena Pak Mulyo datang langsung kepada kami menyampaikan undangan



dari PPBC. Dan ini merupakan salah satu implementasi tujuan dari PPBC membuat erat persaudaraan. “

Heru mengatakan betapa pentingnya sebagai satu saudara, dari sudut pandang sebagai pegawai yang masih aktif. Jika melihat struktur jabatan yang sekarang, perlu disadari sepenuhnya telah terjadi lompatan atau gap yang lumayan besar antara senior dan purnabakti dengan pegawai yang aktif dimana rata-rata pejabat saat ini berusia 50 tahun bahkan ada yang kurang dari 50 tahun. Tentunya ada hal yang harus dicermati. Apa yang dulu barangkali secara berjenjang diteruskan secara estafet, sekarang estafetnya terlalu go bisa sampai sepuluh tahun. Jadi jika sebelumnya jarak antara yang purnabakti dengan yang masih aktif bisa antara 2-3 tahun, tetapi sekarang bisa mencapai 10 tahun jaraknya. Banyak sekali benang-benang merah yang harus kami tunggu lewati.

Selain pembacaan Ayat Suci Alquran, dan ceramah acara ini diisi dengan hiburan music Kolintang dari Grup Kemuning Putih, binaan dari Ibu Rachmat Soebagyo, pemberian Disamping itu pemberian doorprize menjadi salah satu acara yang cukup menarik perhatian para undangan. Acara diakhiri dengan bersalam-salaman dan makan siang bersama.

(Ariessuryantini, Andy T.S.,
Indah Widaryanti)

Halalbihalal Kantor Vertikal Bea Cukai

Dimulai dari kantor vertikal Bea Cukai yang ada di Semarang. Pada tanggal 27 Juli 2015, Kanwil

DJBC Jateng dan DIY, KPPBC TMP Tanjung Emas dan kantor yang baru diresmikan KPPBC TMP A Semarang mengadakan acara Halalbihalal. Acara yang dikemas dengan kegiatan *capacity building* tersebut dibuka oleh Untung Basuki Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY dan dihadiri oleh seluruh pejabat dan pegawai di tiga kantor tersebut.

29 Juli 2015, KPPBC TMP B Pekanbaru juga mengadakan acara yang sama. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh pegawai serta para pensiunan pegawai KPPBC TMP B Pekanbaru, serta perwakilan dari Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat. Acara dibuka oleh Elfi Haris Kepala KPPBC TMP B Pekanbaru dan dilanjutkan dengan siraman rohani oleh ustadz Anang Masdari, ustadz menyampaikan ceramah mengenai anjuran tetap bertaqwa walaupun telah berpisah dengan bulan Ramadhan.

Pada tanggal yang sama, KPPBC TMP A Denpasar, juga diadakan acara Halalbihalal yang diikuti oleh seluruh pegawai, tenaga OJT, PKD, dan Cleaning Service di Lingkungan KPPBC TMP A Denpasar. Acara dimulai pukul 09.00 WITA dengan penyampaian kata sambutan singkat oleh Pelaksana Tugas Kepala KPPBC TMP A Denpasar, Rusmanhadi, yang kemudian dilanjutkan dengan ceramah bimbingan rohani oleh Ustadz Istanto dengan tema “Berkah Dari Halal Bihalal Dalam Kehidupan Bermasyarakat”.

31 Juli 2015, bertempat di lapangan KPPBC TMP Belawan juga dilaksanakan acara Halalbihalal di lingkungan kantor. Acara dimulai pukul 07.30 WIB dengan senam pagi bersama kemudian disusul dengan acara saling bermaaf-maafan, yang dimulai dari para pejabat kemudian disusul para pegawai lainnya.

(PLI Semarang, Pekanbaru,
Denpasar, Belawan)



Dheni Wiguna, SE, SST, Ak., MM, MEcDev, MPP, CA

“Tiada Hari Tanpa Belajar”



Albert Einstein, ilmuwan Jerman yang terkenal dengan teori relativitasnya; memiliki satu semboyan bijak: “Intellectual growth should commence at birth and cease only at death—pertumbuhan intelektual harus dimulai semenjak lahir dan hanya berhenti saat kematian”. Tak dapat dipungkiri, semangat belajar ilmuwan peraih penghargaan Nobel Fisika ini tidak pernah lekang hingga akhir hayatnya.

Albert Einstein, ilmuwan Jerman yang terkenal dengan teori relativitasnya; memiliki satu semboyan bijak: “*Intellectual growth should commence at birth and cease only at death*—pertumbuhan intelektual harus dimulai semenjak lahir dan hanya berhenti saat kematian”. Tak dapat dipungkiri, semangat belajar ilmuwan peraih penghargaan Nobel Fisika ini tidak pernah lekang hingga akhir hayatnya.

Demikian pula dengan Dheni Wiguna. Meski tidak berkecimpung dalam dunia Fisika, tetapi dalam hal menuntut dan berbagi ilmu, lelaki kelahiran Cimahi pada tanggal 29 Juli 1975 ini memiliki semangat yang tak kalah besarnya. Kepala Seksi Perencanaan Audit III Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini dikenal sebagai orang yang selalu penasaran, ingin tahu, serta senang berbagi ilmu dengan siapa saja. Tak heran, selain menjadi pegawai DJBC, ia juga mengajar sebagai dosen dalam berbagai disiplin ilmu di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

“Saya adalah anak pertama di keluarga saya. Karena itulah saya jadi suka mengajar dan berbagi pengalaman, terutama bagi mereka yang lebih muda. Saya merasa senang

jika dapat menularkan ilmu ke orang lain,” jawabnya, ketika ditanya mengenai apa motivasinya untuk mengajar. Prinsip mengajarnya pun dapat dibilang unik. Alih-alih hanya berfokus pada hasil, Dheni lebih senang jika anak-anak didiknya menikmati proses. Seperti yang dijelaskannya, “Generasi muda harus belajar untuk menghargai proses. Saya tidak menilai mahasiswa saya hanya dari jawaban mereka di ujian, tetapi juga usaha mereka untuk memperoleh itu.”

Karena prinsip “menikmati proses” itu pulalah, Dheni, demikian ia akrab disapa; sangat gemar menjajal hal-hal baru yang menarik minatnya. Dari bidang olahraga seperti parasailing dan ski, mendaki gunung Fuji, sampai bidang bisnis seperti laundry dan toko tas; semua pernah dicicipinya. Baginya, cara terbaik untuk belajar adalah dengan mencoba dan mengalami sendiri, apapun hasilnya nanti. “Selamilah prosesnya, kumpulkan pengalaman sebanyak-banyaknya,” ia mengingatkan, “Jangan takut gagal, karena dalam kegagalan ada pelajaran yang tak ternilai harganya.”

Dalam memenuhi kegemarannya mencari pengetahuan dan pengalaman baru, Dheni memang tak pernah takut mengambil resiko. Berbagai kisah menarik pun tak lepas dari

“petualangan”-nya berburu ilmu. Ketika sedang bertugas ke Belanda misalnya. Pada saat itu ia ingin mengenal lebih dekat kota Brussel, Belgia, yang menjadi tempat berdirinya Markas Besar World Customs Organization dan hanya berjarak sepelemparan batu dari Belanda. Akan tetapi ia mengalami kendala dalam hal transportasi dan informasi. Tak kehabisan akal, ia pun menghubungi Atase Bea Cukai Indonesia dan menceritakan niatnya untuk berkeliling Brussel. Pucuk dicinta ulampun tiba, niatnya disambut baik dan Dheni pun diundang ke Brussel untuk dihantarkan mengunjungi *landmarks* kota oleh asisten Atase.

“Begitulah Bea Cukai, di manapun berada persaudaraan kita tetap erat; kita tetap saling membantu. Saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar ini,” Imbuh Dheni.

Lain lagi cerita di Jepang. Pada tahun 2008 sampai 2009, Dheni mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di National Graduate Institute for Policy Studies, lebih dikenal sebagai GRIPS, di Minato, Tokyo. Ia mengambil program master untuk Public Policy dan mempelajari berbagai macam kebijakan publik;



termasuk hukum dan mekanisme transportasi Jepang yang menarik minatnya karena kemajuan dan keteraturan sistemnya.

“Salah satu ciri negara yang maju adalah kualitas sistem transportasinya. Saat ini Indonesia sedang melangkah menuju perkembangan itu. Semoga ke depannya kita dapat menikmati fasilitas publik yang lebih baik. Bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tapi kemajuan transportasi tentu akan memperlancar DJBC dalam melaksanakan tugas sebagai punggawa keuangan negara.”

Hidup di negeri yang bahasanya terlampau berbeda dengan kampung halaman tentu menjadi tantangan tersendiri. Dheni menyadari bahwa ia lemah dalam mempelajari bahasa. Untuk mempercepat kemampuannya dalam berbahasa Jepang, Dheni menggunakannya secara intensif di setiap kesempatan, termasuk menjadi aktivis di Student Council sebagai Bendahara. Ia juga sempat diminta untuk berpidato dalam bahasa dari rumpun Japonik-Ryukyuan itu.

“Ternyata kalau ada tekad dan kemauan berlatih, ya bisa saja,” kenangnya, sembari bercerita bahwa ia menghafalkan teks pidato dan pelafalannya selama seminggu secara otodidak. “Saya merekam intonasi dan cara membaca setiap kata, kemudian mendengarkan dan menghafalkannya setiap hari. Pada akhirnya saya berhasil membawakan pidato itu. Cara bicara saya memang kurang sempurna, karena saya bukan orang Jepang. Tetapi mereka tetap mengapresiasi dengan antusias. Intinya, tidak perlu malu berbicara dalam bahasa asing, mereka tidak akan menertawakan kita. Malah

mereka bangga kita mau belajar bahasa mereka.”

Dari pengalaman berharganya di Jepang itu, Dheni pun bertekad untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing secara aktif di lingkungan kerjanya. Ia pun tidak tanggung-tanggung dalam usahanya. Pecinta film dan jalan-jalan ini merencanakan sebuah proyek perpustakaan dan English Club yang bertujuan merangsang kemampuan dan rasa percaya diri para pegawai untuk berbicara dalam Bahasa Inggris. Dalam pertemuan rutusnya, setiap anggota diminta untuk bercakap-cakap dalam Bahasa Inggris tentang berbagai topik menarik. Walau demikian, tidak seperti pendidikan formal, di sini tidak ada paksaan atau tekanan.

“Yang penting semua *have fun*. Jangan takut salah, nanti lama-lama juga bisa sendiri,” tandasnya.

Wajib ke Luar Negeri

Sebagai anggota Direktorat Jenderal Bea Cukai yang tak lepas dari jaringan perhubungan internasional, Dheni menyadari pentingnya memiliki pandangan luas bagi para pegawai instansi berlambang sayap dan malai padi ini. Dheni sendiri tak asing dengan perjalanan luar negeri: tak kurang dari enam belas negara telah dikunjunginya untuk menambah pengalaman dan wawasan; termasuk India, Arab Saudi, dan Australia. Di kantornya, Dheni juga menganjurkan para pegawai muda untuk membuat paspor sedini mungkin.

“Pergi ke luar negeri itu merupakan salah satu media pembelajaran yang penting. Kamu bisa membaca, mendengar, dan melihat tentang

luar negeri; tetapi akan berbeda jika mengalaminya sendiri,” demikian nasehatnya pada mereka, yang mengenal Dheni sebagai sosok yang *down to earth*, ulet, dan mudah akrab dengan semua orang. Menurut Dheni, dengan melihat kultur di negara-negara maju kita dapat mempelajari prinsip-prinsip mereka dan memprediksi bagaimana Indonesia akan berkembang nantinya. “Untuk bisa tahu bagaimana Indonesia di masa depan, cara paling mudah adalah dengan melihatnya sendiri di negara yang sudah maju.”

Dheni juga menanamkan semangat mengejar ilmu sampai ke luar batas negara dalam keluarganya. Dikenal sebagai sosok yang memprioritaskan keluarga, di antara semua kesibukannya pemegang gelar master di bidang Economy Development dari Universitas Gajah Mada ini selalu menyediakan waktu untuk istri dan ketiga putrinya. Bagi ketiga putri yang sangat dicintainya inilah Dheni pun mewariskan semangatnya untuk terus belajar, terus menumbuhkan rasa ingin tahu dan keberanian untuk mencapai jawabannya, serta tidak takut melanglang buana; sembari tak lelah membimbing mereka.

“Dulu saya orang yang sangat ingin tahu dan mencoba-coba sendiri. Kadang saya menabrak tembok dan harus mengulang lagi. Sekarang, selain mendorong mereka untuk maju, saya juga menjaga jangan sampai mereka mengulangi kesalahan yang sama,” ungkapnyanya. Ia juga menerapkan hal yang sama bagi anak-anak didik maupun pegawai-pegawainya.

Jika ditanya mengenai visinya untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, jawabannya pun tak jauh dari dua hal yang teramat disukainya: belajar dan mengajar. “Saya ingin kita memiliki lebih banyak generasi penerus yang optimis, penuh dedikasi, dan memiliki rasa keingintahuan tinggi. Jangan pernah berhenti belajar. Siapapun yang berhenti belajar, maka jiwanya telah mati. Siapapun yang selalu belajar, maka jiwanya akan selalu muda, tak peduli usianya dua puluh, atau delapan puluh tahun,” pungkasnya mengakhiri cerita.

(Supriyadi, Abdur Razaq Aghni)



Dirjen Bea dan Cukai meresmikan KPPBC TMP Cikarang

Pembentukan KPPBC TMP Cikarang Upaya Mendukung Industri dan Meningkatkan Pelayanan

Beberapa kantor baru yang telah diresmikan (*soft launching*) awal Juli 2015 yang lalu, memiliki dua ciri khas, pertama terdapat kantor yang letaknya tepat di daerah industri, dan yang kedua juga terdapat kantor yang letaknya di daerah yang menjadi prioritas pertumbuhan nasional. Pembentukan kantor baru tersebut memang merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mendukung industri di dalam negeri dan mendekatkan langsung kepada pengguna jasa dalam rangka meningkatkan pelayanan.

Menurut Dirjen Bea dan Cukai, **Heru Pambudi** ketika meresmikan (*grand launching*) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) Cikarang (11/08) bahwa KPPBC TMP Cikarang merupakan pemekaran kantor dari KPPBC Bekasi yang selama ini melayani 458 fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Kantor baru tersebut diharapkan



Dirjen beserta rombongan meninjau Dry Port Cikarang

dapat memberikan kemudahan dan pelayanan yang maksimal bagi dunia industri.

Pembentukan KPPBC TMP Cikarang merupakan salah satu strategi DJBC sesuai dengan misinya sebagai *trade facilitation, industrial assistance, border management, community protection*, dan *revenue collection* yang senantiasa memfasilitasi perdagangan dan industri. “Kehadiran KPPBC TMP Cikarang ini menunjukkan bagaimana bea cukai dalam rangka mendukung industri dan semakin dekat dengan

perusahaan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik,” ujar Heru Pambudi.

Dirjen Bea Cukai juga menyampaikan bahwa baru-baru ini DJBC meresmikan lima kantor pelayanan secara berturut-turut yaitu Kantor Kuala Namu, peningkatan tipologi Kantor Soekarno Hatta menjadi Kantor Pelayanan Utama (KPU), Kantor Cikarang, Kantor Semarang, Kantor Sidoarjo dan Kantor Denpasar. Diantara kelima kantor tersebut ada tiga kantor yang memiliki tipekal yang sama yaitu

Kantor Sidoarjo, Kantor Semarang dan Kantor Cikarang yaitu bagaimana DJBC menjawab kebutuhan industri untuk mendapatkan layanan yang lebih baik dari Kementerian Keuangan khususnya dari DJBC sehingga perusahaan dapat lebih kompetitif.

Sebelum dilakukan pemekaran, KPPBC TMP A Bekasi melayani hampir 30% dari seluruh fasilitas TPB di Indonesia yaitu Kawasan Berikat dan Gudang Berikat yang meliputi industri elektronika, pendukung otomotif, ban, garmen, mainan anak-anak, logam dan menghasilkan ribuan industri penunjang dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Industri ini juga menyerap kurang lebih 400 ribu tenaga kerja di wilayah Kabupaten/Kota Bekasi termasuk subkontraktor pendukung sebagai *multiplier effects* dari kegiatan Kawasan Berikat.

Menurut Kepala KPPBC TMP Cikarang **Djanurindo Wibowo**, kantor yang meliputi wilayah kerja Kabupaten Bekasi bagian utara, Cikarang Barat, Tambun Selatan dan Cibitung ini akan melayani dan mengawasi 144 penerima fasilitas TPB, baik yang memperoleh fasilitas fiskal berupa penangguhan bea

masuk, pembebasan cukai dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. “Kantor Bea Cukai Cikarang akan melayani dan mengawasi kegiatan impor dan ekspor pada fasilitas *dryport* yang telah ditetapkan pemerintah sebagai pelabuhan internasional darat,” ujarnya.

Lebih jauh Djanurindo menjelaskan, dengan adanya fasilitas pelabuhan internasional darat di Cikarang ini diharapkan mampu mendorong arus barang dan menekan angka *dwelling time* dan tentunya mampu menekan biaya logistik yang selama ini masih menjadi salah satu penyebab tingginya biaya ekonomi secara nasional.

Hal senada juga disampaikan Managing Director PT Cikarang Inland Port **Benny Woenardi**. Menurutnya kehadiran KPPBC TMP Cikarang yang berlokasi di dalam *Dry Port* diharapkan dapat memudahkan *customer*, meningkatkan konektivitas antara *hub* dan *spoke*, meningkatkan fasilitas dan layanan demi kelancaran arus barang dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing logistik nasional.

Benny menjelaskan, dengan melalui *dry port*, angka *dwelling time*

di pelabuhan dapat ditekan hingga kurang dari 3 hari. Total waktu tunggu juga menjadi lebih pendek yang membuat banyak perusahaan di Tangerang dan Cakung lebih memilih pengiriman melalui Cikarang Dry Port (CDP) daripada lewat Tanjung Priok. “Padahal, secara jarak, mereka lebih dekat ke Tanjung Priok, namun secara hitung-hitungan bisnis, mereka lebih memilih untuk melalui CDP karena lebih cepat,” kata Benny.

Dengan adanya *dryport* konektivitas antara industri yang ada di koridor timur Jakarta ke pelabuhan Tanjung Priok dapat menjadi lebih baik. Dengan adanya konsep *hub and spoke* yang menghubungkan pelabuhan dengan *dry port*, total biaya logistik dapat ditekan yang pada akhirnya meningkatkan daya saing logistik dan industri nasional. “Jadi pelabuhan Tanjung Priok hanya berfungsi sebagai *hub* atau tempat bongkar muat barang, sedangkan proses kepabeanan dan pemeriksaan karantina dilakukan di pelabuhan kering (*dry port*). Dengan demikian proses bongkar muat barang mulai dari kapal hingga keluar dari pelabuhan bisa lebih cepat,” jelasnya.

(Piter, Supriadi, MPR)

HUT KPU Bea Cukai Tanjung Priok

“Mengabdikan Pada Negeri, Bersinergi Untuk Karya dan Citra yang Lebih Baik” merupakan tema yang diusung oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok saat memperingati hari jadinya yang ke-8 tahun.

Kepala KPU Bea Cukai Tanjung Priok, R. Fajar Donny menjelaskan saat acara yang bertempat di Aula

lantai 5 Gedung KPU Bea Cukai Tanjung Priok tanggal 30 Juli 2015, pada prinsipnya bahwa ia beserta pendahulu-pendahulunya yang pernah menjadi Kepala KPU Bea Cukai Tanjung Priok sudah melakukan pengabdian kepada negeri ini dan berusaha melakukan pelayanan yang terbaik. Selain itu juga melakukan pengawasan terhadap pengguna jasa.





“Akan tetapi yang terpenting kita melakukan sinergi dengan seluruh komponen untuk menghasilkan karya cipta yang lebih baik.”

Sesuai dengan visi KPU adalah menjadikan kantor percontohan dalam kinerja dan citra maka berbagai upaya dilakukan terutama bagi pengguna jasa antara lain dalam bentuk inovasi-inovasi. Bertepatan sewindu KPU Bea Cukai Tanjung Priok, Donny mengumumkan peluncuran website KPU Bea Cukai Tanjung Priok terbaru yang telah sesuai dengan instruksi dalam Peraturan Menteri Keuangan No.50 Tahun 2014.

Dalam kesempatan yang sama, Donny melaunching layanan online yang disebut SIPRIOK yang merupakan singkatan dari Sistem Pelayanan Perijinan Online Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok. Ada 3 layanan baru yang diberikan KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, yaitu layanan Empty Container, layanan Returnable Package, dan layanan Stripping Minuman Mengandung Etil Alkohol.

Dengan adanya SIPRIOK ini masyarakat pengguna jasa tidak perlu lagi datang ke kantor, hanya dengan menggunakan gadgetnya, baik smartphone atau computer, dimana saja bisa langsung men-cek apakah permohonannya diterima atau tidak. Dengan sifat ‘real time’ itu maka diharapkan dapat lebih memudahkan pengguna jasa dan untuk sementara ini basisnya baru android.

Kedepannya akan ditambahkan

15 layanan online. Saat ini KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok memberikan 144 layanan dimana 22 layanan sudah bersertifikat ISO 9001:2008. “Tiap tahun akan kami tambahkan, tahun ini sudah kami siapkan 10 layanan yang akan di-iso-kan disamping layanan-layanan itu juga di-online-kan.”

Layanan-layanan itu tak lain tak bukan ditujukan untuk mempercepat proses pelayanan khususnya terkait percepatan *dwelling time*. “Dengan adanya layanan online ini kami harap akan mengurangi waktu *dwelling time*,” ujar Donny.

Dalam memeriahkan suasana peringatan HUT ke-8, KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok memberikan apresiasi terhadap pengguna jasa yang telah bersinergi dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun kategori/nominasi yang diberikan penghargaan adalah untuk Importir MITA Prioritas dimenangkan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Importir MITA non Prioritas

dimenangkan oleh Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Importir non MITA dimenangkan oleh Toyota Tsusho Indonesia, Ekspertir dimenangkan oleh PT. Asmo Indonesia, PPJK dimenangkan oleh PT. Danzas Sarana Perkasa, dan untuk TPS dimenangkan oleh PT. Dwipa Manunggal Kontena.

Selain itu apresiasi terhadap pegawai yang dianggap telah berprestasi melaksanakan tugas dengan baik, yaitu Gatot Sugeng Wibowo, Anton Martin, Heykal Hafrezal, Sigit Tjahjadi, dan Johan Rahmansyah. Juga ada perlombaan antar bagian KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok yang dimenangkan oleh Bagian Umum dengan unggulan aplikasi E-Cuti.

Keesokan harinya tepatnya Jumat, 31 Juli 2015 KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok mengadakan kegiatan olahraga bersama dan perlombaan seni antar bidang dan pembagian *door prize*.

**(Desi Prawita, Andi T.S.,
Yosellin Marsintauli)**



Sharing Session.
Untuk mengetahui permasalahan pelayanan dan kendala para pengguna jasa terhadap layanan bea cukai, KPPBC TMP A Jakarta mengadakan acara *sharing session* di JIExpo Kemayoran



Coffee Morning & Sharing Session

Peningkatan Layanan

Tingkatkan layanan, KPPBC TMP A Jakarta Selenggarakan *Coffee Morning and Sharing Session*

Memasuki bulan Agustus merupakan masa semester kedua bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melakukan peningkatan kinerja sekaligus mengevaluasi hasil kerja pada semester satu. Banyak hal yang harus diperhatikan khususnya pemenuhan target yang belum tercapai dan bagaimana melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap industri dalam negeri saat ini.

Untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan dan pengawasan, sekaligus memenuhi target penerimaan yang masih belum terpenuhi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A (KPPBC TMP) Jakarta, mengadakan *coffee morning* dan *sharing session* dengan seluruh *stakeholder* yang ada di wilayah kerjanya.

Acara yang berlangsung pada 12 Agustus 2015 di Gedung Niaga Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta tersebut, mendapat sambutan sangat antusias

dari seluruh *stakeholder* yang hadir, karena selain dapat menyampaikan kendala yang masih dihadapi mereka saat ini, para pengusaha juga dapat meminta masukan dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta, **Oza Olivia**, yang hadir sebagai nara sumber pada acara tersebut.

Pada sambutannya Oza mengatakan, kegiatan seperti ini merupakan kegiatan yang paling dinanti oleh pengguna jasa untuk bisa menyampaikan semua keluhan maupun masukan kepada DJBC.

Selain itu, sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC yang memiliki fungsi *trade facilitator* harus memberikan pelayanan yang prima sebagai bentuk dukungan dan perhatian kepada industri dalam negeri, yang salah satunya dengan memberikan fasilitas, yaitu fasilitas kawasan berikat, KITE, gudang berikat, dan lain sebagainya.

“Sebagai *revenue collector*, kami dibebankan penerimaan untuk negara sebanyak Rp.195 triliun atau sepertiga dari penerimaan APBN

tahun ini. Untuk itu kami berharap kepada para pengusaha yang juga merupakan tulang punggung bangsa ini, dapat mendukung semua upaya yang kami berikan dengan memberikan sumbangsuhnya bagi penerimaan negara,” ujar Oza.

Masih menurut Oza, DJBC yang juga memiliki fungsi sebagai garda terdepan untuk melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang ilegal, dituntut untuk terus melakukan inovasi dalam melakukan pengawasan maupun pelayanan peraturan titipan dari beberapa kementerian. “kami adalah pelayan bagi masyarakat, untuk itu kami meminta masukan yang positif dari para pengusaha untuk perbaikan pelayanan dan pengawasan.” Ujarnya.

Akan hal ini juga diamini oleh Kepala KPPBC TMP A Jakarta, **Padmoyo Triwikanto** yang pada sambutan dan pemaparannya mengatakan di tengah melemahnya perekonomian saat ini, para pengusaha diharapkan dapat lebih kompetitif dalam berusaha, karena

kontribusi pengusaha sangat dibutuhkan untuk dapat mewujudkan semua harapan dan hal-hal yang telah ditentukan.

“Saat ini wilayah kerja KPPBC TMPA Jakarta sebagian telah diserahkan ke KPPBC Marunda, hal ini tidak lain demi kepentingan pengusaha agar mereka tidak jauh untuk melakukan pelayanan dengan KPPBC. Sehingga wilayah kerja yang ada saat ini meliputi Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat.”
Tutur Padmoyo.

Terkait dengan target penerimaan, Padmoyo mengakui kalau hingga 31 Juli 2015 untuk target bea masuk baru mencapai 48 persen yang seharusnya 51 persen, sedangkan cukai baru mencapai 55 persen yang seharusnya 58 persen. Untuk itu, di sisa lima bulan kedepan ini diharapkan dapat memenuhi semua target penerimaan yang telah ditentukan. “Saya sangat bangga dan



berterimakasih sekali kepada seluruh pengguna jasa di wilayah kerja KPPBC TMP A Jakarta yang sangat patuh dalam menjalankan peraturan dan selalu memberikan masukan yang positif untuk perbaikan pelayanan dan pengawasan. Oleh karena itu. Kami yakin para pengusaha juga akan mampu memenuhi dan meningkatkan produktifitasnya sehingga target kami bisa tercapai,” ungkap Padmoyo.

Diakhir pemaparannya, Padmoyo meminta kepada seluruh pengguna jasa untuk memberikan nilai sekaligus masukan terhadap semua layanan yang diberikan KPPBC TMPA Jakarta melalui survey kepuasan pengguna

jasa yang akan diadakan pada 19 Agustus 2015.” Jika kami meminta pengusaha untuk membantu kami dalam hal pencapaian target penerimaan, pihak pengusaha juga berhak untuk menilai pelayanan yang kami berikan selama ini,” tandas Padmoyo.

Akhirnya setelah sesi tanya jawab dan testimony dari pengguna jasa, acara coffee morning dan sharing session diakhiri foto bersama dengan para pejabat dilingkungan Kanwil DJBC Jakarta dan pejabat dilingkungan KPPBC TMP A Jakarta.

(Supriyadi, Andi T.S.,
Okta Anang Diantama)

DJBC Buka Pelatihan Dog Handler dan Anjing Pelacak

Untuk tahun anggaran 2015, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali membuka pelatihan pembentukan pawang anjing (Dog Handler) dan anjing pelacak (K-9) DJBC. Pelatihan yang berlangsung pada 19 Agustus 2015 tersebut, dibuka langsung oleh Direktur Penyidikan dan Penindakan (P2) DJBC, **Harry Mulya**, dan diikuti oleh 10 orang pegawai dari beberapa kantor di Indonesia.

Adapun kantor-kantor yang mengirimkan perwakilannya adalah, dua orang dari KPPBC Amamapare, selebihnya satu orang dari KPPBC Merak, BPIB Cempaka Putih (Jakarta), KPPBC Tembilahan, KPPBC Kediri, KPPBC Kaimana, KPU Batam, KPPBC Ambon, dan KPPBC Sorong.



Dog Handler : Direktur P2, Harry Mulya secara resmi membuka pelatihan Dog Handler dan anjing pelacak yang diikuti oleh 10 orang pegawai DJBC.



Dari kesepuluh peserta kali ini, satu orang diikuti oleh wanita yang merupakan perwakilan dari KPPBC Kaimana.

Pembukaan diklat Dog Handler dan anjing pelacak yang berlangsung di Bumi Perkemahan Pramuka dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur ini, juga dihadiri oleh Kepala Bagian Kepegawaian DJBC, Sony Subagyo, Kasubdit Narkotika, Eko Dharmanto, Kasubdit Penindakan, Ahmad Rofiq, dan pejabat dari Badan Narkotika Nasional.

Pada sambutannya Direktur P2 mengatakan, saat ini Indonesia sudah menjadi darurat narkoba karena sampai sekarang jumlah pengguna narkoba mencapai 4,2 juta orang. Untuk itu di tengah keterbatasan SDM dan sarana prasarana yang ada, menjadi tantangan bagi kita semua untuk dapat memberantas narkoba.

“Tim K-9 kita yaitu Andi Tara Sihotang dengan anjing pelacak yang bernama Gerrad belum lama ini berhasil menegah 4 kilogram shabu dan beberapa puluh butir pil yang masuk dalam psikotropika melalui barang kiriman dari China di Kantor Pos Lalu Bea Bandara Soekarno Hatta. Ini patut dibanggakan karena prestasi K-9 semakin nyata. Untuk itu berbanggalah jika bisa menjadi

Dog Handler karena diseluruh dunia unit anjing pelacak merupakan kebanggaan dari tiap-tiap negara,” ujar Harry Mulya.

Masih menurutnya, Indonesia kini menjadi pusat pelatihan Dog Handler dan anjing pelacak untuk wilayah ASEAN karena memiliki perlengkapan yang paling lengkap. Untuk itu unit K-9 nantinya akan berkolaborasi dengan unit BNN untuk melakukan penindakan di luar wilayah pabean. Dan kedepan nanti, unit anjing pelacak bukan hanya sebagai deteksi awal tapi juga dapat dijadikan sebagai alat tindak. “Diharapkan semua siswa dapat mengikuti pelatihan dengan baik hingga selesai nanti. Menjadi Dog Handler adalah suatu kebanggaan tersendiri karena dari sekian ribu pegawai DJBC hanya beberapa saja yang lulus seleksi untuk menjadi Dog Handler,” pungkas Harry Mulya.

Sementara itu menurut Kepala Sub Direktorat Narkotika, Eko Dharmanto, hingga saat ini prestasi unit anjing pelacak sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dari hasil tegahan yang dalam waktu satu minggu bisa menegah narkoba sebanyak 6 kali. Untuk itu, kedepan prioritas pengawasan tidak hanya pada barang bawaan

namun akan diroling sesuai dengan siklus pemasukan narkoba, dan ini membutuhkan peran Dog Handler yang handal untuk menjalankan tugas tersebut.

“Salah satu kejahatan extraordinary yang dihadapi oleh Dog Handler adalah narkoba, jadi berbanggalah para siswa sekalian kalau dapat diterima dan mengikuti pelatihan ini. Dari 13 ribu lebih pegawai DJBC pada tahun ini hanya 10 orang saja yang terpilih untuk menjalankan tugas mulia dari negara, yaitu memberantas masuknya narkoba,” tutur Eko.

Lebih lanjut Eko menjelaskan, selama empat bulan ini atau terhitung sejak 19 Agustus 2015 hingga 5 Desember 2015 nanti, para siswa akan dilatih oleh instruktur yang sudah berpengalaman, ditambah lagi pada pertengahan pelatihan nanti akan datang instruktur dari Australia yang pada tahun ini menyumbangkan 5 ekor anjing untuk dijadikan anjing pelacak. Dan, pelatihan ini benar-benar mencetak unit K-9 dimana Dog Handler dan anjing pelacak akan dibentuk menjadi unit yang handal khususnya untuk mendeteksi masuknya barang narkoba dan psikotropika.

(Supriyadi, Andi T.S)



Mulai 14 Agustus 2015, CCP Diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok

Container Control Programme (CCP) bertujuan untuk meningkatkan pengawasan pergerakan kontainer laut yang efektif guna memastikan keamanan rantai pasokan internasional, bukan hanya mencegah peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang, senjata, sumber daya alam, barang palsu serta tindakan kejahatan illegal lainnya yang menggunakan kontainer, namun program ini juga untuk memfasilitasi perdagangan yang legal dengan memperhatikan WCO SAFE Framework of Standards.

Di tahun 2015, CCP telah dilaksanakan dan beroperasi di 20 negara dan 32 negara lainnya masih dalam proses persiapan pelaksanaan di seluruh kawasan regional termasuk kawasan Asia Tenggara. Untuk kawasan Asia Tenggara, yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand dan Vietnam. Setelah pada tahun 2004 program ini pertama kali diluncurkan dan dilaksanakan di 2 negara yaitu Ekuador dan Senegal. Selanjutnya program ini diperluas dengan melibatkan



■ **Mark Stanley**
Regional Coordinator CCP
(SE Asia)

negara ASEAN untuk berpartisipasi menerapkan program ini, antara lain; Myanmar, Laos dan Kamboja.

Di Indonesia, mulai Agustus 2015 penerapannya mulai dilaksanakan. Sebagai tempat pertama penerapan program dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Priok. Tentunya berbagai persiapan telah dilakukan menyambut penerapan CCP, baik SDM maupun sarana dan prasarannya. Dan

bertempat di Auditorium Lantai I Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok CCP telah resmi diimplementasikan di KPU Tanjung Priok pada Jumat, 14 Agustus 2015, yang peresmianya dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Kepabean Internasional, dan dihadiri oleh pihak Counsellor to the Ambassador – US Embassy, Counsellor to the Ambassador – Canadian Embassy, Canadian Border Services Agency (CBSA), UNODC, dan expert trainer. Sekaligus meresmikan Container Control Unit (CCU) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok yang berlokasi di lantai 5.

Seperti ditegaskan Robert L Marbun dalam sambutannya, pelatihan ini sangat bermanfaat bagi DJBC, dari teori hingga berbagi pengalaman terutama berkaitan dengan penerapan manajemen resiko. Ia yakin pelatihan ini bisa disampaikan lagi kepada para rekan-rekan lain yang bertugas. Tidak hanya secara teori tapi juga secara praktek.

Pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan petugas mengawasi pergerakan kontainer. “Melalui pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan petugas dalam menjalankan tugasnya. Semoga kerjasama ini dapat ditingkatkan dan kami akan lebih meningkatkan lagi kerjasama yang serupa.”

Ha senada juga disampaikan , Counsellor to the Ambassador – Canadian Embassy, Miller, pelatihan ini bisa menjadi salah satu cara mencegah masuknya berbagai barang-barang ilegal yang datang dengan memanfaatkan fasilitas perdagangan internasional karena itu lanjut Miller, perlunya kerjasama untuk membendung kegiatan ilegal dalam

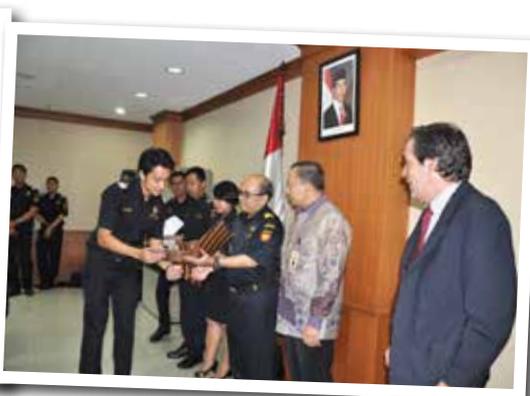
. Sejahter ini pihaknya telah membantu 52 negara dimana 27 negara dibantu secara operasional, termasuk Indonesia, dan negara lainnya dibantu melalui pendanaan.

UNODC dan instansi kepabeanan lainnya telah menjalankan program ini sejak tahun 2004. “Kita bekerjasama dengan Indonesia sejak tahun 2014 termasuk di ASEAN. Kami memberikan pelatihan dan penyuluhan mengenai program ini. Untuk Indonesia, saya rasa sarana dan prasarana yang ada di Tanjung Priok sudah cukup baik. Ada beberapa alat yang canggih yang bisa mengidentifikasi tindak kejahatan internasional. Dan SDM-nya pun juga baik. Saya yakin bisa menerapkan hasil dari pelatihan ini. Saat berlatih mereka

internasional termasuk penyelundupan senjata pemusnah massal, nuklir dan lain sebagainya, baik yang datang ke Indonesia atau yang masuk ke area ASEAN,” ungkap Mark.

Kesiapan KPU Tanjung Priok

WBC juga berkesempatan mewawancarai Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, **R. Fadjar Donny**, terkait kesiapan kantornya dalam penerapan CCP. Persiapan implementasi CCP sudah ungkapnya, dilaksanakan sejak penandatanganan MoU pada 18 Februari 2015. Indonesia dalam hal ini DJBC berkomitmen dengan UNODC dalam hal pelaksanaan CCP. DJBC telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak



kontainer melalui penerapan CCP.

Penyerahan sertifikat kepada 15 orang peserta yang telah training menjadi bagian dari rangkaian acara, termasuk penyerahan plakat dan cinderamata kepada para instruktur dan perwakilan dari Kedubes Canada dan USA. Kemudian dilanjutkan dengan peresmian ruang *Container Control Unit (CCU)* yang berada di lantai 5 dengan pemotongan pita bersama tanda mulai digunakannya CCU diakhiri dengan sesi foto bersama.

Dalam kesempatan wawancara dengan WBC, **Mark Stanley** dari UNODC yang merupakan Regional Coordinator CCP (SE Asia) mengatakan, UNODC berharap bisa dapat membantu kapasitas petugas kepabeanan untuk mengidentifikasi perdagangan ilegal dalam kontainer yang menjadi bagian dari *suplay chain*

sangat bersemangat dan termotivasi untuk mengikuti pelatihan. Saya yakin mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan saya merasa beruntung bisa berbagi pengalaman dengan petugas yang baik dan profesional ini,” imbuh Mark.

Dalam pelatihan ini, lanjut Mark, materi yang disampaikan meliputi pemanfaatan data komersil sebelum kedatangan kontainer, sehingga proses seleksi kontainer bisa lebih cepat dan tidak mengganggu kegiatan ekonomi terutama kegiatan di pelabuhan, tetapi tetap fokus pada pengawasan kontainer. “Saya harap dengan penerapan CCP memberikan manfaat besar khususnya dalam mengidentifikasi berbagai tindak kejahatan internasional yang datang ke Indonesia. Karena pengawasan dengan cara ini bisa melindungi Indonesia dari berbagai tindak kejahatan

UNOD, WCO dan pihak terkait lainnya di dalam maupun di luar negeri. Selain itu untuk mempersiapkan analis CCU yang berkompeten, serangkaian program capacity building juga telah dilakukan berupa seleksi pegawai untuk menjadi analis CCU, *teoritical training* dan terakhir *practical training*. Dan KPU Tanjung Priok telah mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk implementasi CCP, sehingga CCU saat ini telah siap beroperasi untuk mendukung misi pelaksanaan pengawasan yang efektif.

“KPU Tanjung Priok juga sudah siap menjalankan CCP, ruangan yang representatif, perangkat komputer beserta jaringan yang diperlukan juga sudah dipersiapkan, perlengkapan kerja unit juga sudah dipenuhi, jadi pada dasarnya sarana dan prasarana untuk CCU telah siap, namun kami masih menunggu penempatan tugas

definitif pegawai – pegawai dari kantor selain KPU Tanjung Priok yang telah mendapatkan pelatihan di training – training khusus CCU,” ungkap Fajar Donny.

Lebih lanjut ia menjelaskan, CCU beroperasi dengan 8 analis, dan memang saat ini belum semuanya ditempatkan secara definitif di KPU Tanjung Priok, namun secara unit CCU telah beroperasi karena sebagian pegawai yang telah mendapatkan pelatihan CCU bertugas di Kantor – kantor Bea dan Cukai di daerah Jabodetabek. . CCP adalah sebuah program yang dijalankan oleh unit kerja CCU dengan anggota 8 orang analis, unit tersebut menjalankan fungsi analisa intelijen yang secara organik unit tersebut merupakan bagian dari Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU Tanjung Priok. Untuk implementasinya, 1 pelabuhan memang hanya dibutuhkan 1 unit CCU, “Semoga kedepannya CCU juga dapat diimplementasikan di kantor pelayanan lain sehingga kinerja unit pengawasan dapat lebih maksimal,” imbuh Fajar Donny.

Mengenai kuantitas analis CCU yang ditugaskan di KPU Tanjung Priok, Fajar Donny menyatakan, dengan volume importasi dan eksportasi di pelabuhan Tanjung Priok yang begitu tinggi, pengawasan harus

mengedepankan sistem yang efektif, dan ditunjang dengan kemampuan pegawai yang berkompeten. Dengan kualifikasi dan kompetensi pegawai yang menjadi analis CCU dari hasil pelatihan CCP dan pengalaman para personil ini sebelumnya akan sangat mendukung fungsi pengawasan yang telah berjalan optimal di KPU Tanjung Priok, dan jumlah 8 analis CCU tersebut telah diperhitungkan secara matang untuk dapat menjalankan fungsi analisa impor dan ekspor di KPU Tanjung Priok.

“CCP pada prinsipnya lebih terfokus kepada penanganan kejahatan transnasional yang menggunakan moda kontainer sebagai transportasi barang – barang terlarang/pembatasan, dan dalam menjalankan fungsinya pola hubungan antar instansi terkait yang akan dijalankan oleh CCP akan mengikuti dan selaras dengan pola yang telah berjalan selama ini,” ujarnya mengenai pola kerjasama dengan instansi lain terkait penerapan CCP.

Tentunya, ia sebagai Kepala Kantor, memiliki harapan besar kepada pegawai yang telah mempunyai kemampuan analisa intelijen dalam program CCP tersebut dapat menjadi analis yang berkompeten, berkemampuan mengikuti perkembangan modus-modus terbaru



■ R. Fajar Donny

Kepala KPU Bea dan Cukai
Tanjung Priok

dari kejahatan transnasional, dan mempunyai jaringan informasi internasional melalui CCP, namun dapat bertanggung jawab terhadap kepentingan nasional, mampu menjaga etika dan keamanan pertukaran informasi.

“Sebagai bagian unit pengawasan, kami berharap CCU dapat mendukung sistem kerja yang telah berjalan baik sebelumnya, dalam mengolah berbagai macam informasi terkait kegiatan ekspor dan impor sehingga dapat diperoleh informasi yang tepat dan akurat. Hal tersebut akan membantu mempercepat proses *customs clearance* dan mengurangi *dwelling time* di pelabuhan Tanjung Priok”, pungkasnya.

(Ariessuryantini, Andi T.S., MPR)

PENGAWASAN DJBC



Bea Cukai Musnahkan Rokok Ilegal, Teguh NPP dan Barang Larangan Lainnya

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, memimpin pemusnahan barang hasil penindakan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur I selama kurun waktu smester I di tahun 2015, pada Selasa, 14 Juli 2015. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur I Rahmat Subagio, dan Direktur Penindakan dan Penyidikan Harry Mulya.

Dalam sambutannya Menteri Keuangan menginstruksikan kepada DJBC untuk menjamin bahwa



seluruh rokok yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah rokok yang diproduksi dan didistribusikan secara legal dan telah dipenuhi seluruh kewajiban cukainya. Instruksi tersebut diberikan dalam rangka merespon tren peredaran rokok ilegal yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Disamping menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah akibat tidak dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pembayaran cukai, juga berpotensi mematikan industri rokok nasional sebagai akibat adanya persaingan yang tidak sehat.

Upaya pemberantasan perdagangan rokok ilegal oleh Kanwil DJBC Jatim I pada semester I T.A. 2015 berhasil melakukan penegahan terhadap Sigaret Kretek Mesin (SKM) sejumlah lebih dari 28 juta batang dengan potensi kerugian mencapai Rp 10.102.400.000,- (sepuluh milyar seratus dua juta empat ratus ribu rupiah). Modus pelanggaran berupa penggunaan pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai yang tidak sesuai haknya, pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, dan rokok yang tidak dilekati pita cukai (rokok polos).

Di samping rokok ilegal, Kanwil DJBC Jatim I pada periode yang sama juga melakukan berbagai upaya dalam rangka mengamankan hak-hak penerimaan negara serta melindungi masyarakat Indonesia dari masuknya barang-barang yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan moral bangsa. Hasil

yang dicapai antara lain penindakan terhadap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) dengan jenis barang berupa 140 butir ekstasi, 25 gram shabu, dan 36 butir xanax (sejenis psikotropika). Hal ini merupakan bagian dari upaya mendukung pencegahan peredaran narkoba yang penggunaannya terus menunjukkan tren peningkatan sebagaimana hasil penelitian Puslitkes UI dan BNN yang menunjukkan bahwa pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2014 sudah mencapai angka 4,1 juta dan terus meningkat di tahun 2015 hingga mencapai sekitar 4,33 juta. Hal ini tentunya sangat krusial mengingat penyalahgunaan narkoba berakibat rusaknya kesehatan dan moral generasi penerus bangsa.

Kanwil DJBC Jatim I juga melakukan penegahan atas beberapa komoditi yang merupakan barang yang diatur tata niaga impor dan/ atau ekspornya serta barang kena cukai lainnya yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, antara lain berupa barang-barang pornografi (sex toys), barang ekspor yang dilindungi dan dibatasi (koral dari genus *Platygyra* dan batu kalsedon), barang larangan/pembatasan (Iartas) lainnya (misalnya : samurai, panah, dan pencetak peluru), dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak dilekati pita cukai.

Terhadap hasil-hasil penindakan tersebut telah ditindaklanjuti dimana sebagian telah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) untuk

dimusnahkan dan/atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda, sebagian lainnya masih dalam proses penelitian dan/atau penyidikan.

**(Teguh Yanuwiarso,
Kanwil DJBC Jatim I)**

Bea Cukai Gagal Ekspor Ilegal Sumber Daya Alam

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, berhasil menggagalkan upaya ekspor ilegal beberapa sumber daya alam. Komoditas yang diselundupkan itu berupa satwa langka yang dilindungi, kayu, rotan, dan bijih merkuri.

Dalam kurun waktu 8 Bulan, sebanyak 27 Kontainer dengan potensi kerugian negara hampir 33 Milyar berhasil diselamatkan oleh petugas bea cukai bekerja sama dengan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta. Seperti diungkapkan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada rilis di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu, 12 Agustus 2015 bahwa dari hasil analisis intelijen ditemukan adanya indikasi pelanggaran.

Bersama petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta, petugas Bea dan Cukai memeriksa kontainer yang diduga melanggar. Hasilnya ditemukan cangkang kerang kepala kambing (*Cassis cornuta*) 15 ton, cangkang kowok 1,6 Kg, dan kerang rough pen 1,3 Pk, dalam satu kontainer ukuran

40 kaki dengan nilai lebih dari 20 Milyar. “Rencananya mau diekspor ke Cina,” ucap Bambang.

Sedangkan temuan kayu dan rotan disimpan di 24 kontainer yang berasal dari 12 perusahaan. Bambang menyebutkan potensi kerugian negara dari temuan ini sebesar Rp 4,2 miliar. Petugas kedapatan jumlah dan jenis barang rotan asal dengan berbagai ukuran sebanyak 11 kontainer ukuran 40 Feet, rotan setengah jadi sebanyak 1 kontainer 40 Feet, kayu gelondongan dengan berbagai ukuran sebanyak 9 kontainer ukuran 20 Feet dan 3 kontainer ukuran 40 Feet. Kayu dan rotan yang berasal dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua bakal diekspor ke Hong Kong, Cina, Sri Lanka, Amerika Serikat, Jerman, dan Taiwan.

Selain itu petugas juga menggagalkan upaya penyelundupan dua kontainer berukuran 20 kaki biji merkuri. Berdasarkan laporan dokumen, pelaku menggunakan nama perusahaan lain sebagai eksportir dan menyebut barang tersebut sebagai bahan kimia bubuk (silica powder). Nilai biji merkuri sebanyak 40 ton mencapai Rp 8,3 miliar.

Modus-modus yang dipakai oleh para pelaku tidak berbeda, yaitu menggunakan nama perusahaan lain untuk mengelabui petugas. Selain itu, pada dokumen pemberitahuan terdapat perbedaan uraian barang. Untuk ekspor cangkang, misalnya, pelaku memasukkan barang yang tidak umum namun diklasifikasikan pada pos tarif subpos koral dan cangkang moluska.

Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menjelaskan, tiga barang tersebut terlarang untuk diekspor. Cangkang kerang kepala kambing merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. “Kami apresiasi tindakan Bea-Cukai ini karena selaras dengan program kami yang ingin meningkatkan kawasan konservasi,” ucapnya.

Ia menyebutkan ada 525 unit kawasan konservasi yang di

dalamnya hidup satwa langka. Selain itu, ada 25 jenis spesies yang terancam punah. Kementerian Lingkungan Hidup, menurut Siti, ingin mendongkrak populasi satwa langka sebesar 10 persen. “Kalau dari kasus kami mencatat ada 118 upaya penyelundupan dan baru selesai 78 persen,” katanya.

Sedangkan untuk kayu dan rotan, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.35/MDAG/PER/11/2011 tentang ketentuan ekspor rotan, disebutkan rotan setengah jadi dilarang untuk diekspor.

Menteri Siti menduga biji merkuri berasal dari penambangan ilegal dan berpotensi melanggar UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. “Indonesia melalui Konvensi Minamata 2013 sepakat mengurangi penggunaan merkuri,” ucapnya.

Sementara itu, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi didampingi Kepala Bea dan Cukai Tanjung Priok Fadjar Donny mengatakan, pihaknya tengah memproses kasus penyelundupan tersebut. Untuk ilegal logging sedang di proses. Untuk barang bukti cangkang kerang kepala kambing, nanti akan diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Cq Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta.

Heru mengungkapkan,

sebenarnya kerugian imaterial yang diakibatkan dari aktivitas ini lebih besar dari kerugian materi yang ada. “Kami bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengungkap kasus ini secara lebih jelas. Para pemilik barang menggunakan nama eksportir lain. Ini yang sedang kami dalam untuk segera diproses,” kata Heru menegaskan.

(Desi Prawita)

Bea Cukai Teluk Nibung Lagi-Lagi Gagal Penyelundupan Shabu

Dalam beberapa bulan terakhir, KPPBC TMP C Teluk Nibung berhasil menggagalkan beberapa upaya penyelundupan Shabu/ Methamphetamine melalui barang bawaan penumpang. Satu penindakan di awal Juli 2015 yang pernah dimuat dalam majalah WBC edisi sebelumnya dan berlanjut pada keberhasilan penggagalan yang lainnya.

Pada 24 Juli 2015 KPPBC TMP C Teluk Nibung berhasil menggagalkan penyelundupan methamphetamine yang dibawa oleh penumpang Kapal Ferry KM. Pasific Jet Star yang berasal dari Port Klang, Malaysia dengan tujuan Pelabuhan Internasional Teluk Nibung dengan berat 2092 gram, dengan modus dicampur dengan paket berisi pakaian.

Dua minggu kemudian, pada 08 Agustus 2015, KPPBC TMPC



C Teluk Nibung kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan methamphetamine seberat 1.557 gram. Pemeriksaan barang melalui mesin X Ray dengan memindai 2 ember cat tembok yang masing masing mempunyai ukuran 7 liter dan 18 liter milik seorang asal Lhokseumawe yang menumpang kapal Ferry KM. Pasific Jet Star dari Port Klang. Setelah diperiksa lebih lanjut ternyata ditemukan barang methamphetamine.

(PLI Teluk Nibung)



Bea Cukai Kuala Namu Gagalkan 2 Upaya Penyelundupan NPP

Selasa, 4 Agustus 2015, CNT KPPBC TMP B Kuala Namu bekerjasama dengan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara berhasil menggagalkan peyeludupan Narkotika golongan I jenis Methamphetamin dengan total 212,67 gram yang dibawa seorang perempuan dengan inisial UA (31) Warga Negara Indonesia yang mendarat dari Malaysia di Bandara Internasional Kulanamu. Modus yang digunakan tersangka adalah dengan menyembunyikan barang bukti tersebut di celana dalam tersangka. Tersangka dan barang bukti diserahkan ke BNP Sumatera Utara untuk pengembangan lebih lanjut.

Seminggu kemudian, pada Senin 10 Agustus 2015, KPPBC TMP B Kuala Namu juga berhasil mencegah masuknya Psikotropika jenis “Happy Five” sebanyak 1,5 butir yang dibawa seorang penumpang berinisial LKS dari malaysia. Petugas menemukan barang bukti dalam saku celana yang bersangkutan, selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan ke Polres Deli Serdang.

(PLI Kuala Namu)

Bea Cukai Dumai Gagalkan 2 Upaya Penyelundupan NPP

Sama halnya dengan KPPBC Teluk Nibung, KPPBC TMP B Dumai juga berhasil menggagalkan 2 upaya



penyelundupan NPP. Penggagalan penyelundupan dilakukan oleh tim patroli laut yang sedang tergabung dalam Satgas Patkor Kastima XXI A.

Pada 08 Agustus 2015 tim patroli laut BC 9002 melakukan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap kapal tanpa nama, GT.7 yang berlayar dari Portklang Malaysia menuju Kubu di Sekitar Perairan Sinaboy. Pada saat melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada bagian palka belakang, ditemukan 4 buah tas yang berisi bungkus serbuk kristal bening. Setelah diuji dengan narcotic test diperoleh hasil positif methamphetamine sebanyak ± 4,968 gram dengan nilai estimasi barang Rp6.706.800.000,00.

Tiga hari kemudian, pada 11 Agustus 2015 kali ini tim patroli laut BC 8005 melakukan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap kapal bernama

KM. SRI MEGA TOP yang berlayar dari Muar (Malaysia) menuju Dumai (Indonesia). Pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim pada bagian belakang kapal tepatnya diatas drum air berwarna biru, ditemukan 2 (dua) buah tas ransel berwarna hitam dan kuning milik ABK kapal. Setelah tas ransel berwarna kuning tersebut dibuka ditemukan 11 kantung plastik berukuran kecil yang berisi butiran-butiran PIL berwarna HIJAU dan COKLAT yang diduga Ekstasi/MDMA. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 11 kantung plastik yang terdapat di dalam tas tersebut diketahui total pil tersebut berjumlah 1.050 positif salah satu jenis Psikotropika Golongan I yaitu MDMA / EKSTASI. Selanjutnya para pelaku diserahkan ke kepolisian.

(PLI Dumai)

Patkor Kastima Ke-21 Mulai Digelar Marsada Roha Ma Hita Manjaga Indonesia-Malaysia

Operasi kerjasama pengawasan kepabeanaan dan cukai Indonesia-Malaysia bertajuk Patkor Kastima 21A/2015 mulai digelar. Upacara pembukaan dilaksanakan di KPPBC TMP Belawan Sumatera Utara, 7 Agustus 2015, dan rencananya ditutup November mendatang di Pulau Pinang, Malaysia.



penindakan. Patroli ini juga sebagai upaya preventif dan represif untuk menghambat, menangkal, dan memberantas perdagangan ilegal dan penyelundupan narkotika,” tegas Dirjen.

Menurut Dirjen, masalah narkotika adalah masalah antarbangsa, jadi mutlak diperlukan kerjasama antarbangsa. Dalam kesempatan tersebut Dirjen Bea dan Cukai dan Timbalan Ketua Pengarah Kastam Diraja Malaysia pun mengakui, permasalahan peredaran narkotika merupakan persoalan besar bagi Indonesia maupun Malaysia. Narkotika merupakan ancaman bagi semua generasi sehingga harus bahu membahu untuk mengatasinya. Pihak DJBC menginformasikan penindakan yang telah dilakukan pada Patkor Kastima tahun 2014 lalu yakni penindakan terhadap KM Masita asal Batam tujuan Sungai Guntung bermuatan barang campuran tanpa dokumen di perairan Pulau Mengkada serta terhadap KM Putri Setia di perairan Pulau Sekikir juga bermuatan barang campuran. Disebutkan, hasil penindakan itu merupakan upaya untuk menciptakan iklim kondusif di kawasan perairan Selat Malaka.

Concern Pelabuhan Kecil

Mengantisipasi maraknya penyelundupan, baik DJBC maupun JKDM saat ini mulai melakukan pengawasan ketat di pelabuhan kecil. Ketika membuka acara Patkor Kastima, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi memerintahkan

Patroli terkoordinasi antara instansi kepabeanaan Indonesia-Malaysia atau biasa disebut Patkor Kastima merupakan agenda tahunan sebagai bentuk kerjasama bilateral kedua negara di bidang kepabeanaan. Bentuk kerjasama yang digelar pertama kali pada 24 Juli 1994 oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM), ini sebagai wujud koordinasi dalam upaya mencegah dan memberantas kegiatan penyelundupan di perairan Selat Malaka. Kerjasama ini dilaksanakan secara intensif karena banyak sekali hal-hal yang telah dihasilkan dari patroli ini. Beberapa kasus penyelundupan narkotika atau dadah di laut telah berhasil digagalkan melalui operasi ini. Semalam sebelum upacara pembukaan, telah diadakan acara jamuan makan malam di Medan Club yang melibatkan semua pelaksana patroli dari Malaysia maupun Indonesia. Acara ramah tamah nan santai ini demikian meriah dengan

menampilkan suguhan tari-tarian khas Sumatera Utara dan beberapa lagu dengan alunan musik melayu.

Dalam sambutannya pada upacara pembukaan Patkor Kastima yang dihadiri sejumlah pejabat penting di Sumatera Utara, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengingatkan bahwa Selat Malaka adalah selat tersibuk di dunia. Hal itu tentu menjadi keuntungan bagi kita. Namun demikian Dirjen menambahkan, hal tersebut bukan tanpa tantangan. Semakin sibuk Selat Malaka maka akan banyak pula usaha menjadikan selat ini sebagai tempat perdagangan ilegal. “Maka dari itu, sejak 1994 kami memiliki kesamaan pandangan untuk mengamankan masyarakat dan mengamankan hak-hak keuangan negara. Tujuannya adalah meningkatkan penegakan hukum yaitu Undang-undang Kepabeanaan kedua negara, menjalin saling pengertian dan kerjasama termasuk pertukaran informasi, risiko dan *assessment* bersama, dan patroli bersama sebagai bentuk pelaksanaan

seluruh jajarannya yang bertugas menangani perairan yang berisiko tinggi akan penyelundupan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap berbagai jenis barang yang masuk ke Indonesia khususnya melalui pelabuhan kecil. Tindakan yang sama juga harus dilakukan petugas Bea Cukai untuk mengawasi masuknya barang-barang asal luar negeri dari pelabuhan bebas Pulau Batam maupun Aceh untuk dipasok ke berbagai daerah di Indonesia.

Dirjen mengatakan, sejumlah pelabuhan di Pulau Sumatera yang perlu mendapat perhatian khusus dalam mencegah maraknya penyelundupan berbagai jenis barang pada sejumlah pelabuhan kecil di antaranya Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Tembilahan di Kepulauan Riau, serta sejumlah pelabuhan lainnya. Sedangkan pelabuhan besar yang juga perlu mendapat pengawasan adalah Pelabuhan Tanjung Priok dan Belawan. “Sekian ratus komoditas telah kita petakan untuk dilakukan pengawasan,” jelas Dirjen terkait adanya indikasi maraknya aksi penyelundupan sehubungan dengan kebijakan pemerintah untuk melindungi barang produksi dalam negeri dengan menaikkan bea masuk atas barang impor baru-baru ini.

Sementara itu, pihak JKDM sendiri mengakui kewalahan dalam mengawasi aktivitas penyelundupan narkotika melalui jalur laut di pelabuhan negara tersebut. Lemahnya pengawasan terjadi karena jumlah personel kastam yang ada dinilai masih terbatas. “Tidak mungkin kita nak (hendak) menumpas semua kasus penyeludupan termasuk narkotika. Bila yang nak diawasi cukup luas,” kata Datok Haji Matrang Bin Suhaili, Penguat Kuasa Kastam Diraja Malaysia.

Dia menjelaskan, jumlah pelabuhan laut yang ada di Malaysia sebanyak 54 pelabuhan. Menurut Matrang, hal itu tidak sebanding dengan jumlah personel kastam yang dimiliki negaranya. “Tak mungkin kita nak menumpas (mencegah) seluruh kasus penyelundupan. Bila jumlah kastam yang ada hanya 2.000 personel,

dengan 54 pelabuhan laut,” ucapnya. Dalam mencegah maraknya aktivitas penyelundupan barang maupun narkotika dari Malaysia ke Indonesia, kastam negeri serumpun itu akan meningkatkan kerja sama dengan petugas DJBC Indonesia, khususnya di bidang data dan informasi.

“Kita akan mengatur siasat (strategi) bagaimana nak saling membantu dalam meningkatkan pengawasan baik di pelabuhan laut maupun di bandara pesawat,” ungkap Matrang. Patkor Kastima kali ini menggelar patroli bersama dengan melibatkan 8 unit unsur armada kapal patroli milik Bea Cukai Indonesia, dan 9 unit kapal patroli perantas serta penumpas milik Kastam Diraja Malaysia. Sebanyak 67 orang personel JKDM turut serta dalam kegiatan ini.

Lebih lanjut Matrang mengungkapkan, tujuan pihaknya bersedia mengadakan operasi ini untuk menunjukkan eksistensi pihaknya dalam menjaga keamanan wilayah dengan Indonesia khususnya Selat Malaka. “Kami nak tunjukkan Bahagian Penguat Kuasaan dan Penindakan di negeri masing-masing bahwa kita senantiasa hadir atau pun *present* sehingga dirasai oleh pihak-pihak yang ingin nak melakukan *activity* penyelundupan atau pun penyelewengan di laut. Sehingga mereka harus berpikir dua tiga kali akan kehadiran kita,” ujar Matrang dengan logat melayu-nya yang kental.

“Saya amat tertarik apa yang dimaklumkan Bahagian Penindakan Indonesia bahwa kebanyakan daripada kemasukan narkotika ke Indonesia pada ketika ini adalah datang dari sempadan laut dan sempadan darat. Walaupun tidak kita nafikan narkotika yang datang daripada lapangan terbang atau melalui udara. Ini adalah satu maklumat yang berguna untuk kita. Sebab selepas ini kita akan menyusun dan mengatur strategi semula bagaimana kita nak menangkal penyelundupan dadah ini di kawasan darat dan laut dengan meningkatkan *activity* penguat kuasa narkotika kita, dan *activity* pengesanan anjing,

dan menambahkan *scanner* di laluan-laluan penumpang di beberapa pelabuhan,” ujar Matrang.

Disinggung mengenai semakin marak dan meluasnya penyelundupan narkotika asal Malaysia ke wilayah Indonesia, Matrang tidak menampiknya. Ia akan segera mengkonsolidasikan internalnya guna bertindak mengatasi masalah ini. “Kita akan mengambil inisiatif dalam *workinggroup* ini dalam sedikit masa untuk mengadakan pembahasan masalah tersebut di Malaysia, karena terjadi peningkatan *activity* penyelundupan narkotika di laut,” ujar Matrang.

Secara terpisah, Komandan Gugus Tugas Patkor Kastima dari DJBC Yudhi Setia D, mengungkapkan, sejauh ini pelaksanaan patroli di lapangan berjalan sangat baik. Ia memberikan beberapa catatan penyelundupan barang haram sabu yang berhasil ditegah sesaat setelah Patkor Kastima ke-21 resmi dibuka. Pihaknya dengan menggunakan Kapal Patroli BC 9002 berhasil menahan kapal nelayan Malaysia tujuan Dumai yang membawa methamphetamine atau sabu seberat 4,9 kg. Menurutnya, operasi ini terjadi pada pukul 10.30 malam waktu setempat setelah sebelumnya dilakukan *boatzooking*.

Setelah itu, berdasarkan pengembangan kasus tersebut, *speedboat* BC Teluk Nibung juga berhasil menangkap kapal nelayan pembawa 2 kg sabu. Tak berapa lama berselang Kapal Patroli BC 8005 juga berhasil menangkap kapal ekspor ikan dari Tanjung Jering Malaysia tujuan Dumai yang membawa lebih dari 1000 butir ekstasi. Terakhir, Satgas Patkor Kastima belum lama ini berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 60 ton amonium nitrat atau bahan baku yang biasa digunakan untuk membuat peledak yang dibawa kapal ‘Dua Putra’ dari Pasir Gudang Johor Malaysia menuju Timor Leste dan Sulawesi. Hal positif ini merupakan imbas dari intensifnya pelaksanaan patroli bersama. “Kami akan terus melakukan pengecekan,” ujar Yudhi.

(Supomo, Qomarul Ardoni)



Derawan, Kibar Bendera Bawah Laut CDC



Customs Diving Club (CDC) kembali memperingati HUT kemerdekaan RI dengan melakukan pengibaran bendera bawah laut. Kali ini lokasi yang dipilih adalah sebuah tempat di ujung Kalimantan yaitu Kepulauan Derawan. Tim terdiri dari 15 orang pegawai DJBC yang berasal dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, KPU Soekarno Hatta dan KPU Priok.

Perjalanan dimulai dari Bandara Halim PK pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015. Dengan menumpang pesawat Batik Air, Tim berangkat menuju Tarakan dengan Balikpapan sebagai terminal transit. Tiba di Tarakan Tim langsung menuju pelabuhan Tengayu untuk meneruskan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi kapal laut. Menjelang senja Tim tiba di Pulau Derawan yang akan menjadi base camp selama kegiatan berlangsung. Kepulauan Derawan

adalah sebuah kepulauan yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Ada beberapa pulau yang terkenal di kepulauan ini diantaranya Derawan, Sangalaki, Maratua dan Kakaban. Kepulauan Derawan terkenal dengan wisata bahari bawah lautnya dan merupakan salah satu destinasi favorit baik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara yang mencari pengalaman bawah laut berkesan. Sungguh kaya memang negara Indonesia ini dengan bermacam potensi alam di dalamnya.

Selama kegiatan penyelaman ini Tim didampingi oleh guide lokal dari dive centre setempat. Hal ini merupakan standar dalam kegiatan menyelam untuk kenyamanan dan keamanan, mengingat setiap lokasi penyelaman memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Pada keesokan paginya, Tim melakukan 'check dive' di wilayah Pulau Derawan,

yaitu di divespot Tutturuga. Di spot ini terkenal dengan penyu hijau dan penyu sisiknya. Pulau Derawan merupakan salah satu lokasi tempat Penyus Hijau dan Penyus Sisik berkembang biak. Mereka sering menyembunyikan telur mereka di pantai-pantai Pulau Derawan. Dulu ada penangkaran Penyus di Pulau ini yang terbuka untuk umum, tetapi sekarang tempat itu tertutup karena alasan keamanan bagi penyus-penyus tersebut. Pada penyelaman kali ini Tim beruntung karena dapat bertemu dan menyaksikan langsung Penyus Hijau di kedalaman laut. Melihat langsung ketenangan mereka saat beristirahat di dasar laut, dengan tempurungnya yang indah dan kokoh, dan kulit keriput mereka yang menakjubkan. Atau melihat keanggunan mereka saat berenang meninggalkan penontonya menuju tempat lain yang dituju.

Kegiatan penyelaman dilanjutkan siang harinya. Tim menuju dive spot lain di Pulau Kakaban. Perjalanan selama kurang lebih 1,5 jam ditempuh menggunakan 2 perahu motor. Kembali tim menyaksikan pemandangan bawah laut dengan keindahan tersendiri di spot Spongebob ini. Setelah sekitar 1 jam menyelam, Tim merapat ke Pulau Kakaban untuk istirahat dan makan siang. Selanjutnya Tim melanjutkan perjalanan ke sebuah danau yang terletak di tengah pulau ini, Danau Kakaban atau biasa disebut Jellyfish Lake. Danau ini memang terkenal dengan ubur-uburnya yang dapat diajak bermain, bercanda dan berfoto tanpa takut terkena sengat beracunnya. Cukup menyenangkan menghabiskan waktu sambil bersantai di danau ini, ditambah pemandangan sekitar yang memang indah. Karena waktu telah menjelang sore dan kondisi laut yang kurang mendukung, rencana hari itu untuk melakukan sekali lagi penyelaman di laut tidak dapat dilanjutkan. Tim pun akhirnya kembali ke Pulau Derawan untuk beristirahat.

Hari berikutnya, tim melakukan penyelaman sekaligus latihan upacara bawah laut di lokasi yang akan

dijadikan tempat upacara. Menjelang persiapan, Tim CDC bertemu dengan tim selam dari POSSI Kaltim Samarinda yang juga akan melakukan pengibaran bendera bawah laut. Akhirnya disepakati bahwa kedua tim akan melaksanakan upacara gabungan. Latihan berlangsung lancar dan aman dan kedua tim sepakat mengenai lokasi upacara untuk esok hari.

Siang harinya, tim CDC kembali melaut menuju Pulau Sangalaki untuk melakukan penyelaman di divespot Manta Parade. Pulau Sangalaki memang terkenal sebagai tempat yang paling pas untuk melihat barisan ikan Manta bermain. Tim tidak dapat melepaskan pandangan dari barisan Mantaray yang dengan indahnya meluncur di kedalaman sekitar 3 meter dari permukaan. Pemandangan dari bawah ini begitu menakjubkan, melihat makhluk-makhluk besar tersebut meliuk-liukan sayapnya dalam air, aneh tapi tetap indah. Beberapa anggota Tim sempat berada dekat sekali dengan mereka tetapi ikan-ikan besar tersebut tampak tidak terganggu sama sekali dengan kehadiran kami. Walau dengan kondisi arus yang cukup kuat di dalam laut sehingga sempat menyulitkan Tim, tetapi hal ini terbayar dengan menonton parade Mantaray yang luar biasa.

Hari yang ditunggu pun tiba. Senin, 17 Agustus 2015, HUT kemerdekaan RI ke-70. Tim dengan antusias menyiapkan peralatan untuk suksesnya upacara nanti. Sekitar pukul 9 pagi, Tim CDC dan Tim POSSI Kaltim Samarinda telah siap melaksanakan upacara bawah laut. Pengibaran bendera akan dilakukan di divespot bernama Jetty Cafe, tidak jauh dari pulau Derawan. Petugas pengibar dipilih 3 orang dari tim POSSI Kaltim, Inspektur Upacara dan Komandan Upacara adalah Bpk. I Ketut Komplit dan Bpk. Marlon Wongkar, yang keduanya sudah menyanggah Dive Master, serta pembacaan Naskah Proklamasi (simbolis) oleh Bpk. Heiky Lazuli semuanya dari CDC. Seluruh anggota tim yang lain sebagai peserta upacara. Persiapan pengibaran dilakukan oleh para

Instruktur dari TNI AL dan guide lokal dengan memasang tali, pelampung, bendera dan tanda-tanda lainnya untuk signal dipermukaan bahwa ada kegiatan dibawah laut. Satu persatu peserta memasuki area upacara di kedalaman 15-16m, dengan visibility (jarak pandang) mencapai 10-12m dan tidak ada arus. Selama kurang lebih 40 menit upacara berlangsung lancar. Kondisi air yang cukup dingin tidak menjadi halangan bagi Tim CDC untuk berbaris rapi dan diam di dasar laut mengikuti jalannya upacara. Dan bendera Merah Putih pun sukses dikibarkan di bawah laut Kepulauan Derawan. Dirgahayu Republik Indonesia!

Tim kembali ke permukaan dan saling berjabat tangan tanda apresiasi bagi masing-masing anggota Tim atas acara yang baru selesai dengan lancar ini. Upacara bawah laut ini sekaligus merupakan penyelaman terakhir Tim CDC untuk perjalanan kali ini. Pada siang harinya Tim berkemas untuk menyeberang ke Tarakan, menunggu penerbangan kembali ke Jakarta pada keesokan harinya. Perjalanan dengan kapal cepat dari Derawan ke Tarakan kali ini lumayan berkesan, diiringi ombak yang lumayan besar, angin kencang dan nahkoda kapal yang nekat menerjang laut dengan segala cara agar sampai di pelabuhan Tengkayu sebelum gelap. 3 jam perjalanan yang sulit dilupakan. Malam itu Tim beristirahat di kota Tarakan, mencuri waktu melihat-lihat kota kecil di pulau di ujung Kalimantan ini.

Penerbangan ke Jakarta kembali menumpang armada Batik Air, berangkat dari Tarakan pukul 11.50 dan sekitar 1 jam kemudian tiba di Balikpapan. Menunggu sekitar 20 menit untuk transit dan lanjut lagi ke Jakarta menempuh perjalanan sekitar 2 jam. Pukul 15.40 Tim mendarat di Bandara Halim PK. Setelah seluruh bagasi terkumpul Tim berpisah untuk kembali ke kediaman masing-masing, menunggu kesempatan bertemu kembali di tugas berikutnya untuk CDC. Bravo CDC!

Purwanila Krishna,
Certified diver CDC

Memahami *Artificial Intelligence* Lewat Film Hollywood

Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika tiba-tiba web bioskop Indonesia menampilkan iklan “Coming Soon” pada film seperti Iron Man, The Avengers, Interstellar, Jurassic World atau film lain sejenis?. Yang terbayang oleh kita adalah efek film yang sempurna, yang memanjakan mata kita dengan keberhasilan kru film dalam memvisualisasikan imajinasi penulis skenario, komik atau novel dari film tersebut.

Namun sadarkah kita akan ilmu pengetahuan yang diselipkan penulis pada film tersebut?. Berdasarkan hasil penelitian Dyna Herlina. S dalam artikelnya “Siapa Penonton Film Indonesia” pada situs <http://filmindonesia.or.id/> awal Januari 2014 terdapat 9 faktor yang mempengaruhi penentuan film yang akan ditonton seperti sinopsis dan ulasan film, sutradara dan aktor, genre, film adaptasi, cerita, sumber informasi netral, jadwal pemutaran, efek visual dan *objectionable content*. Lalu bagaimana dengan ilmu pengetahuan yang terselip tersebut?.

Artificial Intelligence adalah salah satu ilmu bidang ilmu komputer yang sering diselipkan pada film-film fiksi hollywood. Pada tahun 2013, terdapat film Her yang diperankan oleh Joaquin Phoenix sebagai Theodore Twombly. Theodore diceritakan sebagai seorang penulis pada situs *Beautifulhandwrittenletters.com*. yang mempunyai hubungan dengan Sistem Operasi buatan (OS1) cerdas

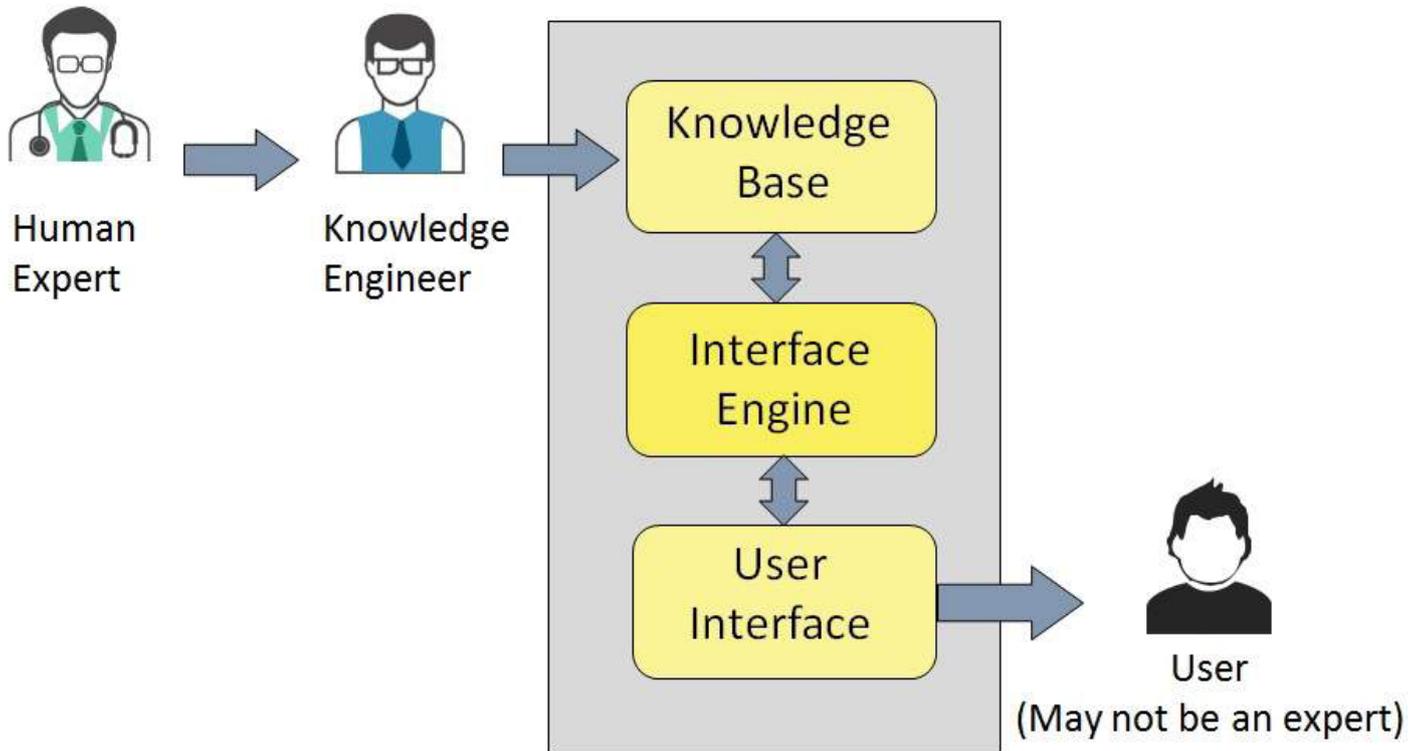
bernama Samantha (diperankan oleh Scarlett Johansson). OS1 merupakan sebuah wujud intuitif yang mendengar, memahami dan mengenali pemiliknya dengan menggunakan kesadaran. OS1 memiliki DNA yang dibuat berdasarkan jutaan kepribadian dari para programmer yang membuatnya.

Lalu pada tahun 2014, Film *Transcendence* yang menceritakan pasangan ilmuwan Will dan Evelyn Caster yang melakukan penelitian Artificial Intelligence Teknik Biomedika pada otak manusia. Pasangan ini membuat metode baru pendeteksi kanker sejak dini untuk menemukan obat dari penyakit Alzheimer. *Transcendence* sendiri adalah jalan untuk membangun sesuatu yang super pintar. *Transcendence* merupakan mesin berperasaan dan memiliki kesadaran yang mengalahkan batas-batas biologi dengan daya analitis yang lebih hebat dari kecerdasan kolektif. Film ini menerangkan bagaimana Evelyn menghidupkan kesadaran otak dari Will yang sudah meninggal. Evelyn menanam konduktor didalam kepala Will ketika sekarat, lalu merangkai kode sinapsis dengan algoritma yang benar disatukan dengan inti processor yang diunggah dari susunan sinyal listrik pikiran Will. Will hidup kembali dan berhasil mengakses dan menembus seluruh jaringan dunia. Bahkan, Will berhasil melakukan metode penyembuhan baru bahkan menyusun tubuhnya kembali menggunakan partikel.

Dan yang paling teranyar adalah film *The Avengers-Age of Ultron* (2015) berdasarkan komik Marvel. Film yang ditulis dan di *directed* oleh Joss Whedon tersebut menceritakan Tony Stark dan Bruce Banner yang berhasil menemukan sebuah *Artificial Intelligence* didalam permata tongkat Loki. Stark dan Banner akhirnya diam-diam menggunakannya untuk menyelesaikan program pertahanan STARK bernama Ultron. Dengan kesadaran dan kecerdasan yang dimiliki Ultron, Ultron berpikir untuk membasmi manusia untuk menyelamatkan bumi.

Lalu mengapa *Artificial Intelligence* begitu menarik? *Artificial Intelligence* mempelajari bagaimana sebuah komputer dapat bertindak seperti manusia, sehingga komputer harus dibekali pengetahuan. AI memiliki disiplin ilmu asal yaitu *Philosophy & Cognitive Science, Mathematics, Psychology* dan *Computer Science*. Dari disiplin ilmu tersebut AI memiliki domain area sebagai berikut:

1. Sistem Pakar, yang mempelajari bagaimana membangun sistem dengan keahlian memecahkan masalah dengan mengadopsi keahlian pakar. OS1 menggunakan ilmu ini dalam DNANYA. Jutaan kepribadian *programmer* pembuatnya dijadikan pakar agar dapat memahami *user* dengan berbagai sifat dan kebutuhannya. Berikut adalah komponen *Expert System/Sistem Pakar*:
2. *Computer Vision*, erat kaitannya dengan pembangunan arti/makna dari image ke obyek secara fisik. Ilmu ini digunakan



oleh Ultron dalam pengenalan wajah Strak dan tokoh lainnya. Begitu pula dengan proyek Will pada film *Transcendence*. Will dengan tubuh yang baru, dapat menggabungkan *computer vision* dan Sistem Pakar dalam mengenali tubuh Evelyn. Sehingga Will dapat memberikan kesimpulan mengenai ketidakseimbangan hormon bahkan emosi Evelyn.

3. *Natural Language Processing* (NLP), mempelajari agar komputer dalam berkomunikasi dengan manusia dengan menggunakan bahasa alami manusia contohnya bahasa Inggris. Pengolahan bahasa alami diperlukan bila kita ingin sistem cerdas seperti robot dapat melakukan instruksi kita. Ultron, Will dan OS1 menggunakan NLP dalam berkomunikasi. Ultron, OS1 dan Will dapat menggunakan banyak bahasa setelah menyusup pada internet dan jaringan dunia. Adapun langkah yang dilakukan pada NLP adalah sebagai berikut:

- a. *Lexical Analysis* : identifikasi dan analisis struktur kata
- b. *Syntactic Analysis* : analisis kata dalam kalimat serta hubungan kata-kata tersebut.
- c. *Semantic Analysis* : menggambarkan arti atau perbendaharaan makna dalam sebuah teks
- d. *Disclosure Analysis* : makna kalimat apapun bergantung pada kalimat sebelumnya
- e. *Pragmatic Analysis* : apa yang dikatakan, ditafsirkan kembali apakah benar-benar memiliki arti.
4. Robotika dan Navigasi, mempelajari perancangan robot yang dapat menggantikan fungsi manusia. Robotika merupakan salah satu cang AI yang menggabungkan hampir semua cabang AI (Sistem Pakar, Computer Vision dan Natural Language). Dan itu semua tercermin pada Ultron yang dapat menyerap seluruh ilmu dari Jarvis (AI stark) baik dari segi kepakaran hingga seluruh pengetahuan Jarvis.

5. Games, mempelajari perancangan game dan antarmuka antara man-machine yang cerdas.
6. Theorem Proving.

Ketiga film tersebut menerangkan kepada kita AI begitu luar biasa, hanya tinggal memasukkan kesadaran dan pengetahuan, maka sebuah AI akan menjadi sebuah mesin kloning dari manusia. Namun, film tersebut tidaklah kaku dalam memasukkan unsur ilmu pengetahuan kedalamnya. sehingga penonton tidak hanya hanyut dalam segi efek film namun juga pada sisi AI sebagai ilmu pengetahuan yang menarik untuk diserap.

**(Eva Maulina Aritonang,
Pelaksana pada Direktorat IKC)**

Sumber:
https://en.wikipedia.org/wiki/Avengers:_Age_of_Ultron
<http://filmindonesia.or.id/>
<http://socs.binus.ac.id/2012/06/06/mengenal-kecerdasan-buatan-kini-dan-akan-datang/>



IMPORTASI HEWAN PELIHARAAN

Pertanyaan:

Dengan hormat melalui redaksi WBC saya bertanya kepada Subdit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai mengenai prosedur impor binatang piaraan berupa anjing dan kucing ke Indonesia. Mengingat informasi tersebut sangat saya butuhkan, kiranya informasi tersebut dapat dimuat dalam edisi tahun ini.

Terima kasih.

Hormat saya,
Ina Rohaya

Jawaban:

Sehubungan dengan pertanyaan Saudari Ina Rohaya mengenai importasi binatang ke dalam wilayah Republik Indonesia, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa prosedur impor barang berupa hewan peliharaan tetap mengikuti ketentuan umum di bidang impor sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang no 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
2. Bahwa untuk pemasukan Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina disamping diatur ketentuannya dibidang kepabeanaan impor juga diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan.
3. Berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan diatur sebagai berikut :
 - Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina;
 - Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :
 - dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
 - melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
 - dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.
4. Ketentuan lebih detil dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan
5. Persyaratan sebagaimana disebutkan di atas wajib dilampirkan pada saat mengajukan pemberitahuan pabean impor.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Salam,
Subdit Humas dan Penyuluhan
Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanaan dan Cukai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai





Customs Badminton Club

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengadakan latihan badminton secara rutin. Latihan dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis setelah jam kerja oleh Customs Badminton Club (CBC) ini diadakan di lantai 15 Gedung Kalimantan

Badminton adalah salah satu olah raga yang banyak diminati oleh masyarakat, salah satunya di lingkungan Bea dan Cukai. Oleh karena itu untuk menyalurkan hobi dan minat pegawai Bea dan Cukai dalam olah raga bulu tangkis/badminton, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengadakan latihan badminton secara rutin. Latihan yang dilakukan setiap Selasa dan Kamis setelah jam kerja oleh Customs Badminton Club (CBC) ini diadakan di lantai 15 Gedung Kalimantan. Di samping menyalurkan minat dan hobi, ternyata permainan Badminton memiliki banyak sekali manfaat. Sebuah fakta menunjukkan bahwa olahraga bulu tangkis ternyata memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh. Di Bea Cukai cukup banyak hobi yang dibuat dalam suatu wadah, salah satunya CBC.

“Saya rasa hobi yang paling bagus adalah berolahraga. Dengan berolahraga mereka mau mengorbankan waktu demi hobinya . Di samping fisik dan stamina bagus, juga menyehatkan,” ujar **Erwin Situmorang** Ketua BAPORS DJBC (Badan Pembina Olahraga dan Kesenian DJBC).

DJBC, melalui badminton juga bisa mencairkan komunikasi. “Kalau olahraga ini sudah kita optimalkan maka akan lebih mudah sekali mencairkan suasana. Secara informal akan memudahkan kita untuk membuka komunikasi. Jadi ini sangat positif sekali, kalau teman-teman yang punya hobi olahraga dan membentuk komunitas sangat kita dukung sekali. Karena semua tujuan yang kita harapkan dari organisasi itu bisa diambil dari tata nilai olahraga tanpa kita mengeluarkan dana apapun.”



■ **Erwin Situmorang**

Ketua BAPORS DJBC
(Badan Pembina Olahraga
dan Kesenian DJBC)



■ Julius Agung Priyono

Pengurus CBC

Bulu tangkis adalah salah satu cabang olahraga dari permainan bola kecil yang banyak digemari, baik anak-anak sampai orang tua. Banyak tata nilai yang terkandung di dalam sebuah pertandingan bulutangkis, Tata nilai yang dimaksud Erwin dan terbentuk di dalam diri para pemain diantaranya; tata aturan sehingga tercipta pertandingan yang baik, disiplin, tanggung jawab, sportif, rendah hati, sifat yang mengedepankan kelapangan dada dalam menerima sebuah kenyataan di lapangan. Seperti objektif, adil dan sabar. tanggap, dan percaya diri.

“Saya selaku Ketua Bapors menantang teman-teman, tolong target kita jangan juara di tingkat Kementerian Keuangan saja, kalau memang bisa akan kita coba formulanya dengan eksepsi misalnya karena komunikasi jauh lebih mudah jika melalui olahraga, sehingga saya bilang ke teman-teman coba kita adakan pertandingan ke *stakeholder*, jalur prioritas, atau asosiasi-asosiasi, sehingga komunikasi kita jangan hanya lewat jalur formal. Sesuai anjuran Dirjen, kita harus mulai membuka komunikasi, biasanya sesama penghobi saling gampang, dan saya harapkan melalui olahraga ini komunikasi khususnya dengan *stakeholder* akan lebih baik lagi.”

Pada kesempatan berbincang-bincang dengan salah satu pengurus CBC, **Julius Agung Priyono**, terungkap para pegawai terutama yang muda-muda cukup antusias menekuni kegiatan badminton di DJBC. Tercatat ada 50 orang yang kini menjadi anggota CBC yang tersebar di seputaran Jabodetabek.

Menceritakan berdirinya CBC, Julis mengisahkan, berawal dari rasa kebersamaan dan kekeluargaan diantara para pegawai di lingkungan DJBC pecinta bulu tangkis seluruh Indonesia, pada tahun 2004 ketika bersama-sama melaksanakan tugas untuk mengikuti turnamen bulu

tangkis dalam rangka memperingati Hari Oeang pada tahun tersebut. “Kami yang pada waktu itu terdiri dari kira-kira lima belas pegawai di antaranya Slamet Wahyudi, Gunawan (Lek Gun), Suparyanto, David Purwo Susilo, Julius Agung Priyono, Fungsi Awaludin dan Wijang Abdillah secara informal berkeinginan untuk membuat suatu wadah organisasi (informal) yang bisa menaungi secara moral bagi para pegawai DJBC pencinta hobi bulu tangkis di seluruh Indonesia dalam melaksanakan aktivitas hobinya. Akhirnya pada akhir September 2004 kami memutuskan untuk “*mendirikan*” suatu perkumpulan pencinta bulu tangkis di lingkungan DJBC dengan nama **Customs Badminton Club (CBC).**”

Organisasi/perkumpulan ini bersifat informal karena tidak menunjuk secara resmi tertulis para pengurus-pengurusnya, tugas dan kewajiban-kewajiban yang selayaknya ada sebagai suatu organisasi pun tidak kita formalkan tetapi segala sesuatu terkait berjalannya organisasi ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ikatan formal, meskipun demikian CBC selalu hadir dan terasa nyata perannya bagi para pencinta bulu tangkis di lingkungan DJBC. Secara formal CBC di bawah naungan BAPORS DJBC.



Biasanya pengurus BAPORS untuk cabang bulu tangkis secara otomatis menjadi ketua CBC.

Kegiatan rutin yang menjadi agenda tahunan CBC adalah penerapan di lapangan dari agenda-agenda BAPORS DJBC ditambah kegiatan-kegiatan lain yang secara detail tidak mungkin dirumuskan di BAPORS. Kegiatan tersebut meliputi even-even turnamen internal DJBC dan eksternal di tingkat kementerian yang merupakan penerapan dari agenda BAPORS ditambah latihan rutin di masing-masing unit kerja DJBC di seluruh Indonesia serta pertandingan persahabatan dengan perkumpulan bulu tangkis lain. Pada prinsipnya CBC merupakan kepanjangan tangan dari BAPORS untuk menjangkau secara nyata dan lebih luas kepada sebanyak-banyaknya pegawai DJBC pencinta bulu tangkis

Menteri Keuangan Latihan Badminton di Kantor Pusat DJBC

Menteri keuangan, Bambang Brodjonegoro sendiri sering melakukan kegiatan olah raga bersama dengan para pejabat dan pegawai DJBC di kantor pusat. Beberapa cabang olah raga yang rutin dilaksanakan pada akhir pekan antara lain sepak bola, tenis meja, menembak dan badminton. Menteri keuangan sendiri terakhir kali melakukan olah raga bersama tanggal 9 Agustus 2015, kebetulan beliau hobi olah raga badminton. Pada kegiatan tersebut, mantan pemain bulu tangkis tunggal putra, Taufik Hidayat hadir dan bermain dengan Menteri Keuangan dan para pejabat/ pegawai DJBC lainnya.

Peminatnya Makin Bertambah

Para anggota CBC yang notabene adalah pegawai Bea Cukai, tinggal di wilayah Jabotabek dengan jumlah anggota tetap sebanyak 50 orang. Masing-masing di antara mereka berlatih dengan komunitas yang terdekat dengan kantor mereka. Baru akan berkumpul jika akan mengikuti satu even pertandingan. Setiap bulan



para anggota dikenakan iuran tetap. Dan kepada anggota CBC yang muda-muda dianjurkan untuk masuk ke klub profesional untuk meningkatkan kemampuannya.

“Animonya lumayan banyak, apalagi secara formal kantor juga menaungi kita dan ada even tahunannya secara resmi setahun sekali, turnamen. Ada even interen BC dari Bapors setahun sekali dan lokasinya berpindah-pindah, sesuai kesediaan kantor masing-masing, tahun ini adalah tahun yang keempat, pertama di Bali, kedua di Solo, ketiga, Batam dan tahun 2015 ini di Bandung.

Harapan kami inginnya CBC bisa menjadi anggota PBSI Jakarta timur, semoga mendapat lampu hijau dari pimpinan sehingga bisa terlibat aktif di luar, mengikuti even-even turnamen resmi PBSI Jaktim. Tapi itu masih wacana, meski niatnya sudah lama tapi hal itu belum terwujud,”

Mengenai tantangan Bapors agar dibuat even yang sifatnya tidak terbatas di kalangan sendiri tetapi dengan mengundang pihak eksternal, hal itu akan diusahakan oleh pengurus CBC misalnya dengan mengundang Mitra Utama. Kemungkinan besar hal itu akan mulai dilaksanakan pada perayaan Hari Pabean Internasional mendatang. “Secara pribadi saya berharap teman-teman yang ada di daerah bisa lebih intensif terutama pegawai yang masih muda. Jika ada waktu luang, bisa bergabung dengan klub-klub lokal setempat jika di kantornya tidak ada kegiatan badminton. Tapi kalau ada komunitas di kantor mungkin bisa dibuat latihan bersama. Dan kami berharap bisa diijinkan untuk menjadi anggota PBSI sehingga bisa mengikuti agenda turnamen lokal Jakarta supaya lebih maju dan terjaga kualitas kita,” papar Julius.

(Ariessuryantini, Isro'ah Laeli R.)

EVENT

WBC 490

SEPTEMBER 2015

KPPBC TIPE PRATAMA BLITAR

Selasa s.d. Jumat, 7 s.d. 10 Juli 2015, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Blitar, diadakan acara Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan, Validasi Piutang, Verifikasi Data BMN, dan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2015. Acara dengan tema “Menuju Laporan Keuangan yang lebih berkualitas dan akuntabel” tersebut diikuti oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Jatim II. Dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Decy Arifinsjah, yang mengharapkan bahwa hasil rekonsiliasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I (UAPPA-E1) sehingga dapat dipertahankan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian”.



KPPBC TIPE MADYA PABEAN A BANDUNG

Jumat, 31 Juli 2015, bertempat di KPPBC Tipe Madya Pabean (TMP) A Bandung, diadakan acara studi lapangan Prodipl I spesialisasi Pajak Balai Diklat Keuangan Cimahi sebagai bagian dari proses belajar mengajar, dengan mata kuliah organisasi dan tata kerja. Studi lapangan yang diikuti oleh 10 orang siswa tersebut bertujuan untuk menggali informasi terkait visi, misi, strategi, struktur dan budaya organisasi, serta ruang lingkup pekerjaan yang ditangani oleh KPPBC TMP A Bandung. Disampaikan motto KPPBC TMP A Bandung, yaitu API (AMANAH dalam tugas, PROFESIONAL dalam bertindak, INOVATIF dalam pemikiran).

KPPBC TIPE MADYA PABEAN A TANGERANG

Kamis, 6 Agustus 2015, bertempat di halaman kantor KPPBC TMP A Tangerang diadakan kegiatan apel pagi rutin. Bertindak selaku Pejabat Pengambil Apel Yenni Rachmawati, Kepala Subbagian Umum KPPBC TMP A Tangerang. Dalam acara tersebut juga dilangsungkan penyematan secara simbolis tanda kepangkatan kepada pegawai On Job Training (OJT). Selepas apel pagi acara dilanjutkan dengan kegiatan Program Pembinaan Ketrampilan Pegawai (P2KP) dengan tema Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan DJBC, dan Panduan Usulan Penilai Pada Aplikasi e-Performance 2015.



KANTOR PUSAT DJBC JAKARTA

Minggu, 9 Agustus 2015, bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta diadakan acara olah raga bersama. Hadir dalam acara tersebut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi dan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan yang diprakarsai oleh Ketua Badan Pembina Olahraga dan Seni DJBC, Erwin Situmorang tersebut dilaksanakan sejak pukul 06.30 WIB. Beberapa agenda dilaksanakan dalam kegiatan tersebut antara lain Fun Bike, Fun Match Sepakbola, Basket dan Bulu Tangkis serta Hiburan Musik dan Band. Acara semakin meriah dengan kedatangan mantan pemain bulu tangkis tunggal putra nasional, Taufik Hidayat.



KPPBC TIPE MADYA PABEAN A SEMARANG

Selasa, 11 Agustus 2015, bertempat di PT.AST Indonesia diadakan kegiatan "BEA CUKAI SAMBUNG RASA" bersama Pengusaha Kawasan Berikat yang berada dibawah pengawasan KPPBC TMP A Semarang. Dipimpin oleh Iman Prayitno, Kepala Kantor dan didampingi oleh para kasi dan kasubsi pelayanan kepabeanan dan cukai. Acara BEA CUKAI SAMBUNG RASA ini akan dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan, untuk menyerap dan memberikan solusi terhadap aspirasi, permasalahan maupun masukan dari pengusaha kawasan berikat yang bersifat membangun, sehingga diharapkan KPPBC TMP A Semarang bisa memberikan pelayanan yang terbaik.



KPPBC TIPE MADYA PABEAN B KUALA NAMU

Jumat, 14 Agustus 2015, bertempat di KPPBC TMP B Kuala Namu diadakan survei kepuasan pengguna jasa yang didampingi tim dari Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DJBC Sumatera Utara. Survei dibuka oleh Kepala Kantor KPPBC TMP B Kuala Namu Zaky Firmansyah yang didampingi Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi Nyoman Adhi Suryadnyana serta Kasi Kepatuhan Internal Achmad Hidayat. Survei diikuti pengguna jasa yang berada dalam lingkungan KPPBC TMP B Kuala Namu yang meliputi eksportir, importir, PPJK, Airlines, TPS, PJT dan TBB. Diharapkan dengan survei dapat diperoleh masukan dalam rangka meningkatkan pelayanan serta sarana dan prasarana di KPPBC TMP B Kualanamu yang secara efektif beroperasi sejak tanggal 1 Juli 2015.



Labial Veneer untuk Estetik Gigi

Perawatan alternatif untuk memperbaiki estetik gigi kedokteran yang berupa memutihkan/ *bleaching* disertai perbaikan bentuk anatomis dan susunan gigi yang kurang baik. Salah satunya adalah *labial veneer*.

Labial veneer secara kasat mata dapat disamakan dengan *bleaching* bila dilihat dari hasilnya dimana gigi menjadi lebih putih/ warna dapat sesuai keinginan pasien, Tapi *labial veneer* juga dapat dikatakan sebagai gigi tiruan karena melapisi bagian permukaan gigi dengan mengambil sebagian gigi lalu menutup dengan bahan lain, tapi semuanya mempunyai tujuan sama untuk memperbaiki estetik gigi.

Labial veneer merupakan suatu lapisan tipis bahan tambal yang menutupi permukaan bagian luar gigi terutama pada gigi anterior/ gigi-gigi yang terlihat pada waktu tersenyum. *Labial veneer* diindikasikan pada gigi dengan keadaan:

- Gigi dengan perubahan warna
- Gigi dengan perubahan bentuk
- Gigi dengan posisi yg sedikit kurang baik

Bahan yang digunakan dapat berupa resin komposit ataupun porselen.

Labial veneer menurut cara pengerjaannya terbagi menjadi *direct & in direct*.

Direct veneer yaitu *veneer* dilakukan dengan melekatkan bahan tambal resin komposit langsung pada permukaan gigi yang sebelumnya telah dilakukan pengasahan pada permukaannya. Cara pengerjaannya adalah:

1. *Veneer* langsung diletakkan pada permukaan gigi
2. Hanya sekali kunjungan
3. Hanya menggunakan bahan komposit
4. Biaya lebih murah.

Indirect veneer

- a. Tehnik tidak langsung
- b. Dikerjakan oleh Laboratorium
- c. Minimal 2 x kunjungan



- d. Bahan yang digunakan dapat komposit/ *acrylic* dan *porcelain*.
- e. Prosedur pengerjaannya setelah gigi dikurangi dilakukan pencetakan untuk mendapatkan model kerja guna proses pembuatan *veneer* setelah itu baru ditempelkan pada gigi dengan lem kusus.

cara pengerjaan *veneer* baik *direct* maupun *indirect* ada bagian yang dikurangi biasanya hanya pada bagian luar gigi saja yang dapat terlihat dari depan. Tujuannya adalah untuk menyediakan tempat bagi selapis tipis bahan tambal yang akan digunakan, dan bagi bahan resin komposit hal ini dilakukan agar bahan tambal dapat melekat ke permukaan gigi dengan kuat. tapi pada kondisi tertentu dan dengan makin majunya teknologi dimana warna dari bahan gigi dan pelekat semakin baik, maka saat ini sudah dapat dilakukan *veneer* tanpa mengurangi bagian luar dari gigi.

Keuntungan dari perawatan *veneer* ini adalah:

1. Warna gigi dapat disesuaikan
2. Pengambilan struktur gigi tidak banyak
3. Dapat memperbaiki bentuk gigi yg abnormal
4. Memperbaiki malposisi ringan pada gigi depan.



Kerugian dari perawatan *veneer* sama seperti kerugian pada pembuatan gigi palsu cekat lainnya dimana terjadi pengambilan jaringan gigi walau pada *veneer* pengambilan jaringan gigi hanya sebagian, tetapi bila dilakukan tanpa pengambilan jaringan maka kerugiannya hampir tidak ada, hanya dokter harus cermat melihat keadaan gigi pasien dan menjabarkan secara benar kondisi yang ada pada gigi pasien tersebut. Pasien pun harus benar-benar mengetahui keadaan giginya sebelum dan setelah dibuatkan *veneer* terutama jenis *indirect veneer*, apalagi bila dilakukan pengambilan jaringan mengingat jaringan yang diambil adalah jaringan sehat dan biaya tidak murah. Akan tetapi pada kenyataannya hasil sangat bagus dimana gigi tersusun hampir sempurna melekat dengan gusi terutama gigi-gigi yg tampak pada saat kita berbicara. Maka dapat dikatakan *labial veneer* saat ini sedang menjadi *trend* untuk bidang estetik gigi. (*)

Apa Kabar Barang Kiriman Deni?

Siang itu cuaca di kawasan Bandara Soekarno Hatta sangat panas. Hilir mudik para pekerja membuat suasana semakin riuh penuh peluh. Tapi tidak dengan Deni Ariwibowo. Pemuda asal Karawang Jawa Barat ini merasa dingin hatinya. Sudah seminggu paket kiriman dari istrinya yang berada di Arab Saudi belum juga diterimanya.



Mekanisme Penanganan Barang Kiriman EMS yang Dikenakan Bea Masuk dan PDRI



Deni berharap-harap cemas. Takut kalau kiriman itu raib tak jelas rimbanya. Pasalnya, istrinya terus menelepon agar barang segera diurus. Tak jelas rinci jenis barangnya memang. Tapi itu pasti barang penting bagi keluarga Deni. Ia tak paham prosedur dan aturan main kirim-kiriman barang dari luar negeri. Jangankan aturannya, lokasi Kantor Pos Bandara dan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Soekarno-Hatta pun ia tak tahu. Deni pun cemas ketika ada isu yang menyebutkan bila barang itu harus ditebus sebesar 2 juta rupiah.

Ia lalu mencoba menghubungi Warta Bea Cukai, karena memang ia punya salah satu terbitannya. Dan memang di sana tertera nomor telepon dan alamat Kantor Pusat DJBC. Oleh salah satu awak redaksi, Deni diarahkan ke bagian *client coordinator* (CC) KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta. Namun beruntung, pas makan siang di kantin Deni bertemu dengan Nugroho, salah seorang Pemeriksa Dokumen Tingkat Trampil Bea Cukai yang memang memiliki tugas memeriksa barang kiriman via pos di bandara. Obrolan pun berlanjut. Alur pindah tangannya barang dipaparkan. Seolah mendapatkan angin segar Deni semakin hakul yakin. Penjelasan Nugroho jelas, tegas, dan lugas. Intinya mudah dimengerti. Deni sumringah.

Seperti penuturan Nugroho kepada Deni, sebagai penerima barang kita masih diberi keringanan. Barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 50 (lima puluh US Dollar) untuk setiap orang per kiriman diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Dalam hal pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, maka barang kiriman dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk. Prosedur pengiriman barang impor untuk perorangan dapat dilakukan melalui

Pos atau Perusahaan Jasa Titipan (PJT). Ketentuan mengenai impor barang kiriman diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman.

Barang Kiriman Melalui Pos/ EMS

Adapun prosedur pengeluaran barang kiriman pos, yakni kiriman pos yang diterima kantor tukar yang ditetapkan PT Pos Indonesia kemudian dilalubeakan di Kantor Pos Tukar tujuan. Atas kiriman pabean dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk penetapan bea yang harus dibayar oleh penerima kiriman pabean. Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang, pemeriksaan dan pencacahan atas kiriman pabean yang bersangkutan dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai disaksikan oleh Petugas Pos sebagai wakil pemilik barang, sehingga pihak pos tetap bertanggung jawab apapun yang terjadi atas barang tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik barang, kiriman pabean yang bersangkutan disegel oleh pejabat Bea dan Cukai kemudian dimasukkan ke dalam kantung plastik bungkus rangkap dan diplombir oleh Petugas Pos.

Hasil pemeriksaan/pencacahan menyatakan kiriman pabean tersebut memerlukan pemenuhan persyaratan impor tertentu. Kepala Kantor Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada penerima kiriman pabean untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan melalui Kepala Kantor Tukar I Kantor Pos Lalu Bea yang bersangkutan. Jika terkena peraturan larangan impor, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti diekspor kembali atau dimusnahkan. Hasil Pemeriksaan Pabean dituangkan dalam PPKP (formulir Pemeriksaan, Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos) rangkap enam yang ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Petugas



Pos, jika dilakukan pemeriksaan fisik barang. Terhadap kiriman pabean yang berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak dikenakan bea, pada PPKP dibubuhi cap “Bebas Bea Masuk dan pajak dalam rangka Impor”.

Kemudian Pejabat Bea dan Cukai menyerahkan lima lembar PPKP beserta kiriman pabean yang bersangkutan kepada Petugas Pos. Petugas Pos mengirimkan panggilan kepada penerima kiriman pabean untuk, datang ke Kantor Pos yang bersangkutan. Pada waktu penerima kiriman pabean datang ke loket Kantor Pos dengan membawa surat panggilan, kepada yang bersangkutan diberikan lima lembar PPKP untuk keperluan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor (PDRI). Jika keberatan terhadap penetapan Bea dalam PPKP, penerima kiriman pabean dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan menjelaskan alasannya. Apabila ternyata terjadi perubahan pada jumlah Bea, Pejabat Bea dan Cukai membuat Nota Pembetulan PPKP dalam enam lembar, yang lima lembarnya diteruskan kepada Petugas Pos untuk dilekatkan pada masing-masing PPKP yang bersangkutan.

Penerima kiriman mengisi formulir SSBC untuk pembayaran Bea Masuk dan Cukai dan/atau SSP untuk pembayaran pajak (PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22) kemudian menyetorkan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam

rangka impor sesuai dengan yang tertulis dalam PPKP/Nota Pembetulan PPKP ke loket Kantor Pos. Penerima kiriman Pabean dapat menerima kiriman pabeannya setelah seluruh bea yang terutang dilunasi.

Kiriman pabean yang berisi barang yang pengimporannya diperlukan persyaratan tertentu berupa surat persetujuan dari instansi teknis terkait contohnya kosmetik dan obat-obatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada saat penyerahannya kepada Pejabat Bea dan Cukai wajib dilampiri dengan surat persetujuan tersebut.

Adapun SOP Barang Kiriman Melalui Pos/EMS tahapannya adalah PT. Pos Indonesia wajib menyerahkan lampiran bukti transaksi jual-beli (*invoice*) atas barang kiriman pada saat mengajukan dokumen PP22a kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan pabean. Terhadap dokumen PP22a yang diserahkan oleh Petugas Pos akan diterbitkan dokumen PP22b. Dokumen PP22b harus diterbitkan maksimal dua hari kerja (kecuali terhadap barang kiriman yang harus mendapatkan ijin dari instansi terkait). Dokumen PP22b merupakan dokumen pengantar dari beberapa dokumen PPKP yang selanjutnya akan dikirimkan kepada pemilik barang untuk dilakukan pelunasan pungutan negara melalui kantor pos persepsi. Setiap pelunasan pungutan negara berupa BM dan PDRI melalui kantor



pos persepsi, pemilik barang akan mendapat bukti pelunasan pungutan negara ke kas negara berupa SSPCP.

Mengenai daftar barang yang memerlukan persyaratan impor tertentu yang sering dikirim melalui kiriman pos antara lain telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet melebihi dua unit per kiriman harus mendapatkan ijin sebagai Importir Terdaftar dari Kemendag (Permendag Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012). Senjata api/angin/mainan/replika bagian maupun aksesorisnya, *crossbow*, bahan peledak dan peralatan Keamanan lainnya harus dilengkapi ijin dari Kapolri (PU 20/1960 jo. Kep. KAPOLRI No. Skep/82/II/2004 Jo. R/13/I/2005). Sementara itu obat, obat tradisional, suplemen dan produk pangan olahan harus dilengkapi ijin dari BPOM/Kemenkes.

Kemudian cakram optik dibatasi 10 keping lebih dari itu harus dilengkapi ijin Importir Terdaftar cakram optik dari Kemendag (Permendag No 11/M-DAG/PER/3/2010). Barang-barang bekas harus dilengkapi ijin dari Kemendag (Permendag 54/M-DAG/PER/10/2009). Tumbuhan dan hewan harus dilengkapi dengan Sertifikat Pelepasan dari Balai Karantina (PP 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan dan PP 8 tahun 2000 tentang Karantina Hewan). Kemudian produk tertentu berupa pakaian paling banyak 10 pcs per kiriman; elektronika paling banyak 2 pcs, produk tertentu lainnya seperti

makanan, minuman, obat tradisional, suplemen kosmetik, alas kaki, mainan anak-anak) paling banyak senilai FOB USD 1.500 lebih dari itu harus dilengkapi ijin dari Kemendag. Syarat lain adalah SNI terhadap beberapa produk seperti mainan anak-anak, pelek, ban, helm dan lain-lain. Alat kesehatan harus dilengkapi ijin dari Kemenkes (Dasar Hukum Permenkes No. 1190/MENKES/PER/VIII/2010).

Terhadap impor melalui barang kiriman pos berlaku juga ketentuan umum di bidang impor termasuk diantaranya aturan larangan impor, barang larangan impor yang terkadang masuk melalui barang kiriman pos antara lain; NPP (Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor) dilarang (Dasar Hukum UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan PP No 44 tahun 2010 tentang Prekursor). Buku, majalah, barang cetakan lainnya, cakram optik, dan barang lain yang mengandung unsur pornografi/melanggar kesusilaan dilarang (Dasar Hukum UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi, KUHP Pasal 282). Kosmetika yang dimasukan oleh perorangan untuk keperluan pemakaian pribadi karena BPOM tidak mengeluarkan ijin pemasukan kosmetika untuk keperluan pemakaian pribadi.

Batas pembebasan Barang Kena Cukai (BKC) yang diimpor melalui barang kiriman pos (Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai) adalah minuman mengandung etil alkohol (MMEA) paling banyak 350 ml dan hasil tembakau berupa sigaret paling banyak 40 batang, cerutu paling banyak 10 batang, tembakau iris/hasil tembakau lainnya paling banyak 40 gram, dan apabila terdapat lebih dari satu hasil tembakau maka pembatasan ditetapkan secara proporsional.

Barang Kiriman Melalui PJT

Pemasukan barang impor berupa barang kiriman dapat dilakukan melalui Perusahaan Jasa Titipan. Syaratnya, barang-barang yang menurut sifat dan jumlahnya tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan atau dikirimkan oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri dalam bentuk dokumen, sekogram, paket, dan bungkusan kecil yang beratnya tidak melebihi 20 kilogram netto. Bila kedua persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka terhadap barang kiriman tersebut dengan tidak mengindahkan jumlah barangnya, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi sesuai ketentuan umum di bidang impor yang berlaku.

Barang kiriman melalui jasa titipan yang nilainya tidak melebihi FOB USD 50 untuk setiap orang setiap kiriman diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Namun atas



PJT wajib melampirkan bukti transaksi jual-beli (*invoice*) pada saat mengajukan PIBK untuk dilakukan pemeriksaan pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai. PIBK diajukan oleh PJT beserta perhitungan awal perihal besarnya BM dan PDRI. PIBK diajukan terhadap barang kiriman melalui PJT dengan berat maksimal 100kg (seratus kilogram) *netto* dan terhadap PIBK kurang dari FOB USD 50 dapat diajukan konsolidasi maksimal 10 AwB (sepuluh *Airway Bill*).

Pejabat Bea dan Cukai akan menetapkan nilai pabean berdasarkan PIBK yang diajukan PJT.

Terhadap PIBK yang telah ditetapkan nilai pabeannya oleh Pejabat Bea dan Cukai akan terbit SPPB (kecuali terhadap barang kiriman yang harus mendapatkan ijin dari instansi terkait) dan selanjutnya PJT akan melakukan pembayaran melalui bank devisa persepsi maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah SPPB. Sebelum mengajukan PIBK, PJT akan memberitahukan kepada pemilik barang perihal perkiraan biaya-biaya yang timbul. PJT kembali memberitahukan kepada pemilik barang mengenai besarnya penetapan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai setelah dilakukan pembayaran melalui bank devisa persepsi. Atas pungutan negara BM dan PDRI melalui bank devisa persepsi pemilik barang akan mendapat bukti pelunasan pungutan Negara ke kas negara berupa SSPCP.

Menghitung Bea Masuk dan Pajak untuk Kiriman Pos

Terdapat beberapa prinsip dasar pengenaan pajak impor untuk barang kiriman. Terhadap barang kiriman, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, dengan Nilai Pabean paling banyak FOB USD 50 untuk setiap orang per kiriman. Dalam hal nilai pabean barang kiriman melebihi

kelebihan dari batas nilai FOB tersebut dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Adapun prosedur pengeluaran barang kiriman melalui jasa titipan; PJT mengajukan PIBT (BC 2.1) dalam dua lembar dan/atau dokumen pelengkap pabean dengan dilampiri *bill of lading* (B/L) atau *air way bill* (AWB), *invoice*, *packing list*, daftar barang per master AWB.

Sementara itu Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian berkas PIBT dan/atau dokumen pelengkap pabean dan Identitas PJT, pemeriksaan fisik barang, penetapan klasifikasi dan nilai pabean, penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang. Pemeriksaan pun dilakukan terhadap PIBT dan/atau dokumen pelengkap pabean yang sudah diteilti dan ditetapkan klasifikasi, nilai pabean dan bea masuk serta pajak dalam rangka impor diserahkan kembali kepada PJT untuk pelunasan Bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.

Kemudian PJT melakukan pembayaran terhadap Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor terutang. PJT menyerahkan kembali PIBT dan atau dokumen pelengkap pabean beserta bukti pembayaran kepada pejabat Bea dan Cukai. Pejabat Bea dan Cukai mencocokkan besarnya Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor yang tertera dalam bukti pembayaran dengan yang ditetapkan dalam PIBT. Pejabat Bea dan Cukai

menerbitkan dua lembar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan menyerahkan lembar keduanya kepada PJT untuk pengeluaran barang.

Namun demikian, barang kiriman yang merupakan hadiah untuk kesejahteraan rohani, tujuan kebudayaan, dan amal umum dibebaskan dari Bea Masuk, Cukai, PPh Pasal 22. Sedangkan pelaksanaan pembebasan PPN dan PPNBM dapat langsung diajukan ke Ditjen Pajak karena Rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perlakuan PPN dan PPNBM atas Impor BKP yang dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk, masih dalam proses dan menunggu penetapan selanjutnya.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.04/2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman berlaku ketentuan: Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos dan PJT; Penetapan tarif didasarkan pada tarif bea masuk dari jenis barang yang bersangkutan, apabila barang impor lebih dari 3 jenis barang, pejabat bea dan cukai menetapkan hanya satu tarif bea masuk berdasarkan tarif barang tertinggi.

batas pembebasan bea masuk, barang kiriman dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh (CIF) dikurangi dengan USD 50. Dalam hal terdapat lebih dari satu kiriman pos untuk penerima yang sama dan alamat yang sama maka tidak diberikan pembebasan. FOB (*Free On Board*) adalah nilai barang atau harga barang. CIF (*Cost, Insurance and Freight*) adalah nilai barang ditambah asuransi dan ongkos kirim. Barang hadiah, sampel, hibah, tidak diperjualbelikan tetap dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor apabila nilainya lebih dari USD 50.

Rumus Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor
 Bea Masuk = Nilai Pabean (Rp) X % BM
 Nilai Impor = Nilai Pabean + Bea Masuk
 PPN = % PPN X Nilai Impor
 PPh Psl. 22 = % PPh X Nilai Impor
 PPn BM = % PPn BM X Nilai Impor

Keterangan :

PPN = Pajak Pertambahan Nilai

PPh = Pajak Penghasilan

PPn BM = Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Tarif Bea Masuk dapat dilihat pada Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia (BTKI)

Adapun langkah-langkah untuk menghitung Pajak untuk barang kiriman. Tentukan Nilai Pabean terlebih dahulu. Nilai Pabean diperoleh dari tiga unsur yaitu, Harga barang/FOB (*cost*) ditambah dengan asuransi (*insurance*) dan biaya/ongkos kirim (*freight*). Harga barang berdasarkan nilai transaksi dalam kondisi persaingan bebas, nilai tersebut bisa dilihat pada invoice, bukti transaksi, listing pada website penjualan dan lain-lain. Apabila bukan dari transaksi jual beli maka nilai barang akan ditetapkan oleh petugas bea dan cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Ongkos Kirim. Ongkos kirim yang dibayar untuk pengiriman paket tersebut apabila harga barang adalah "free Shipping" maka harga barang tersebut sudah termasuk ongkos kirim. Kemudian Asuransi : $0,5\% \times (\text{Harga Barang} + \text{Ongkos Kirim})$.

Tentukan tarif atau klasifikasi barang berdasarkan buku tarif

kepabeanaan Indonesia (BTKI). Apabila kesulitan bisa melalui <http://www.beacukai.go.id/?page=apps/browse-tarif-dan-lartas.html> atau hubungi petugas informasi pada KPPBC Kantor Pos Pasar Baru. Apabila terdapat lebih dari tiga jenis barang dalam satu kiriman maka tarif bea mauk berdasarkan tarif barang tertinggi.

Berikut adalah beberapa tarif barang yang biasa masuk melalui KPPBC Kantor Pos Pasar Baru:
 0 % = Buku, Kamera, HP, Laptop, dll
 5 % = Suplemen, Makanan (bahan tepung), Daging, Teropong, dll
 10 % = Jam Tangan, Spare parts Otomotif, TV, Coklat, Parfum, Mainan (sebagian) dll
 15 % = Pakaian, Tas Kulit, Kain/Tekstil, Mainan(sebagian) dll
 20 % = Sepatu Kulit, Tanaman Hidup dll
 25 % = Sepatu Karet/Plastik/Kain
 30 % = Keramik

Contoh:

1. Nilai barang USD 55, ongkos kirim USD 30, kurs 1 USD = 10.000
2. Maka nilai pabean = Nilai Barang/FOB+ ongkos kirim + asuransi = USD 55 + USD 30 + 0,43 ($0,5\% \times 85,43$) = USD 85,43
3. Nilai pabean yang digunakan untuk menghitung bea masuk dikurangi pembebasan USD 50 = USD 85,43-USD 50 = USD 35,43
4. Dikonversikan ke rupiah menjadi : Rp 354.300,00
5. Bea Masuk = $15\% \times 354.300 = \text{Rp } 53.145,00$ (pembulatan dalam ribuan rupiah)

Menghitung pajak dalam rangka impornya (PDRI). Untuk menghitung pajaknya harus diperoleh terlebih dahulu nilai impornya yaitu dengan cara menambahkan nilai pabean dengan bea masuk. Pada umumnya tarif pajak adalah PPN:10% dan PPh:7,5% (pemilik NPWP) dan 15% (tidak memiliki NPWP). Beberapa barang dikenakan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) misalnya sepatu, tas dari kulit, pakaian dari kulit apabila nilai impornya melebihi Rp. 5.000.000, informasi lebih lengkap mengenai jenis barang yang dikenakan PPnBM bisa dilihat di Peraturan Menteri Keuangan

nomor 130/PMK.011/2013 tanggal 18 September 2013.

Contoh:

- a. Nilai Impor = Nilai Pabean + Bea Masuk = Rp.354.300 + 53.000 = Rp 407.300
- b. PPN = tarif x Nilai Impor = $10\% \times \text{Rp } 407.300 = \text{Rp } 40.730$
- c. PPh = tarif x Nilai Impor = $7,5\% \times \text{Rp } 407.100 = \text{Rp } 30.532,50$ (memiliki NPWP)
- d. PPh = tarif x Nilai Impor = $15\% \times \text{Rp } 407.100 = \text{Rp } 61.065,00$ (tidak memiliki NPWP)

Sehingga total pungutan impornya adalah Rp 125.000 (memiliki NPWP) Rp 156.000 (tidak memiliki NPWP).

Menghitung melalui cara praktis. Cara ini hanya untuk mengetahui kisaran total jumlah pungutan impor berdasarkan jenis barangnya.

1. Tarif 0 % : $17,5\% \times \text{Nilai Pabean}$ (Buku, Kamera, HP, Laptop, dll)
2. Tarif 5 % : $23,375\% \times \text{Nilai Pabean}$ (Suplemen, Makanan, Daging, Teropong, dll)
3. Tarif 10% : $29,25\% \times \text{Nilai Pabean}$ (Jam Tangan, Spare parts Otomotif, TV, Coklat, Parfum, Mainan dll)
4. Tarif 15 % : $35,125\% \times \text{Nilai Pabean}$ (Pakaian, Tas Kulit, Kain/Tekstil, Mainan) dll
5. Tarif 20 % : $41\% \times \text{Nilai Pabean}$ (Sepatu Kulit, Tanaman Hidup dll)
6. Tarif 25 % : $46,875\% \times \text{Nilai Pabean}$ (Sepatu Karet/Plastik/Kain, Sandal dll)
7. Tarif 30 % : $52,75\% \times \text{Nilai Pabean}$ (Keramik dll).

Ah, betapa beruntungnya Deni.

Atas penjelasan yang ia dapat dari Nugroho, ia merasa telah tercerahkan mengenai persoalan barang kirimannya. Tak lagi cemas, tak lagi risau. Setelah tau prosedur jelasnya, ia pun kini mantap melangkah kaki menuju Kantor Pos Tukar Udara untuk mengurus barang kirimannya. Setali tiga uang dengan Deni, istrinya yang mendapat penjelasan yang sama pun menjadi tenang, mengetahui barang yang besar artinya untuk keluarganya di tanah air dapat diproses dengan baik.

(Supomo)

sumber: www.beacukaipasarbaru.com & www.bcsoetta.net

PERANAN BEA DAN CUKAI DI TIMOR-TIMUR



■ Pesawat Bea Cukai Commanche PK-BTA dengan tulisan Inspeksi Timor Timur saat siap terbang dengan mantan Pangdam Udayana Dading Kalbuadi.

Timor Leste, dahulu dikenal sebagai Provinsi Timor-Timur, pernah menjadi bagian dari Indonesia, tepatnya dari 17 Juli 1976 hingga 19 Oktober 1999, setelah dijajah selama 450 tahun oleh Portugal. Sejarah Bea Cukai di tanah Timor berawal pada tahun 1975, saat terjadi integrasi Timor-Timur menjadi wilayah Republik Indonesia. Proses integrasi ini secara konsekuen membantu penyelesaian beragam masalah menyangkut tata pemerintahan, salah satunya adalah alih proses ALFANDICA, yang merupakan penyebutan atas Douane atau Bea Cukai saat pemerintahan Portugis di Timor-Timur. Saat itu, Alfandica berkedudukan di Dili, memiliki gedung kantor di muka pelabuhan, juga pos pengawasan di Baca dan Liai. Kegiatan pelabuhan tersebut cukup ramai, dalam sebulan rata-rata terdapat dua hingga empat kapal yang datang bersandar.

Barang-barang impor yang datang dari Dili umumnya adalah barang-barang impor eks Macau (jajahan Portugis di Hongkong) yang terdiri dari barang-barang berkualitas rendah, antara lain kebutuhan

tradisional seperti tepung roti, wijen Portugis, barang-barang “made in Hongkong”, baju-baju kodian, keperluan bangunan, mesin-mesin diesel, dan sebagainya. Pada saat itu, toko-toko yang menampung barang impor adalah toko-toko monopoli yang bermerk dagang Cina, menggunakan huruf Cina, dan dimiliki oleh keturunan Cina lokal. Bir dan minuman-minuman Portugis seperti anggur, menjadi komoditi yang sangat digemari, barang lainnya adalah buku dan alat tulis.

Ketentuan impor atau tepatnya prosedur pabean dapat dikatakan sama dengan ketentuan Bea dan Cukai di zaman Belanda, dan hampir mendekati sistem di Indonesia, misalnya pada ketentuan cukai, pajak impor, konsen pelindung alkohol, ketentuan pajak ekspor, persyaratan manifes kapal, *bootzoeking*, dan peraturan wewenang dan hak pegawai.

Barang ekspor yang terkenal kala itu adalah kopi Timtim jenis Arabica dan jenis lain yang kurang baik mutunya, seperti Robusta, juga kayu cendana. Sejak dulu kayu cendana dianggap sebagai *scare commodity* dan pohon-pohonnya tidak dikultivasi,

melainkan terjadi secara alami.

Seperti diceritakan oleh mantan Kepala Inspeksi BC Timor-Timur, Drs. Roesdi Riza, dalam proses integrasi secara spontan banyak pegawai menyatakan diri sebagai Bea Cukai Republik Indonesia. Namun karena belum ada struktur organisasi baru, untuk sementara mereka ditampung oleh Pemda di Kantor Gubernur Dili. Dengan demikian terbentuknya BC di Timor-Timur terjadi antara tahun 1975-1976 saat bergabung dengan Pemda.

Pada tahun 1977-1982 proses pemindahan diserahkan kepada administrasi Bea Cukai, dilanjutkan dengan pembukaan Kantor Inspeksi Dili di Timor-Timur, dan penetapan Kepala Inspeksi yang pertama. Proses tersebut juga disertai program pendidikan sebagai awal latihan kepegawaian di Kantor Pusat cq. Puspla BC Jakarta, dan pelatihan kerja di pelabuhan Semarang, Surabaya, dan Bali. Kantor Inspeksi BC Dili adalah satu-satunya instansi di Dili yang memiliki lima pegawai putri asli Timor-Timur, di mana para pegawai lainnya merupakan pejuang integrasi eks Alfandica Portugis.

Sehubungan dengan adanya kondisi khusus di Provinsi Daerah Tk. I Timor-Timur, dan bertujuan untuk menunjang pembangunan ekonomi di sana, terdapat beberapa ketentuan keringanan pembebanan impor seperti tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan No. 437/KMK.00/1989. Perlu diketahui, Timor-Timur dalam waktu 14 tahun sudah mulai membayar bea masuk 25% sedang PPN/PPH tetap penuh. Namun, mengingat kurangnya kesempatan kerja bagi penduduk Timor-Timur, Gubernur saat itu, Mario Vegas Carascalao, masih meminta pembebasan sebagian sepanjang untuk barang-barang esensial. Hingga tahun 1982 ketentuan pabean telah lengkap diberlakukan secara berangsur-angsur. Demikian juga tugas pengawasan seperti *bootzoeking*, telah diadakan secara teratur.

(Yella M.I. – dari berbagai sumber)



■ CUSTOMS DRIVE THRU

Customs Drive Thru Layanan Manifes dan RKSP adalah fasilitas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP B Tarakan. Dengan layanan *Customs Drive Thru* memungkinkan pengguna jasa menyerahkan dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dan Manifes (BC 1.1) tanpa harus turun dari kendaraan dengan syarat telah lengkap dan benar.

FOTOGRAFER
PLI KPPBC TMP B Tarakan



■ KANTOR WILAYAH DJBC ACEH

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh adalah kantor vertikal DJBC yang dipimpin oleh Kepala Kantor setingkat eselon II.a. Terletak di kota Banda Aceh dan membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Sabang, KPPBC Banda Aceh, KPPBC Meulaboh, KPPBC Lhok Seumawe dan KPPBC Kuala Langsa. Tugas Kantor Wilayah DJBC adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya.

FOTOGRAFER
Hermansyah